



Research



IRDH

**KONSEP DASAR EVALUASI**  
PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING

**M. FATCHURAHMAN**

M. FATCHURAHMAN

**KONSEP DASAR EVALUASI  
PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING**

**2019**

**KONSEP DASAR EVALUASI  
PROGRAM BIMBINGAN DAN  
KONSELING**

**M. FATCHURAHMAN**

**CV IRDH**

# **KONSEP DASAR EVALUASI PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING**

Oleh : M. Fatchurahman  
Perancang Sampul : Yorim N. Lasboi  
Penata Letak : Rendra Sandi  
Penyunting : Cakti I. Gunawan  
Pracetak dan Produksi : Yohanes H. Laka

Hak Cipta © 2018, pada penulis

Hak publikasi pada CV IRDH

*Dilarang memperbanyak, memperbanyak sebagian atau seluruh isi  
dari buku ini dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit.*

Cetakan pertama Januari 2019

Penerbit CV IRDH

Anggota IKAPI No. 159-JTE-2017

Office: Jl. Sokajaya No. 59, Purwokerto

New Villa Bukit Sengkaling C9 No. 1 Malang

HP 081 357 217 319 WA 089 621 424 412

[www.irdhcenter.com](http://www.irdhcenter.com)

Email: [buku.irdh@gmail.com](mailto:buku.irdh@gmail.com)

ISBN: 978-602-0726-38-0

i-ivint + 144 hlm, 25 cm x 17.6 cm

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil Alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan buku ini dengan judul: ***Konsep Dasar Evaluasi Program Bimbingan dan Konseling***. Buku ini disusun merupakan inspirasi dari hasil penelitian/penyusunan disertasi dengan judul: ***Evaluasi Program Pelayanan Bimbingan dan Konseling Pada SMA Negeri Kota Palangka Raya pada tahun 2016***

Buku ini dimaksudkan untuk menambah referensi bagi para mahasiswa, dosen, guru serta teman seprofesi lainnya. Buku ini berisikan tentang (1) konsep program bimbingan dan konseling, meliputi: pengertian dan tujuan program, sasaran program, jenis-jenis program, prinsip-prinsip pokok pelayanan bimbingan dan konseling, komponen-komponen program bimbingan dan konseling, mekanisme implementasi program bimbingan dan konseling di sekolah/madrasah, dan gambaran pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling di sekolah/madrasah, serta kriteria keberhasilan pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah/madrasah (2) konsep evaluasi program, meliputi: pengertian evaluasi program, dan model-model evaluasi program, dan (3) kriteria evaluasi program bimbingan dan konseling.

Buku ini merupakan terbitan kedua yang merupakan revisi dari buku sebelumnya, hal ini dilakukan atas dasar dari kritikan dan saran-saran yang konstruktif dari berbagai pihak. Revisi dari buku ini terutama pada judul sampul bertulis Dasar-Dasar Evaluasi Program

Bimbingan dan Konseling sedangkan bagian dalam bertuliskan Konsep Dasar Evaluasi Program Bimbingan dan Konseling, sehingga perlu disinkronkan, dan pada Bab III bagian B (11). Karena itu bimbingan, dukungan, arahan dan saran-saran dari berbagai pihak tetap diharapkan. Oleh sebab itu selayaknya penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung atas tersusunnya buku ini.

Semoga Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang memberkati kita semua. Amin.

Palangka Raya, Desember 2018

Penulis

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>I</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>III</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>IV</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>V</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG PERLUNYA EVALUASI PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING.....	1
B. RUANG LINGKUP DASAR DASAR EVALUASI PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING.....	3
C. KOMPETENSI YANG HARUS DI KUASAI.....	4
<b>BAB 2 KONSEP PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING .....</b>	<b>7</b>
A. PENGERTIAN PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING.....	7
B. TUJUAN PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING.....	9
C. SASARAN PROGRAM PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING.....	12
D. JENIS-JENIS PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING.....	16
E. PRINSIP-PRINSIP POKOK PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING.....	19
F. KOMPONEN-KOMPONEN PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING.....	24
G. MEKANISME IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING DI SEKOLAH .....	56
H. GAMBARAN PELAKSANAAN PROGRAM LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING DI SEKOLAH/MADRASAH.....	59
I. KRITERIA KEBERHASILAN PELAKSANAAN PROGRAM PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING DI SEKOLAH.....	63
<b>BAB 3 KONSEP EVALUASI PROGRAM .....</b>	<b>69</b>
A. PENGERTIAN EVALUASI PROGRAM.....	69
B. MODEL-MODEL EVALUASI PENDIDIKAN .....	74
C. KOMPONEN EVALUASI PENYELENGGARAAN BIMBINGAN DAN KONSELING DI SEKOLAH/MADRASAH.....	106
D. LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN EVALUASI PENYELENGGARAAN BIMBINGAN DAN KONSELING DI SEKOLAH/MADRASAH .....	113
<b>BAB 4 KRITERIA EVALUASI PROGRAM.....</b>	<b>115</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>122</b>
<b>GLOSARIUM.....</b>	<b>131</b>
<b>INDEKS .....</b>	<b>132</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>135</b>
<b>TENTANG PENULIS .....</b>	<b>143</b>

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 KOMPONEN PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING (DEPDIKBUD , 2007) .....	26
GAMBAR 2 KAITAN CIPP DENGAN PROGRAM YANG DIEVALUASI (STUFFLEBEAM DAN SHINKFIELD , 2007).....	82
GAMBAR 3 TAHAP-TAHAP EVALUASI MODEL CSE-UCLA. ....	84
GAMBAR 4 MATRIKS COUNTENANCE STAKE (OGLE, 2002).....	88
GAMBAR 5 DESAIN MODEL EPIC DARI ROBERT L. HAMMOND (OGLE, 2002).....	93
GAMBAR 6 SKALA PENILAIAN .....	108

## DAFTAR TABEL

TABEL 1 KRITERIA EVALUASI PROGRAM PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING DI SEKOLAH ATAU MADRASAH. ....	116
---	-----

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Perlunya Evaluasi Program Bimbingan dan Konseling.**

Pelayanan bimbingan dan konseling merupakan bagian yang integral dari kegiatan proses pelaksanaan pendidikan di sekolah secara keseluruhan. Oleh karena itu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program pendidikan pelayanan bimbingan dan konseling dituntut untuk memiliki evaluasi terhadap berbagai layanan yang telah diselenggarakan. Sebagai pejabat fungsional guru bimbingan dan konseling dituntut melaksanakan berbagai tugas pokok fungsionalnya secara professional. Adapun tugas pokok guru pembimbing menurut SK Menpan No.84/1993 ada lima yaitu: (1) menyusun program bimbingan dan konseling. (2) melaksanakan program bimbingan dan konseling.(3) mengevaluasi program bimbingan dan konseling.(4) menganalisis hasil pelaksanaan bimbingan dan konseling.(5) melaksanakan tindak lanjut dalam program bimbingan dan konseling terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya. (Sukardi, 2008:61).

Dalam penyusunan program bimbingan dan konseling diberbagai sekolah belum menjadi rutinitas, hal tersebut masih adanya anggapan masih relevan. Sehingga kadangkala masih adanya sekolah dalam menyusun program bimbingan dan konseling belum sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Permasalahan tersebut disebabkan beberapa hal, diantaranya keterbatasan penguasaan teknologi informasi (soft skill), kurangnya sarana dan prasarana,

anggaran yang terbatas, sehingga menyebabkan minimnya pengaplikasian instrumen dan tidak menetapkan instrumen dalam mengevaluasi program bimbingan dan konseling yang baku (walaupun ada hanyalah dijadikan dokumen karena rancunya instrumen evaluasi program bimbingan dan konseling), termasuk dalam penghimpunan data hasil pelayanan menjadi tidak rutin dilakukan.

Berbagai fenomena tersebut, sesungguhnya dapat menghambat bahkan mempersulit bagi guru bimbingan dan konseling atau konselor dalam melaksanakan tugas-tugasnya di sekolah. Sebagai guru bimbingan dan konseling sangatlah menaruh harapan besar agar bimbingan dan konseling dapat berjalan dengan baik di sekolah. Para konselor merasa prihatin jika melaksanakan tugas-tugas guru bimbingan dan konseling di sekolah kurang maksimal. Dengan demikian bahwa pelaksanaan evaluasi program layanan bimbingan dan konseling penting dilakukan, sehingga diharapkan seorang guru bimbingan dan konseling memiliki pemahaman mengenai berbagai permasalahan secara mendalam penyelenggaraan program layanan bimbingan dan konseling.

Dalam program bimbingan dan konseling terdiri dari beberapa komponen atau prosedur yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi. Dalam evaluasi pelaksanaan program di dalamnya terdapat suatu penilaian terhadap kegiatan dan layanan yang telah dilaksanakan. Evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling merupakan satu rangkaian kegiatan yang sangat penting, karena berdasarkan hasil evaluasi itulah dapat diambil suatu

kesimpulan apakah kegiatan yang telah dilakukan itu dapat mencapai sasaran yang diharapkan secara efektif dan efisien atau tidak, kegiatan itu perlu diteruskan atau tidak program bimbingan dan konseling tersebut. Gysberg dan Hendarson (tanpa tahun,188) menyebutkan bahwa evaluasi program merupakan prosedur yang digunakan untuk menentukan sejauhmana program bimbingan dan konseling di sekolah sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat dan berfungsi sepenuhnya. Penilaian yang diberikan sesuai kondisi suatu program tertentu dengan menggunakan standar dan kriteria evaluasi program yang ada di dalam kerangka kerja program bimbingan dan konseling yang dilaksanakan.

## **B. Ruang Lingkup Dasar Dasar Evaluasi Program Bimbingan dan Konseling.**

Ruang lingkup dari materi buku dasar-dasar evaluasi program bimbingan dan konseling ini adalah sebagai berikut:

1. Konsep program bimbingan dan konseling
  - a. Pengertian program bimbingan dan konseling
  - b. Tujuan program bimbingan dan konseling
  - c. Sasaran program pelayanan bimbingan dan konseling.
  - d. Jenis-jenis program bimbingan dan konseling
  - e. Prinsip-prinsip pokok pelayanan bimbingan dan konseling
  - f. Komponen-komponen program bimbingan dan konseling
  - g. Mekanisme implementasi program bimbingan dan konseling di sekolah/madrasah
  - h. Gambaran pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling di sekolah/madrasah.

- i. Kriteria keberhasilan pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah/madrasah
2. Konsep evaluasi program
  - a. Pengertian evaluasi program
  - b. Model-model evaluasi program
3. Kriteria evaluasi program bimbingan dan konseling

### **C. Kompetensi Yang Harus Di Kuasai**

Setelah mempelajari buku dengan topik dasar-dasar evaluasi program bimbingan dan konseling ini diharapkan konselor dapat memiliki kompetensi sebagai berikut:

1. Memahami pengertian program bimbingan dan konseling
2. Memahami tujuan program bimbingan dan konseling
3. Mengetahui sasaran program pelayanan bimbingan dan konseling.
4. Mengetahui jenis-jenis program bimbingan dan konseling
5. Mengetahui prinsip-prinsip pokok pelayanan bimbingan dan konseling
6. Mengetahui komponen-komponen program bimbingan dan konseling
7. Mengetahui mekanisme implementasi program bimbingan dan konseling di sekolah/madrasah
8. Mengetahui gambaran pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling di sekolah/madrasah.
9. Mengetahui kriteria keberhasilan pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah/madrasah
10. Memahami pengertian evaluasi program

11. Mengetahui model-model evaluasi program

12. Mengetahui kriteria evaluasi program

Indikator dari keberhasilan konselor dalam memahami dasar-dasar evaluasi program bimbingan dan konseling ini dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut:

1. Dapat menjelaskan pengertian program bimbingan dan konseling
2. Dapat menjelaskan tujuan program bimbingan dan konseling
3. Dapat menyebutkan sasaran program pelayanan bimbingan dan konseling.
4. Dapat menyebutkan jenis-jenis program bimbingan dan konseling
5. Dapat menyebutkan prinsip-prinsip pokok pelayanan bimbingan dan konseling
6. Dapat menyebutkan komponen-komponen program bimbingan dan konseling
7. Dapat menyebutkan mekanisme implementasi program bimbingan dan konseling di sekolah/madrasah
8. Dapat menjelaskan gambaran pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling di sekolah/madrasah.
9. Dapat menyebutkan kriteria keberhasilan pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah/madrasah
10. Dapat menjelaskan pengertian evaluasi program
11. Dapat menyebutkan model-model evaluasi program

12. Dapat menyebutkan kriteria evaluasi program bimbingan dan konseling.

## **BAB 2**

# **KONSEP PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING**

### **A. Pengertian Program Bimbingan dan Konseling.**

Kegiatan bimbingan dan konseling dapat mencapai hasil yang efektif bilamana dimulai dari adanya program yang disusun dengan baik. Program berisi tentang rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pemberian layanan bimbingan dan konseling. Program bimbingan dan konseling merupakan bagian yang terpadu dari keseluruhan program pendidikan di sekolah, maka program bimbingan dan konseling seluruh kegiatannya diarahkan kepada pencapaian tujuan pendidikan di lembaga yang bersangkutan. Selain itu program bimbingan dan konseling diarahkan kepada upaya yang memfasilitasi peserta didik untuk mengenal dirinya dan menerima dirinya sendiri serta lingkungannya secara positif dan dinamis, penyusunan program bimbingan dan konseling merupakan perwujudan diri secara efektif dan produktif, sesuai dengan peranan yang diinginkan (Giyono, 2015)

Dalam usaha membantu mengembangkan kehidupan pribadi tersebut, maka pelayanan bimbingan dan konseling diharapkan dapat memfasilitasi pengembangan peserta didik, secara individual atau kelompok, sesuai kebutuhan potensi, bakat, minat, serta perkembangan peluang-peluang yang dimiliki. Disamping itu membantu mengatasi kelemahan dan hambatan serta masalah yang dihadapi peserta didik. Karena itulah program bimbingan dan

konseling merupakan suatu rancangan atau rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu (Tohirin, 2014). Rancangan tersebut artinya haruslah disusun secara sistematis, terorganisasi, dan terkoordinasi dalam jangka waktu tertentu.

Winkel (Dewanti, 2013) menyebutkan bahwa program bimbingan merupakan suatu rangkaian kegiatan terencana, terorganisasi, dan terkoordinasi selama periode waktu tertentu. Sedangkan Dewanti (2013) menyebutkan bahwa program bimbingan dan konseling di sekolah adalah suatu rancangan kegiatan pelayanan bantuan pada peserta didik atau siswa di sekolah oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor secara terencana, terorganisir dan terkoordinasi yang dilaksanakan pada periode tertentu, teratur dan berkesinambungan.

Senada dengan pendapat tersebut, Giyono (2015) menyatakan bahwa program bimbingan dan konseling dilaksanakan oleh guru BK atau konselor sekolah berlangsung setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, sepanjang semester dan sepanjang tahun. Karena itu perlu disusun program tahunan, program semester, program bulanan, program mingguan dan program harian.

Penyusunan rancangan program bimbingan dan konseling sangat memegang peranan penting dalam keberhasilan pelaksanaan layanan bimbingan di sekolah. Penyusunan program bimbingan dan konseling di sekolah hendaknya disusun berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh siswa serta kebutuhan-kebutuhan yang dihadapinya, sehingga akhirnya siswa dapat mencapai tujuan

pendidikan itu sendiri yaitu kedewasaan dalam bertindak dan berperilaku secara wajar sesuai dengan perkembangan mereka.

Roeber (Juntika, 2005) mengemukakan tiga pertanyaan yang perlu dijawab dalam perencanaan suatu program bimbingan yaitu : (1) *What are the guidance needs of the pupils?* Apakah kebutuhan-kebutuhan bimbingan untuk siswa? (2) *To what extent are their needs being met under present conditions?* Sejauh manakah kebutuhan-kebutuhan itu dapat dipenuhi dengan kondisi yang ada sekarang? Dan (3) *How can the school better meet their needs?* Bagaimana sekolah dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut dengan baik?.

Dengan demikian disimpulkan bahwa program bimbingan dan konseling adalah satuan rencana keseluruhan dari kegiatan bimbingan dan konseling yang akan dilaksanakan pada suatu periode tertentu dengan tujuan untuk mempermudah konselor sekolah dalam memberikan pelayanan kepada peserta didik dalam upaya pengembangan potensi diri peserta didik, sehingga merupakan seperangkat kegiatan bimbingan dan konseling yang saling terkait satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bimbingan dan konseling yang telah ditentukan.

## **B. Tujuan Program Bimbingan dan Konseling.**

Secara umum tujuan penyusunan sebuah program adalah agar seluruh kegiatan dapat terorganisasi dan terkoordinasi secara sistematis, sehingga dapat berjalan dengan lancar, efisien, dan efektif kearah pencapaian suatu tujuan. Bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu konseling agar dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya. Adapun tujuan program bimbingan dan konseling

disekolah menurut Ash-Shiddiqi (2013) terdiri dari : (1) Tujuan umum, dan (2) Tujuan Khusus. Secara rinci diuraikan sebagai berikut:

- (1) Tujuan pelayanan bimbingan adalah agar konseli dapat :
  - a. Merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir serta kehidupannya di masa akan datang.
  - b. Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang di milikinya secara optimal.
  - c. Menyesuaikan diri dengan lingkungan
  - d. Mengatasi hambatan dan kesulitan yang di hadapinya.
- (2) Tujuan khusus bimbingan dan konseling di sekolah (Umar, dkk.) sebagai berikut.
  - a. Membantu siswa-siswa untuk mengembangkan pemahaman diri sesuai dengan kecakapan ,minat,pribadi,hasil belajar,serta kesempatan yang ada.
  - b. Membantu siswa-siswa untuk mengembangkan motif-motif dalam belajar,sehingga tercapai kemajuan pengajaran yang berarti.
  - c. Memberikan dorongan di dalam pengarahan diri, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan keterlebitan diri dalam proses pendidikan.
  - d. Membantu siswa-siswa untuk memperoleh kepuasan pribadi dalam penyesuaian diri secara maksimum terhadap masyarakat
  - e. Membantu siswa-siswa untuk hidup di dalam kehidupan yang seimbang dalam berbagai aspek fisik, mental, dan social.

Menurut Ridwan (Kurniawan, 2015) menyebutkan bahwa bimbingan dan konseling yang bermakna adalah bimbingan dan konseling yang memberikan manfaat sepenuhnya bagi subyek. Oleh karena itu layanan bimbingan dan konseling hendaknya berdasar pada kebutuhan subyek. Hal ini berimplikasi dalam penyusunan program, Dalam rangka penyusunan program bimbingan dan konseling di sekolah hendaknya disusun dengan diawali menganalisis kebutuhan (*needs assessment*).

Sunaryo Kartadinata, dkk. dalam penelitiannya menunjukkan bahwa program bimbingan dan konseling di sekolah akan berlangsung efektif, apabila didasarkan kepada kebutuhan nyata dan kondisi objektif perkembangan peserta didik (Kurniawan, 2015). Oleh karena itu dalam usaha menyusun program bimbingan dan konseling di sekolah, ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu: (a) merumuskan masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik, guru bimbingan dan konseling, dan kepala sekolah. (b) merumuskan dengan jelas tujuan yang ingin dicapai dalam mengenai berbagai masalah, serta dirumuskan bentuk-bentuk kegiatan yang berkenaan dengan butir dan subbutir rincian kegiatan waktu pelaksanaan, dan sasarannya. (c) merumuskan dan diinventarisasikan berbagai fasilitas yang ada, termasuk di dalamnya personel pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah, serta anggaran biaya yang diperlukan untuk memperlancar jalannya kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyusunan program bimbingan dan konseling di sekolah adalah merupakan seperangkat kegiatan merumuskan masalah dan tujuan, bentuk-bentuk kegiatan, personel, fasilitas, anggaran biaya yang yang diperlukan, serta berbagai bentuk usulan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

### **C. Sasaran Program Pelayanan Bimbingan dan Konseling.**

Secara umum sasaran dari program bimbingan dan konseling di sekolah adalah mengembangkan apa yang terdapat pada setiap pribadi individu yang secara optimal agar setiap individu bisa berguna bagi dirinya sendiri, lingkungannya, dan masyarakat pada umumnya. Hamrin dan Erickson menyebutkan bahwa bimbingan sebagai aspek program pendidikan yang bersangkutan terutama untuk membantu siswa yang disesuaikan dengan situasinya sekarang dan untuk merencanakan masa depannya yang telah ditetapkan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan sosialnya (Hussain Dogar, et.al., 2011). Lebih khusus lagi sasaran pembinaan pribadi peserta didik melalui pelayanan bimbingan dan konseling melalui tahap-tahap pengembangan kemampuan-kemampuan (1) pengungkapan, pengenalan dan penerimaan diri, (2) pengungkapan, pengenalan dan penerimaan lingkungan, (3) pengambilan keputusam, (4) pengarahan diri, dan (5) perwujudan diri (Fathurrohman, 2014). Tahapan-tahapan tersebut masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Pengungkapan, pengenalan, dan penerimaan diri.

Berkenaan dengan pengungkapan, pertanyaan yang bisa diajukan adalah mengapa harus diungkap? apa yang mesti diungkap?

siapa yang diungkap? dan bagaimana cara mengungkapnya? Tiap individu (siswa) diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dibekali dengan potensi-potensi tertentu, namun tidak semua individu mampu mengungkap potensi dirinya. Dalam kondisi demikian, individu harus dibantu untuk mengungkap potensi-potensi dirinya. Demikian juga setiap individu (siswa) pasti memiliki masalah, tetapi kompleksitasnya berbeda satu dengan yang lain. Tidak semua individu mengenal atau mengetahui masalah dirinya. Oleh sebab itu, individu tersebut harus dibantu untuk mengenali masalahnya. Selanjutnya, yang mesti diungkap dari individu adalah potensi-potensi diri dan masalah yang dihadapinya, sedangkan yang diungkap adalah semua siswa yang menjadi sasaran pelayanan bimbingan dan konseling. Cara mengungkap potensi-potensi dan masalah individu bisa dilakukan melalui konseling atau cara yang lainnya seperti tes, observasi, angket, wawancara, sosiometri, catatan pribadi, kunjungan rumah, dan lain-lain.

Pribadi dewasa yang mantap dan berkembang secara baik adalah apabila individu yang bersangkutan benar-benar menyadari atau memahami tentang dirinya. Kesadaran tentang diri sendiri akan tercapai apabila kemampuan pengungkapan diri dapat berkembang secara baik pula. Tidak semua individu (siswa) mampu mengungkap potensi dirinya seperti kecakapan, kemampuan, bakat, dan potensi-potensi lainnya. Demikian juga tidak semua individu mampu mengungkap berbagai persoalan yang dihadapinya. Kemampuan pengungkapan diri tidak serta merta timbul pada diri seseorang, melainkan memerlukan bantuan orang lain atau alat-alat tertentu

seperti melalui tes intelegensi, tes bakat, minat, alat pengungkapan ciri-ciri kepribadian, dan lain sebagainya, dengan perkataan lain melalui pelayanan bimbingan dan konseling.

## (2) Pengenalan lingkungan.

Individu (siswa) hidup di tengah-tengah lingkungan. Individu tidak hanya dituntut untuk mengenal dirinya sendiri, melainkan juga dituntut untuk mengenal lingkungan. Lingkungan yang kurang menguntungkan bagi individu, hendaknya tidak membuat ia putus asa, melainkan ia terima secara wajar dan berusaha memperbaikinya. Agar dapat mewujudkan sikap positif terhadap lingkungannya atau agar individu berperilaku sesuai dengan tuntutan lingkungannya, individu yang bersangkutan harus diperkenalkan dengan lingkungannya.

Individu (siswa) yang tidak mengenal lingkungan sekolahnya secara baik, maka perilakunya akan bermasalah seperti pelanggaran disiplin. Upaya memperkenalkan individu terhadap lingkungannya dapat dilakukan melalui pelayanan bimbingan dan konseling, sehingga terwujud pribadi yang sehat, dalam arti pribadi yang mampu bersikap positif terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya.

## (3) Pengambilan keputusan.

Setelah potensi individu (siswa) terungkap dan individu yang bersangkutan mengenal potensi dirinya, mengenal masalah-masalah yang dihadapinya dan individu tersebut dapat menerima dirinya apa adanya sesuai dengan potensinya, serta telah mengenal lingkungannya secara baik (mampu mewujudkan sikap positif

terhadap lingkungan-nya), maka tahap berikutnya adalah pembinaan kemampuan untuk pengambilan keputusan.

Pengambilan keputusan yang menyangkut diri sendiri, seringkali berat dilakukan, terlebih apabila terjadi pertentangan antara realitas tentang diri sendiri dengan lingkungannya. Di sinilah peranan bimbingan dan konseling untuk membantu penampilan secara objektif dua unsur, yaitu diri sendiri dan lingkungan.

#### (4) Pengarahan diri.

Kemampuan mengambil keputusan hendaknya diwujudkan dalam bentuk kegiatan nyata. Sebaik apapun sebuah keputusan, apabila tidak diwujudkan dalam bentuk kegiatan nyata tidak akan ada manfaatnya. Seseorang (individu) harus berani menjalani keputusan yang telah diambilnya untuk dirinya sendiri. Seorang siswa telah memutuskan bahwa ia harus menjumpai atau menghadap wali kelas untuk membicarakan rencana kegiatan liburan akhir semester, maka ia harus berani melaksanakan keputusan itu, yaitu menghadap wali kelas. Seorang siswa telah memutuskan bahwa ia harus membuat jadwal belajar dan melaksanakannya secara konsisten untuk meningkatkan prestasi belajarnya, maka ia harus berani dan konsekuen melaksanakan keputusan yang telah diambilnya, yaitu membuat jadwal belajar, dan melaksanakannya.

#### (5) Eksistensi diri (perwujudan diri).

Dalam konteks ini tujuan pelayanan bimbingan dan konseling adalah membantu individu (siswa) agar mampu mewujudkan diri secara baik di tengah-tengah lingkungannya. Setiap individu

hendaknya mampu mewujudkan diri sendiri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan dasar, dan karakteristik kepribadiannya.

Perwujudan diri individu hendaknya dilakukan tanpa paksaan dan tanpa ketergantungan kepada orang lain. Selain itu, perwujudan diri hendaknya normatif dalam arti sesuai norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Apabila kemampuan mewujudkan diri benar-benar telah dimiliki seseorang, maka ia akan mampu berdiri sendiri dengan pribadi yang bebas dan mantap.

Sedangkan berkenaan dengan evaluasi hasil dari pelayanan bimbingan dan konseling, yang menjadi sasaran evaluasi adalah berorientasi pada perubahan tingkah laku (termasuk di dalamnya pendapat, nilai dan sikap serta perkembangan siswa) (Daniaty, 2012). Oleh karena itu berdasarkan pendapat tersebut maka evaluasi pelayanan bimbingan dan konseling tidak dapat diberlakukan melalui ulangan, hasil tes atau ujian, pemeriksaan hasil pekerjaan rumah, melainkan diberlakukan dalam proses pencapaian kemajuan dari perkembangan perubahan tingkah laku siswa atau klien itu sendiri secara positif setelah memperoleh atau menjalani layanan yang telah diberikan kepadanya.

#### **D. Jenis-Jenis Program Bimbingan dan Konseling**

Program bimbingan dan konseling adalah kumpulan dari berbagai rencana kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling yang disusun berdasarkan pada kebutuhan peserta didik pada suatu periode tertentu. Ada beberapa jenis atau macam jenis program layanan bimbingan dan konseling disusun dan diselenggarakan (Depdikbud, 2014) sebagai berikut:

- 1) Program Tahunan, yaitu program layanan bimbingan dan konseling meliputi kegiatan mencakup komponen, strategi dan bidang layanan selama satu tahun ajaran untuk masing-masing kelas rombongan belajar pada satuan pendidikan.
- 2) Program Semesteran yaitu program layanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama satu semester merupakan jabaran kegiatan lebih rinci dari program tahunan. Periode tersebut bisa dalam rentang tahunan, semesteran, bulanan, mingguan, dan harian. Masing-masing jenis program bimbingan dan konseling tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - a. Program Tahunan  
Yaitu program bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung selama satu tahun untuk masing-masing kelas di sekolah.
  - b. Program Semesteran  
Yaitu program bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung selama satu semester untuk masing-masing kelas yang merupakan jabaran dari program tahunan.
  - c. Program Bulanan  
Program bulanan merupakan program bimbingan dan konseling yang meliputi seluruh kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung selama satu bulan yang merupakan jabaran program semesteran.
  - d. Program Mingguan

Program mingguan merupakan program pelayanan bimbingan dan konseling yang meliputi seluruh kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung selama satu minggu yang merupakan jabaran dari program bulanan.

e. Program Harian

Program harian merupakan program pelayanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan pada hari-hari tertentu dalam satu minggu. Program harian merupakan jabaran dari program mingguan dalam bentuk rencana program pelayanan/ pendukung (RPP) atau dapat berbentuk satuan layanan (SATLAN) dan atau satuan kegiatan pendukung (SATKUNG) bimbingan dan konseling.

Dari kelima jenis program tersebut, maka guru bimbingan dan konseling dapat menentukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan bimbingan dan konseling secara terperinci sesuai dengan waktu periode yang telah ditentukan. Dari program tahunan di dalamnya meliputi program semesteran, program semesteran di dalamnya meliputi program bulanan, program bulanan di dalamnya meliputi agenda mingguan, dan agenda mingguan di dalamnya meliputi agenda harian. Agenda harian ini merupakan jabaran dari agenda mingguan guru pembimbing pada kelas yang diasuh. Agenda ini dibuat secara tertulis pada buku agenda yang berupa satuan layanan dan atau satuan pendukung (Sugiyono, 2011).

Guru bimbingan dan konseling atau konselor juga dapat menyesuaikan program bimbingan dan konseling yang telah disusun dengan program sekolah agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan

dengan lancar tanpa adanya benturan. Semua hal ini bertujuan agar kegiatan layanan bimbingan dan konseling yang telah tercantum diprogram bimbingan dan konseling dapat berjalan secara efektif dan efisien.

### **E. Prinsip-Prinsip Pokok Pelayanan Bimbingan dan Konseling.**

Dalam penyusunan program bimbingan dan konseling di sekolah perlu diperhatikan prinsip-prinsip pokok yang akan mendasari program yang akan disusun. Prinsip-prinsip pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling tersebut merupakan perpaduan hasil kajian teoritik dan telaah empirik yang terarah yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan sesuatu yang akan dilakukan (Hallen, 2002). Dalam layanan bimbingan dan konseling, prinsip-prinsip yang digunakan bersumber dari kajian filosofis, hasil-hasil penelitian dan pengalaman praktis tersebut berkenaan dengan hakikat manusia, perkembangan dan kehidupan manusia dalam konteks sosial budayanya serta dalam proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling.

Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling dapat berkaitan dengan pelaksanaan layanan bimbingan, yaitu:

*Pertama*, prinsip-prinsip pelaksanaan program bimbingan. Menurut Van Hoose (Prayitno, 2001) menyebutkan terdapat lima prinsip yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan dan konseling, yaitu (1) bimbingan berdasarkan pada keyakinan bahwa dalam diri individu terkandung kebaikan-kebaikan, setiap pribadi mempunyai potensi,

dan pendidikan hendaklah membantu mengembangkan potensinya itu, (2) bimbingan didasarkan pada ide bahwa setiap anak adalah unik yang berbeda dengan yang lain, (3) bimbingan merupakan bantuan kepada anak-anak dan pemuda dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka menjadi pribadi-pribadi yang sehat, (4) bimbingan adalah pelayanan unik yang dilaksanakan oleh ahli yang telah mengikuti latihan khusus, dan untuk melaksanakan layanan bimbingan diperlukan minat pribadi khusus pula.

Kemudian Shertzer & Stone (1981) mengemukakan enam prinsip bimbingan yang berfungsi sebagai parameter pelaksanaan bimbingan dan konseling, menggambarkan model operasional, dan menjelaskan asumsi-asumsi filosofisnya. Keenam prinsip tersebut, yaitu (1) bimbingan sangat utama bila difokuskan pada perkembangan individu, (2) model utama pelaksanaan bimbingan ditentukan oleh proses perilaku individu, (3) bimbingan diorientasikan pada kerjasama, bukan paksaan, (4) manusia memiliki kemampuan yang berkembang, (5) bimbingan didasarkan pada pengenalan harga diri dan nilai individu, serta hak mereka untuk memilih, dan (6) bimbingan bersifat berkelanjutan, urut dan proses pendidikan.

Sedangkan Belkin (Prayitno, 2001) merumuskan enam prinsip untuk menegakkan dan menumbuh kembangkan pelaksanaan program bimbingan dan konseling di institusi pendidikan yaitu: (1) konselor harus memulai kariernya sejak awal dengan program kerja yang jelas dan memiliki kesiapan yang tinggi untuk melaksanakan program tersebut, (2) konselor harus tetap mempertahankan sikap

profesional tanpa harus mengganggu hubungan antara konselor dan peserta didik dan personil sekolah lainnya, (3) konselor bertanggung jawab untuk memahami peranannya sebagai konselor profesional dan menerjemahkan peranannya itu ke dalam kegiatan nyata, (4) konselor bertanggung jawab kepada semua peserta didik, baik yang gagal, yang menimbulkan gangguan, yang kemungkinan putus sekolah, yang mengalami permasalahan emosional, yang mengalami kesulitan belajar, maupun bagi peserta didik yang memiliki bakat istimewa, yang berpotensi rata-rata, yang pemalu dan sebagainya, (5) konselor harus memahami dan mengembangkan kompetensi untuk membantu peserta didik-peserta didik yang mengalami masalah yang serius dan yang menderita gangguan emosional, dan (6) konselor harus bekerjasama secara efektif dengan kepala sekolah.

*Kedua*, prinsip yang berkaitan dengan pengembangan program bimbingan dikemukakan oleh Gysbers dan Haderson (2006) mengemukakan tujuh prinsip pengembangan program bimbingan dan konseling, yaitu (1) program bimbingan membantu perkembangan peserta didik dan memperhatikan perbedaan individualnya, (2) program bimbingan membantu peserta didik agar dapat hidup bekerjasama dalam suatu kelompok, (3) program bimbingan memberikan layanan kepada semua peserta didik di semua jenjang pendidikan, (4) program bimbingan membantu semua peserta didik dalam mengembangkan pribadi, sosial, karier dan pendidikan, (5) program bimbingan menyediakan layanan konsultasi dan koordinasi bagi para guru, orang tua peserta didik, dan staf administrasi, (6) program bimbingan mengembangkan layanan

preventif dan remedial bagi peserta didik, dan (7) program bimbingan ada dua macam, yaitu sebagai komponen integral dan komponen independen dari keseluruhan program pendidikan di sekolah.

Dari rumusan prinsip-prinsip pengembangan program bimbingan dan konseling oleh Gysbers dan Haderson di atas, maka dalam rangka penyusunan dan pengembangan program bimbingan dan konseling sekolah yang komprehensif perlu diperhatikan dua langkah besar yang menjadi dasar kerja, yaitu: a) pemetaan kebutuhan, masalah, dan konteks layanan; dan b) desain program yang sesuai dengan kebutuhan, masalah, dan konteks layanan (Rahman, 2008).

Dari beberapa prinsip pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling sebagaimana telah dikemukakan di atas disimpulkan sebagai berikut:

- (a) **Prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan:** (a) Bimbingan dan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur jenis kelamin, suku, agama dan status sosial ekonomi. (b) Bimbingan dan konseling berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu dan memperhatikan berbagai aspek perkembangan individu, serta memberikan perhatian utama kepada perbedaan individual yang menjadi orientasi pokok pelayanan.
- (b) **Prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu; bahwa bimbingan** dan konseling berhubungan dengan pengaruh kondisi mental atau fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah maupun di sekolah, dan yang menjadi faktor timbulnya

masalah pada individu adalah kesenjangan sosial, ekonomi dan kebudayaan.

(c) **Prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan:** (a) Bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari upaya pendidikan dan pengembangan individu; (b) Program bimbingan dan konseling harus fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat dan kondisi lembaga serta disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan terendah sampai tertinggi.

(d) **Prinsip yang berkenaan dengan tujuan pelaksanaan pelayanan:** (a) Bimbingan dan konseling harus diarahkan untuk mengembangkan individu sehingga keputusan yang diambil dan akan dilakukan oleh individu hendaknya atas kemauan individu itu sendiri. (b) Permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

(e) **Prinsip bimbingan dan konseling disekolah** menegaskan bahwa penegakan terhadap pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah hanya dilakukan oleh konselor profesional yang sadar akan profesinya, mampu menerjemahkan ke dalam program dan hubungan dengan sejawat dan personal sekolah lainnya, memiliki komitmen dan keterampilan untuk membantu peserta didiknya, dan mampu bekerja sama serta membina hubungan yang harmonis dan dinamis dengan kepala sekolah.

## **F. Komponen-Komponen Program Bimbingan dan Konseling.**

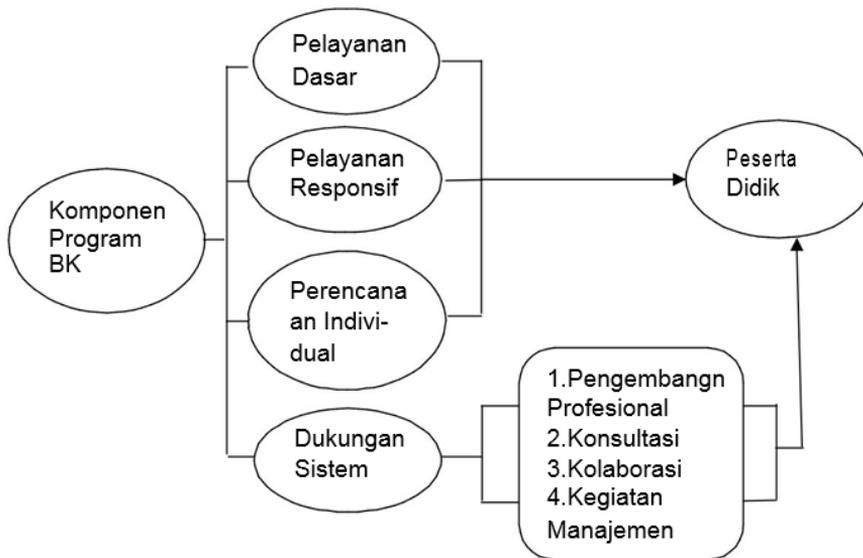
Pelayanan bimbingan di lembaga pendidikan formal terlaksana dengan mengadakan sejumlah kegiatan bimbingan. Seluruh kegiatan itu terselenggarakan dalam rangka suatu program bimbingan, yaitu suatu rangkaian kegiatan bimbingan yang terencana, terorganisasi, dan terkoordinasi selama periode waktu tertentu. Di dalam program bimbingan dan konseling terdapat beberapa komponen, yang meliputi susunan saluran formal untuk melayani para peserta didik, tenaga-tenaga kependidikan yang lain, serta orang tua peserta didik. Untuk menjangkau pelayanan bimbingan yang lebih luas dan mencapai tujuan, program bimbingan dan konseling hendaknya disusun secara komprehensif. Gysberrs & Henderson (2006) mengemukakan definisi program bimbingan dan konseling komprehensif sebagai berikut:

*comprehensive guidance and counseling program as having a common language organizational framework with specific configuration of planned, sequenced, and coordinated guidance and counseling activities and service based on student, school, and community needs an resources, designed to serve all student and their parents or guardians in local school district.*

Berdasarkan definisi di atas terdapat empat konsep penting, yaitu: *Pertama*, program bimbingan dan konseling komprehensif merupakan arah kerja (*framework*) bimbingan dan konseling di sekolah. *Kedua*, arah kerja (*framework*) tersebut berisi perencanaan, tahapan, rangkaian kegiatan dan pelayanan bimbingan dan konseling. *Ketiga*, kegiatan dan pelayanan bimbingan dan konseling dikembangkan berdasarkan kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat, serta berdasarkan sumber-sumber yang dimiliki. *Keempat*, sasaran program bimbingan dan konseling adalah peserta didik, dan orang tua.

Bimbingan dan konseling komprehensif sebagai sebuah model penyelenggaraan program bimbingan dan konseling komprehensif di sekolah telah terbukti efektif. Gysbers, berdasarkan studi yang dilakukannya mengungkapkan bahwa program bimbingan dan konseling komprehensif memberikan kontribusi pada pencapaian prestasi akademik peserta didik (Brown, 2005). Studi lain yang dilakukan oleh Yusuf, Ahman dan Juntika mengenai model program bimbingan dan konseling komprehensif di Bandung menunjukkan bahwa program bimbingan dan konseling komprehensif efektif diselenggarakan pada tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, serta Sekolah Menengah Kejuruan (Furqon dan Badrujaman, 2014). Selanjutnya Gysbers dan Handerson (2006) mengemukakan terdapat empat komponen yang membentuk program bimbingan dan konseling komprehensif. Komponen tersebut meliputi: (1) pelayanan dasar, (2) perencanaan

individual, (3) layanan responsif, dan (4) dukungan sistem. Keempat komponen program tersebut digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Komponen Program Bimbingan dan Konseling (Depdikbud , 2007)

Dari gambar 2.1 Komponen Program bimbingan dan konseling di atas dijelaskan sebagai berikut ini :

(1) Layanan dasar.

Pelayanan dasar adalah salah satu komponen program pelayanan bimbingan dan konseling komprehensif, yang saat ini dikembangkan di Indonesia. Pelayanan dasar diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada seluruh konseli melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok

yang disajikan secara sistematis dalam rangka mengembangkan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan (yang dituangkan sebagai standar kompetensi kemandirian) yang diperlukan dalam pengembangan kemampuan memilih dan mengambil keputusan dalam menjalani kehidupannya.

Istilah pelayanan dasar ini lebih populer dengan sebutan kurikulum bimbingan (*guidance curriculum*). Tidak jauh berbeda dengan pelayanan dasar, Bowers & Hatch (Fathur Rahman, tanpa tahun) menyebutkan bahwa kurikulum bimbingan ini diharapkan dapat memfasilitasi peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan tertentu dalam diri peserta didik yang tepat dan sesuai dengan tahapan perkembangannya. Penggunaan instrumen asesmen perkembangan dan kegiatan tatap muka terjadwal di kelas sangat diperlukan untuk mendukung implementasi komponen ini. Asesmen kebutuhan diperlukan untuk dijadikan landasan pengembangan pengalaman terstruktur yang disebutkan.

Pelayanan dasar bertujuan untuk membantu semua konseli agar memperoleh perkembangan yang normal, memiliki mental yang sehat, dan memperoleh keterampilan dasar hidupnya, atau dengan kata lain membantu konseli agar mereka dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya. Secara rinci tujuan pelayanan ini dapat dirumuskan sebagai upaya untuk membantu konseli agar: (a) memiliki pemahaman tentang diri dan lingkungannya (pendidikan, pekerjaan, sosial budaya dan agama). (b) mampu mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi tanggung jawab atau seperangkat tingkah laku yang layak bagi penyesuaian diri dengan

lingkungannya. (c) mampu menangani atau memenuhi kebutuhan dan masalahnya, dan (d) mampu mengembangkan dirinya dalam rangka mencapai tujuan hidupnya (Depdikbud, 2007).

Untuk mencapai tujuan tersebut, fokus perilaku yang dikembangkan menyangkut aspek-aspek pribadi, sosial, belajar dan karir. Semua ini berkaitan erat dengan upaya membantu konseli dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya (sebagai standar kompetensi kemandirian). Materi pelayanan dasar dirumuskan dan dikemas atas dasar standar kompetensi kemandirian antara lain mencakup pengembangan: (a) self-esteem, (b) motivasi berprestasi, (c) keterampilan pengambilan keputusan, (d) keterampilan pemecahan masalah, (e) keterampilan hubungan antar pribadi atau berkomunikasi, (f) penyadaran keragaman budaya, dan (g) perilaku bertanggung jawab. Hal-hal yang terkait dengan perkembangan karir mencakup pengembangan: (a) fungsi agama bagi kehidupan, (b) pemantapan pilihan program studi, (c) keterampilan kerja profesional, (d) kesiapan pribadi (fisik-psikis, jasmaniah-rohaniah) dalam menghadapi pekerjaan, (e) perkembangan dunia kerja, (f) iklim kehidupan dunia kerja, (g) cara melamar pekerjaan, (h) kasus-kasus kriminalitas, (i) bahayanya perkelahian masal (tawuran), dan (j) dampak pergaulan bebas (Depdikbud, 2007).

Layanan dasar bimbingan ini dapat berisi layanan bimbingan belajar, bimbingan sosial, bimbingan pribadi dan bimbingan karir. Keempat jenis layanan bimbingan tersebut adalah :

*Pertama*, layanan bimbingan belajar merupakan jenis bimbingan yang penting diberikan kepada peserta didik. Pengalaman menunjukkan kegagalan yang dialami peserta didik tidak semuanya disebabkan oleh rendahnya kemampuan. Tetapi kegagalan itu disebabkan karena mereka kurang memiliki keterampilan belajar dan kurang memperoleh pendidikan yang tepat.

*Kedua*, layanan bimbingan sosial perlu diberikan kepada peserta didik. Hal ini disebabkan karena proses pendidikan di SMA merupakan usaha mempersiapkan peserta didik sebagai tenaga terdidik dan profesional. Dalam proses pendidikan peserta didik dihadapkan pada berbagai tuntutan. Tuntutan-tuntutan itu dapat menimbulkan masalah bagi peserta didik, baik masalah akademik maupun non akademik. Selain itu tuntutan lingkungan pergaulan peserta didik dapat juga menimbulkan masalah bagi dirinya. Dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik selalu berinteraksi dengan berbagai pihak, yaitu dengan teman sesama peserta didik, dengan guru dan staf/staf tu, dengan anggota keluarga, dan dengan sejawat. Bagi peserta didik yang memiliki ketrampilan sosial, dapat berinteraksi dengan baik dan memuaskan, tetapi bagi peserta didik yang kurang memiliki keterampilan sosial dapat menimbulkan masalah bagi diri maupun orang lain.

*Ketiga*, Layanan bimbingan pribadi sangat penting diberikan kepada peserta didik agar dapat menghadapi dan mengatasi konflik batinnya. Bimbingan pribadi, dapat berupa bimbingan untuk menjaga stabilitas emosional, mengarahkan diri, dan ketrampilan membina hubungan antar pribadi, serta teknik pemecahan masalah. Dengan

bimbingan pribadi dan sosial peserta didik dapat mengembangkan pola interaksi yang harmonis dalam berbagai setting pergaulan dan mampu menyelesaikan masalahnya.

*Keempat*, layanan bimbingan karier kepada peserta didik merupakan usaha mempersiapkan mereka menghadapi dunia kerja melalui perencanaan dan pemilihan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, minat dan cita-citanya serta membekali ketrampilan yang relevan dengan pilihan kariernya. Bimbingan karier penting diberikan keadaan peserta didik agar dapat meninggalkan dunia pendidikan dengan optimisme yang tinggi dan perasaan yang aman. Layanan bimbingan dan konseling di sekolah hendaknya ditekankan pada bimbingan belajar dan bimbingan karier.

Penelitian oleh Morris menunjukkan bahwa siswa dengan eksplorasi karir tinggi keterampilan lebih mungkin untuk membuat transisi dalam pasar tenaga kerja yang ditunjukkan perkembangan dari siswa dengan kemampuan eksplorasi karir yang lebih rendah (Mittendorff, et.al., 2012). Lebih lanjut Mittendorff (2012) menyebutkan bahwa wawancara karir antara guru dan siswa tampaknya menjadi penting, karena bimbingan individu selama percakapan ini membantu siswa untuk aktif merefleksikan proses pembelajaran mereka sendiri atau untuk membangun makna tentang diri mereka sendiri dan karir masa depan mereka.

Dengan demikian layanan bimbingan karier bagi peserta didik sangat diperlukan hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa banyak peserta didik yang mengalami kesulitan mengambil keputusan karier akibat perkembangan teknologi yang

mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia sehingga untuk memasuki lapangan kerja dibutuhkan tingkat profesional yang tinggi dan kompetisi yang ketat.

Layanan-layanan tersebut di atas ditujukan kepada seluruh peserta didik, dan dapat menggunakan strategi klasikal dan dinamika kelompok atau bimbingan kelompok. Sedangkan strategi pelaksanaan pelayanan dasar (Rahman, 2008) dapat berupa:

- (1) Bimbingan kelas; Program yang dirancang menuntut konselor untuk melakukan kontak langsung dengan para peserta didik di kelas. Secara terjadwal, konselor memberikan pelayanan bimbingan kepada peserta didik. Kegiatan bimbingan kelas ini bisa berupa diskusi kelas atau brain storming (curah pendapat).
- (2) Pelayanan orientasi; Pelayanan ini merupakan suatu kegiatan yang memungkinkan peserta didik dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah, untuk mempermudah atau memperlancar berperannya mereka di lingkungan baru tersebut. Pelayanan orientasi ini biasanya dilaksanakan pada awal program pelajaran baru. Materi pelayanan orientasi di sekolah biasanya mencakup organisasi sekolah, staf dan guru-guru, kurikulum, program bimbingan dan konseling, program ekstrakurikuler, fasilitas atau sarana prasarana, dan tata tertib sekolah.
- (3) Pelayanan informasi; Pemberian informasi tentang berbagai hal yang dipandang bermanfaat bagi peserta didik. melalui

komunikasi langsung, maupun tidak langsung (melalui media cetak maupun elektronik, seperti: buku, brosur, leaflet, majalah, dan internet).

- (4) Bimbingan kelompok; Konselor memberikan pelayanan bimbingan kepada peserta didik melalui kelompok-kelompok kecil (5 s.d. 10 orang). Bimbingan ini ditujukan untuk merespon kebutuhan dan minat para peserta didik. Topik yang didiskusikan dalam bimbingan kelompok ini, adalah masalah yang bersifat umum dan tidak rahasia, seperti: cara-cara belajar yang efektif, kiat-kiat menghadapi ujian, dan mengelola stress.
  - (5) Pelayanan pengumpulan data (aplikasi instrumentasi); merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang pribadi peserta didik, dan lingkungan peserta didik. Pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan berbagai instrumen, baik tes maupun non-tes.
- (2) Layanan responsif

Layanan responsif ialah layanan bimbingan dan konseling yang bersifat responsif, yaitu membantu peserta didik dalam mengatasi masalah-masalah yang memerlukan bantuan dengan segera. Tujuan pelayanan ini adalah membantu konseli agar dapat memenuhi kebutuhannya dan memecahkan masalah yang dialaminya atau membantu konseli yang mengalami hambatan, kegagalan dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Tujuan pelayanan ini juga sebagai upaya mengintervensi masalah-masalah atau kepedulian

pribadi konseli yang muncul segera dan dirasakan saat itu, baik yang berkenaan dengan masalah sosial-pribadi, karier, dan atau masalah pengembangan pendidikan. Layanan ini lebih bersifat preventif atau mungkin kuratif. Strategi yang digunakan adalah konseling individual, konseling kelompok, dan konsultasi (Juntika, 2005). Ketiga jenis layanan tersebut yaitu:

*Pertama*, konseling individual merupakan layanan khusus dalam bentuk hubungan langsung tatap muka antara konselor dan konseli. Konseling individual mempunyai makna spesifik dalam arti pertemuan konselor dengan klien secara individual, dimana terjadi hubungan konseling yang bernuansa rapport, dan konselor berupaya memberikan bantuan untuk mengembangkan pribadi klien serta klien dapat mengantisipasi masalah-masalah yang dihadapinya (Willis, 2004).

Tujuan konseling individual adalah mengupayakan pemecahan masalah konseli dengan kekuatan konseli sendiri. Konseling dipandang sebagai layanan yang paling utama dalam kegiatan bimbingan bahkan dapat dikatakan bahwa konseling merupakan jantung hati pelayanan bimbingan dan konseling secara menyeluruh.

Pelaksanaan layanan konseling di SMA, hendaknya ditekankan pada konseling pendidikan, perencanaan dan penetapan karier peserta didik, seperti pemilihan jurusan, metode belajar yang efektif dan efisien, bantuan remedial dalam bentuk konseling pendidikan, pengembangan aktivitas untuk perencanaan dan pengembangan karier.

Untuk mencapai keberhasilan dalam kegiatan konseling, konselor diharapkan mampu bekerjasama dengan profesi bantuan lain seperti psikiater, dan psikolog dalam meningkatkan kesehatan mental dan fisik para peserta didik melalui konseling klinik. Untuk dapat melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling tersebut, konselor sebaiknya mempelajari, menerapkan dan berpengalaman luas dalam layanan konseling dengan segenap seluk beluknya. Hal ini berarti bahwa konselor dituntut untuk selalu meningkatkan profesionalitasnya agar wawasan dan ketrampilan mereka sesuai dengan tuntutan perkembangan yang terjadi dimasyarakat.

Selain konseling individual, konseling kelompok juga perlu dilaksanakan di SMA agar pelayanan bimbingan dapat menjangkau populasi peserta didik yang banyak. Konseling kelompok merupakan upaya untuk membantu individu agar dapat menjalani perkembangannya dengan lebih lancar, upaya itu bersifat preventif, kuratif, dan promotif. Dengan kata lain konseling kelompok merupakan suatu upaya pemberian bantuan kepada individu (konseli) yang dilakukan dalam suasana kelompok, bersifat pencegahan dan penyembuhan, serta bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam berbagai spek perkembangan dan pertumbuhannya (Rusmana, 2009). Fungsi-fungsi terapi itu diciptakan dan dikembangkan dalam kelompok kecil melalui saling memperdulikan antara sesama anggota kelompok dan anggota kelompok dengan konselor. Konseling kelompok, juga berorientasi pada perkembangan individu dan berusaha untuk menemukan kekuatan-kekuatan yang bersumber pada diri sendiri. Klien-klien konseling kelompok mungkin

mengalami krisis dan konflik-konflik yang bersifat temporer dan berusaha untuk merubah perilaku menyalahkan diri (Rusmana, 2009).

Tujuan utama konseling kelompok adalah mengembangkan hubungan relationship peserta didik, membantu pencarian identitas, dan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk memeriksa atau menguji perasaan dan sikapnya bersama anggota kelompok lainnya, membantu peserta didik belajar lebih banyak dalam suasana alamiah, mengurangi sikap defensif, terbuka kesempatan mengungkapkan perasaan, serta meningkatkan kemampuan untuk santai (Prayitno, 2001). Konseling kelompok lebih mengutamakan pada pengembangan pribadi yang disediakan bagi individu yang mempunyai masalah terutama yang berkaitan dengan masalah kesulitan melakukan hubungan interpersonal atau masalah sosial lainnya. Konseli dapat belajar tentang dirinya dalam hubungannya dengan orang lain serta dapat belajar untuk memecahkan masalah berdasarkan masukan dari anggota lainnya. Kelebihan dari konseling kelompok bukan saja dalam aspek efisiensi, tetapi juga mempunyai daya tarik akibat adanya dinamika perubahan yang terjadi dalam kelompok ketika layanan itu terjadi. Interaksi antar individu dalam kelompok merupakan sesuatu yang unik dan tidak dijumpai dalam konseling individual. Terres meramalkan bahwa tahun 2004 keatas layanan bimbingan dan konseling kelompok mendominasi segenap layanan bimbingan dan konseling (Prayitno, 2001). Penelitian Danino dan Shechtman (2012) menyebutkan bahwa konseling kelompok lebih efektif membina individu dalam mengurangi stres

daripada pertimbangan orang tua memilih pengobatan praktis mengingat lebih efektif. Selain itu, konseling kelompok muncul lebih efektif dalam hal efektivitas biaya (Shertzer dan Stone, 1981).

*Kedua*, layanan konsultasi merupakan salah satu diantara misi yang diemban oleh pusat layanan bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah. Pada umumnya, konsultasi dalam rangka program bimbingan adalah proses pemberian asistensi profesional kepada guru, orang tua, pejabat struktural, dan konselor lain, dengan tujuan mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan yang menimbulkan hambatan-hambatan dalam komunikasi mereka dengan para siswa atau mengurangi keberhasilan program pendidikan sekolah (Danino & Shechtm, 2012). Konsultasi diakui sebagai bentuk layanan bimbingan yang khusus, karena disadari bahwa pelayanan langsung kepada peserta didik dalam keadaan tertentu tidak selamanya membawa hasil yang diharapkan.

Konsultasi ialah proses interaksi antara dua pribadi yaitu konsultasi yang profesional dan konsultasi yang minta bantuan konsultasi untuk memperoleh pemecahan dalam masalah kerja yang menemui beberapa kesulitan, dan daerah spesialisasi yang berwenang terhadap masalah kerja yang menemui beberapa kesulitan dan daerah spesialisasi yang berwenang terhadap masalah yang dihadapi sekarang. Selanjutnya Caplan mengemukakan dua kategori pokok model konsultasi. Pertama, konsultasi kasus yaitu konsultasi mengassesment, mendiskusikan, dan memberikan saran tentang kasus tertentu. Kedua, konsultasi administrasi yaitu bertujuan untuk menguji aplikasi dan rekomendasi yang telah dibuat untuk melihat

perubahan yang bermanfaat bagi fungsi organisasi (Shertzer dan Stone, 1981).

Fullmer dan Bernard merumuskan secara singkat delapan tujuan konsultasi yaitu (a) untuk mengembangkan dan menyempurnakan lingkungan belajar bagi peserta didik, orang tua dan administrator sekolah, (b) menyempurnakan komunikasi dan mengembangkan informasi diantara orang yang penting, (c) mengajak bersama pribadi yang memiliki peranan dan fungsi yang bermacam-macam untuk menyempurnakan lingkungan belajar, (d) memperluas layanan pendidikan bagi guru dan administrator, (e) membantu orang lain bagaimana belajar tentang perilaku, dan (g) menggerakkan organisasi mandiri (Shertzer dan Stone, 1981).

Ketiga, referral merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam konseling. Referral adalah tindakan mengalihkan individu kepada orang lain atau agen di dalam atau di luar sekolah. Mereka diperlukan karena karena dapat memberikan bantuan khusus yang tidak dapat diperoleh di sekolah atau dari konselor.

Di luar lembaga pendidikan, terdapat beberapa sumber referral yang dapat membantu konselor menangani kasus konseli tertentu. Sumber-sumber referral itu seperti lembaga-lembaga kesehatan mental, balai latihan kerja, pusat-pusat penempatan kerja, pusat rehabilitasi sosial, kelompok keagamaan, organisasi kepemudaan, pelayanan kesehatan dan lembaga pemerintah. Oleh karena itu konselor diharapkan mampu menjalin kerjasama dengan kelompok-kelompok yang ada dimasyarakat yang dapat dijadikan sebagai sumber referral.

Untuk memperoleh hasil referal yang efektif, perlu kecermatan menentukan kebutuhan dan jenis layanan yang diperlukan, pemahaman mengenai ahli yang dapat dijadikan sumber referal, keterampilan membantu peserta didik dan keluarganya untuk menjadikan layanan referal menjadi bermanfaat (Shertzer dan Stone, 1981). Ada empat praktik dalam kegiatan referal yang hendaknya tidak dilakukan oleh konselor, yaitu (a) konseli tidak diberi alternatif pilihan kepada ahli siapa yang akan direferal, (b) konselor mereferal konseli kepada pihak yang kemampuannya diragukan, (c) konselor membicarakan masalah konseli kepada calon ahli yang menerima referal tanpa persetujuan konseli, dan (d) konselor menyebutkan nama konseli kepada calon ahli tempat referal. Butir-butir tersebut, mengisyaratkan hal-hal apa yang seharusnya dilakukan oleh konselor dan hal-hal apa yang sebaiknya konselor lakukan dalam melakukan referal. Hal ini penting karena konselor merupakan jabatan profesional yang menuntut ketelitian dan kecermatan dalam melakukan layanan serta menjunjung kode etik profesi.

### (3) Perencanaan individual

Perencanaan individual ialah program Bimbingan dan Konseling untuk membantu peserta didik agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia dilingkungannya. Perencanaan individual bertujuan untuk membantu konseli agar : (a) memiliki pemahaman tentang diri dan

lingkungannya, (b) mampu merumuskan tujuan, perencanaan, atau pengelolaan terhadap perkembangan dirinya, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar maupun karier, (c) dapat melakukan kegiatan berdasarkan pemahaman, tujuan, dan rencana yang telah dirumuskannya (Depdiknas, 2004). Kegiatan ini diforkuskan untuk membantu peserta didik mengembangkan, menganalisis, dan mengevaluasi rencana dan tujuan-tujuan pendidikan, pekerjaan dan pribadi. Ada tiga jenis bimbingan untuk membantu perencanaan individual peserta didik, yaitu pengumpulan data peserta didik, bantuan individual dan penempatan. Ketiga jenis bimbingan tersebut diuraikan sebagai berikut

*Pertama*, layanan pengumpulan data ialah serangkaian kegiatan mengumpulkan data pribadi peserta didik yang relevan. Tujuan pengumpulan data adalah untuk mendapatkan pengertian yang lebih luas, lengkap dan mendalam tentang peserta didik. Dapat membantu mendapatkan pemahaman terhadap bakat, kecerdasan, dan kemampuan dalam bidang pendidikan, pribadi sosial dan pilihan karier. Data peserta didik yang dikumpulkan mencakup aspek psikologis, sifat-sifat pribadi dan data sosial.

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan alat tes dan non tes. Alat tes berupa tes bakat, tes minat, tes inteligensi, dan tes hasil belajar, sedangkan alat non tes berupa angket, wawancara, otobiografi, anekdota, skala penilaian, dan sosiometri. Konselor terlatih dapat mengadministrasi dan menginterpretasi data psikologis peserta didik, kemudian mengkomunikasikan kepada

peserta didik yang bersangkutan atau pihak lain yang memerlukan untuk kepentingan pendidikan dan bimbingan.

*Kedua*, bantuan individual adalah layanan yang diberikan oleh konselor untuk membantu peserta didik menggunakan secara berkelanjutan informasi hasil penilaian diri (appraisal) untuk perencanaan dan aktualisasi pribadi-sosial, pendidikan, karier, dan perkembangan bursa kerja dengan melibatkan peserta didik, dan orang tua peserta didik.

*Ketiga*, penempatan merupakan salah satu layanan bimbingan dan konseling yang membantu individu memilih kegiatan yang sesuai dengan kemampuan, bakat, dan cita-citanya. Kegiatan penempatan dapat dilakukan pada saat peserta didik masih dalam studi maupun setelah menyelesaikan studi. Salah satu layanan penempatan yaitu membantu peserta didik dalam proses transisi atau peralihan dari SMA ke SMA atau ketika ingin memasuki dunia kerja dengan memberi pendidikan ketrampilan atau pelatihan penunjang karier (Gysbers dan Patricia Henderson, 2006).

Dengan demikian, melalui pelayanan perencanaan individual, konseli diharapkan dapat : (a) mempersiapkan diri untuk mengikuti pendidikan lanjutan, merencanakan karier, dan mengembangkan kemampuan sosial-pribadi, yang didasarkan atas pengetahuan akan dirinya, informasi tentang pendidikan, dunia kerja, dan masyarakatnya, (b) menganalisis kekuatan dan kelemahan dirinya dalam rangka pencapaian tujuannya, (c) mengukur tingkat pencapaian tujuan dirinya, (d) mengambil keputusan yang merefleksikan perencanaan dirinya (Depdiknas, 2004).

#### (4) Dukungan sistem

Dukungan sistem merupakan komponen program bimbingan dan konseling yang bertujuan untuk meningkatkan keefektifan pelaksanaan program bimbingan dan keefektifan program pendidikan. Dukungan sistem ini merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur (misalnya teknologi informasi dan komunikasi), dan mengembangkan kemampuan profesional konselor secara berkelanjutan, yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada konseli atau memfasilitasi kelancaran perkembangan konseli. Sedangkan Gysbers dan Handerson (2006) menyebutkan bahwa dukungan sistem, ditekankan pada kerjasama antara program bimbingan dengan program pendidikan lain yang ada di SMA untuk mencapai tujuan program bimbingan dan pendidikan. Lebih lanjut dikatakan bahwa dukungan sistem membantu staf/personil bimbingan dalam melaksanakan layanan dasar bimbingan, responsif, dan perencanaan individual.

Dari pendapat di atas, dukungan sistem dapat digambarkan dua hal. Pertama, mendukung ketiga komponen program bimbingan dan konseling. Kedua, program yang mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan kelompok-kelompok bidang tertentu dari keseluruhan program pendidikan. Ada sepuluh sub komponen yang dapat menunjang pelaksanaan layanan dari program bimbingan dan konseling. Kesepuluh sub komopnen tersebut diuraikan sebagai berikut :

### **(a) Tanggungjawab pelaksanaan program bimbingan**

Dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling di SMA, melibatkan sejumlah pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung seperti pimpinan, tenaga profesional, para profesional dan guru. Pihak-pihak tersebut bekerja sesuai dengan tanggungjawab dan tingkat profesionalitasnya. Sedangkan dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling yang bertanggungjawab yaitu kepala sekolah, pengelola, tenaga profesional, para profesional, dan tenaga kesehatan (Shertzer dan Stone, 1981).

*Pertama*, kepala sekolah. Kepala sekolah, selain bertanggung jawab terhadap kelancaran kegiatan administrasi dan pengajaran, juga bertanggung jawab dalam kelancaran pelaksanaan bimbingan dan konseling. Untuk dapat membantu kepala sekolah dalam kegiatan bimbingan dan konseling dapat mengangkat koordinator bimbingan/ kepala unit layanan bimbingan dan konseling yang bertugas membantu mengarahkan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling.

Ada delapan fungsi kepala sekolah dalam pelaksanaan program bimbingan, yaitu (a) mengembangkan kompetensi konselor, (b) memperjelas peran konselor dan staf yang lain agar dapat berfungsi dalam pelaksanaan program bimbingan, (c) menyediakan sarana dan prasarana bimbingan, (d) menginventarisasi saran-saran umum dan kegiatan bimbingan di lembaga yang dipimpinnya, (e) membentuk komite bimbingan, (f) mempromosikan pelayanan bimbingan dalam

kegiatan pendidikan, (g) berkonsultasi dengan para guru dan konselor dalam hal kebutuhan dan masalah khusus, dan (h) mengadakan evaluasi secara formal dan memperbaiki program personil bimbingan (Shertzer dan Stone, 1981).

*Kedua*, pengelola. Pengelola ialah personil yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional bimbingan dan konseling. Mereka terdiri atas beberapa personil yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Tanggung jawab pengelola adalah merencanakan melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Untuk memperlancar pelaksanaan program bimbingan, perlu diangkat seorang koordinator program bimbingan/kepala unit bimbingan dan konseling. Koordinator program, diharapkan memenuhi syarat-syarat : (a) mempunyai keahlian khusus dalam bidang bimbingan dan konseling atau seorang guru yang telah memperoleh pengetahuan dan ketrampilan tentang bimbingan dan konseling, (b) tenaga tetap yang diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati tanpa gangguan tugas-tugas lain, dan (c) mampu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak baik dari dalam maupun dari luar SMA tersebut.

Ada enam tanggung jawab koordinator bimbingan dan konseling yaitu (a) memberi bantuan dalam seleksi dan penempatan konselor, (b) mensupervisi konselor, (c) mengkomunikasikan kebutuhan anggaran bagi para petugas administrasi kantor, (d) bekerjasama dengan lembaga-lembaga di masyarakat untuk tujuan referal, (e) mengkomunikasikan kepada staf bimbingan tentang

kebutuhan bimbingan dan program pengembangan, dan (f) memimpin evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling (Shertzer dan Stone, 1981).

Dengan tanggung jawab seperti itu, koordinator program bimbingan dipersyaratkan mengikuti pelatihan khusus tentang administrasi dan supervisi bimbingan serta memiliki pengalaman dalam membina staf.

*Ketiga*, tenaga profesional. Ada dua jenis tenaga profesional bimbingan dan konseling, yaitu konselor dan psikolog. Kedua jenis tenaga profesional tersebut diuraikan sebagai berikut :

Konselor merupakan tenaga inti dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Di Amerika Serikat, untuk menjadi konselor sekolah diperlukan beberapa persyaratan: (a) mempunyai surat izin sebagai keterangan sah yang mengatur sebutan dan pekerjaan profesional, (b) memiliki sertifikat sebagai keterangan tentang otoritas dan kompetensi dari pekerjaan profesional. Untuk memperoleh sertifikat sebagai konselor sekolah, guru harus memiliki pengalaman sebagai guru selama 1–3 tahun, sertifikat mengajar yang sah, dan tingkat pendidikan minimal magister (Shertzer dan Stone, 1981).

Untuk konselor di SMA diharapkan memiliki kualifikasi pendidikan doktor dan konselor yang berkualifikasi magister hanya ditugaskan untuk mengarahkan layanan dan mengadakan pelatihan serta penelitian. Adapun rasio konselor dengan peserta didik menurut Shertzer dan Stone (1981) yaitu 1 : 750 – 1000.

Secara umum dikenal dua type petugas bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah, yaitu type professional dan nonprofessional. Petugas bimbingan dan konseling professional adalah mereka yang direkrut atau diangkat atas dasar kepemilikan ijazah atau latar belakang pendidikan profesi dan melaksanakan tugas khusus sebagai guru bimbingan dan konseling (tidak mengajar). Petugas bimbingan dan konseling professional rekrut atau diangkat sesuai klasifikasi keilmuannya dan latar belakang pendidikan seperti Diploma II, III atau Sarjana Strata Satu (S1), S2, dan S3 jurusan bimbingan dan konseling. Petugas bimbingan professional mencurahkan sepenuh waktunya pada pelayanan bimbingan dan konseling (tidak mengajarkan materi pelajaran) atau disebut juga full time guidance and conseling (Tohorin, 2014).

Selanjutnya tugas konselor yang bekerja part time adalah memberikan layanan informasi kepada peserta didik dalam bidang: (a) diagnosis kesulitan belajar, (b) bahaya minuman keras dan obat-obat berbahaya, (c) pendidikan dalam lingkungan keluarga, (d) pengembangan karier, (e) pengembangan konsep diri, dan (f) ketrampilan-ketrampilan belajar. Konselor yang bekerja secara full time bertugas memberikan layanan (a) pengumpulan data, (b) konsultasi, (c) konseling, (d) referal, (e) penempatan dan follaw up, dan (g) evaluasi dan penelitian. Selanjutnya ada enam fungsi konselor yang bertugas di SMA, yaitu memberikan layanan-layanan dalam bidang (a) konseling individual dan kelompok, (b) konsultasi, (c) training dan supervisi, (d) riset dan evaluasi, (e) testing, dan (f) referal (Tohorin, 2014).

Selain konselor, Tohorin (2014) menyebutkan bahwa psikolog merupakan tenaga inti dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Psikolog adalah individu yang dilatih dengan baik dalam bidang konseling, psikologi klinis, dan psikologi pendidikan. Psikolog pendidikan memiliki tugas utama dalam bidang remediasi mental, deviasi tingkah laku yang serius, gangguan dalam belajar dan gangguan emosional. Psikolog juga bertanggung jawab mengadministrasi dan menginterpretasi hasil tes psikologis kepada orang tua peserta didik, guru dan peserta didik. Sedangkan hasil tes dapat digunakan untuk: (a) perencanaan pendidikan, (b) pemilihan dan penetapan karier, (c) penempatan, dan (d) konseling. Keempat, para profesional. Para profesional ialah tenaga pembimbing yang tidak memiliki latar belakang pendidikan bimbingan dan konseling yang diperbantukan di unit pelayanan bimbingan dan konseling atau di fakultas masing-masing. Para profesional direkrut dari guru pembina mata kuliah dan guru penasihat akademik yang telah mengikuti pelatihan dasar-dasar bimbingan dan konseling. Tugas para profesional adalah membantu tenaga profesional melaksanakan kegiatan program bimbingan dan konseling, seperti memimpin rapat, mengobservasi dan mencatat perilaku, referal, penempatan dan tindak lanjut, serta perencanaan program.

*Kelima*, tenaga kesehatan. Ruang lingkup bimbingan dan konseling sangat luas dan memiliki layanan yang beragam sehingga dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling perlu dibina kerjasama dengan profesi bantuan lain. Oleh karena itu, konselor pendidikan diharapkan mampu menjalin kerjasama dengan relasi dari

profesi bantuan yang lain untuk menangani kasus-kasus tertentu yang tidak dapat diselesaikan oleh konselor, seperti psikolog, psikiater, dan tenaga kesehatan.

Para tenaga kesehatan, seperti dokter umum, perawat, dokter gigi, psikiater seringkali bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk menyelesaikan kasus tertentu. Mereka menangani peserta didik yang menghadapi masalah-masalah kesehatan, seperti gangguan penglihatan, pendengaran kelainan-kelainan dalam perkembangan dan gangguan kesehatan lainnya.

#### **(b) Fasilitas-Fasilitas Bimbingan**

Salah satu perlengkapan dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling adalah tersedianya fasilitas bimbingan, khususnya dalam mengakomodasikan dan memperlancar pelaksanaan pemberian layanan bimbingan dan konseling. Agar layanan dasar bimbingan dan konseling, responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem berfungsi efektif diperlukan cara baru dalam mengatur fasilitas-fasilitas program Bimbingan dan Konseling (Nurihsan, 2006).

Sarana dan prasarana yang diperlukan antara lain sebagai berikut:

**(1) Sarana**, meliputi: (a) Alat pengumpul data, seperti format-format, pedoman observasi, pedoman wawancara, angket, catatan harian, daftar nilai prestasi belajar, dan kartu konsultasi. (b) Alat penyimpanan data, seperti kartu pribadi, buku pribadi, map, dan sebagainya. (c) Perlengkapan teknis, seperti buku pedoman, buku

informasi, paket bimbingan, blongko surat, alat-alat tulis, dan sebagainya. (2) *Prasarana*, meliputi: (a) Ruangan bimbingan dan konseling, seperti ruang tamu, ruang konsultasi, ruang diskusi, ruang dokumentasi dan seabainya. (b) Anggaran biaya untuk menunjang kegiatan layanan, seperti anggaran untuk surat manyurat, transportasi, penataran, pembelian alat-alat, dan sebagainya (Sukardi, 2000).

Fasilitas dan pembiayaan merupakan aspek yang sangat penting yang harus diperhatikan dalam suatu program bimbingan dan konseling. Adapun aspek pembiayaan memerlukan perhatian yang lebih serius karena dalam kenyataannya aspek tersebut merupakan salah satu faktor penghambat proses pelaksanaan bimbingan dan konseling (Nurihsan, 2006).

Sedangkan fasilitas teknis lainnya untuk menunjang terlaksananya program bimbingan yaitu berupa perlengkapan administrasi, seperti instrumen tes psikologis, pedoman observasi, angket, pedoman wawancara, daftar cek masalah, alat perekam data, alat tulis menulis, blanko surat-surat laporan, buku agenda, arsip surat, buku catatan harian, papan tulis atau papan pengumuman dan buku tamu. Pengaturan dan penataan fasilitas bimbingan hendaknya disesuaikan dengan fungsinya agar dapat menunjang efektifitas dan efisiensi kerja, sehingga dapat memberikan kenyamanan, keindahan, ketenangan agar orang dapat dengan betah dan merasa nyaman masuk pada ruangan tersebut. Lokasi pelayanan bimbingan dan konseling hendaknya dapat dijangkau dengan mudah oleh peserta didik dan tetap menjaga kerahasiaan klien (Nurihsan, 2006).

**(c) Kebijakan.**

Pelaksanaan program bimbingan dan konseling dapat berjalan dengan lancar, dibutuhkan situasi kampus yang kondusif. Situasi seperti itu dapat tercipta dengan adanya kebijakan kepala sekolah SMA yang dapat dibagi dalam dua bidang, yaitu bidang pengelolaan dan bidang pengelolaan. Pertama, bidang pengelolaan, yang meliputi pembagian waktu kerja dan deskripsi tugas yang jelas bagi masing-masing staf bimbingan, dan fasilitas kerja yang representatif. Kedua, bidang personil yang memungkinkan pembinaan dan peningkatan kemampuan dan ketrampilan tenaga bimbingan yang ada, misalnya pemberian kesempatan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah bimbingan. Kebijakan dalam tata kerja yang demikian ini sangat perlu untuk mengatur dan menunjang kegiatan bimbingan dan konseling agar selaras dengan kegiatan pendidikan dan pengajaran.

**(d) Anggaran**

Untuk kelancaran program bimbingan perlu disediakan anggaran biaya yang cukup memadai untuk pembiayaan antara lain biaya personil, pengadaan dan pengembangan alat-alat teknis, biaya operasional dan untuk penelitian. Perencanaan anggaran merupakan komponen penting dari manajemen bimbingan dan konseling. Perlu dirancang dengan cermat berapa anggaran yang diperlukan untuk mendukung implementasi program. Anggaran ini harus masuk ke dalam Anggaran dan Belanja Sekolah, sehingga perlu disesuaikan dengan jenis dan besarnya volume kegiatan.

Adapun komponen anggaran meliputi: (a) Anggaran untuk semua aktivitas yang tercantum pada program bimbingan dan konseling. (b) Anggaran untuk aktivitas pendukung (seperti untuk asesmen kebutuhan, kunjungan rumah, pengadaan pustaka terapi/buku pendukung, mengikuti diklat/seminar/workshop atau kegiatan profesi bimbingan dan konseling, studi lanjut, kegiatan musyawarah guru bimbingan dan konseling, pengadaan instrumen bimbingan dan konseling, dan lainnya yang relevan untuk operasional layanan bimbingan dan konseling. (c) Anggaran untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan ruang atau pemberian layanan bimbingan dan konseling (seperti membenahan ruangan, pengadaan buku-buku untuk konseling pustaka, penyiapan perangkat konseling kelompok) (Depdikbud, 2014).

Dari uraian di atas, paling tidak anggaran tersebut bisa diarahkan untuk pembiayaan (1) pelatihan tenaga pembimbing, (2) kegiatan bimbingan dan konseling, (3) pengadaan perlengkapan, (4) pengembangan profesional, (5) kegiatan administrasi, dan (6) sosialisasi, penilaian dan pengembangan program.

#### **(e) Sosialisasi Program**

Pelaksanaan program bimbingan dan konseling dapat berhasil apabila mendapat dukungan dari semua pihak yang ada dilingkungan SMA, sehingga perlu dilakukan sosialisasi program bimbingan kepada peserta didik, guru, wali kelas, staf tu, wakil kepala sekolah dan kepala sekolah, serta semua pihak yang terkait langsung dengan pemberian layanan kepada peserta didik. Tujuan sosialisasi program

adalah agar dapat memahami arti, tujuan dan sasaran program bimbingan dan konseling. Dengan pemahaman yang baik diharapkan semua pihak terkait dapat berpartisipasi dalam program bimbingan dan konseling sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing.

**(f) Pengembangan Profesional**

Secara umum tujuan pengembangan profesional adalah untuk meningkatkan kompetensi staf bimbingan dan staf lain dalam pelayanan bimbingan dan konseling dan terhadap pelayanan kepada peserta didik. Secara khusus pengembangan profesional bertujuan membantu guru untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan mereka dalam kegiatan bimbingan dan pelayanan kepada peserta didik, dan memberikan kesempatan kepada staf untuk belajar dan berkembang. Untuk meningkatkan profesionalitas tenaga bimbingan dan staf lainnya, dapat dilakukan berbagai upaya, seperti ikut berpartisipasi secara aktif dalam setiap kegiatan yang dapat meningkatkan profesionalitasnya.

Hal ini sejalan dengan pihak Depdiknas R.I. yang menyarankan agar konselor secara terus menerus berusaha untuk "meng-update" pengetahuan dan keterampilannya melalui (1) in-service training, (2) aktif dalam organisasi profesi, (3) aktif dalam kegiatan-kegiatan ilmiah, seperti workshop (lokakarya), atau (4) melanjutkan studi ke program yang lebih tinggi (Pascasarjana). Peningkatan profesionalitas tenaga bimbingan selain mengikuti studi lanjut pada jenjang yang lebih tinggi, dapat pula dilakukan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah bimbingan, melakukan pertemuan-pertemuan rutin diantara sesama tenaga pembimbing, seperti

psikolog, psikiater dan guru pembimbing untuk membicarakan pengalaman yang mereka alami dalam melaksanakan tugas bimbingan kepada peserta didiknya (Depdikbud, 2007).

**(g) Penggunaan tes psikologis**

Tes psikologis dipergunakan untuk pengumpulan data yang bersifat potensial seperti intelegensi, bakat dan minat, kepribadian, dan sikap. Untuk melaksanakannya dapat dipergunakan tes psikologis yang sudah tersedia. Tes psikologis tidak dapat diselenggarakan oleh sembarangan orang, tetapi harus oleh orang yang berwenang untuk itu. Tes-tes psikologis merupakan tes yang sudah distandarisasikan.

Penggunaan tes psikologis ini sangat berguna untuk keperluan analisis individual. Tes intelegensi dapat memberikan informasi yang berarti untuk meramalkan prestasi peserta didik. Tes bakat dan minat dapat mengukur bakat, ketrampilan dan sifat-sifat lain yang dapat meramalkan keberhasilan dalam pekerjaan dan pelajaran. Tes kepribadian dapat mengukur penyesuaian pribadi, sifat hubungan sosial, dan aspek motivasi peserta didik.

Menurut Munandir (1996) informasi yang dibutuhkan konseli antara lain bimbingan dan konseling vokasional. Salah satu penggunaan tes dalam bimbingan vokasional adalah untuk maksud memajukan pemahaman diri klien, klien memahami dirinya, baik kekuatan dan kelemahannya, kelebihan maupun kekurangannya. Tes sekedar alat bantu untuk memahami diri, bahwa data tentang diri klien yang paling andal adalah apa pandangan klien tentang dirinya

dan bagaimana klien memandang dirinya sendiri. Hanya dengan cara begitu tes bermanfaat bagi membantu klien memahami dirinya dan dalam mencari pemecahan masalahnya. Dari pendapat tersebut, dalam hubungannya dengan perencanaan karier klien, tentunya tes psikologis dapat membantu individu memperoleh kesuksesan karir, sehingga tes data memberikan jawaban tentang jabatan-jabatan yang tersedia, identifikasi alternatif jabatan, seleksi jabatan, perkembangan persiapan jabatan dan penempatan (*placement*).

Sedangkan Anastasia dan Urbina (2007) menyatakan bahwa testing digunakan dalam bimbingan pendidikan dan jabatan seta dipakai untuk merencanakan segala aspek dalam kehidupan individu. Perkembangan individu ini menekankan pada penggunaan tes untuk meningkatkan pemahaman diri dan pengembangan personal. Dalam kerangka kerja ini, skor tes menjadi bagian informasi yang diberikan pada individu dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan demikian diharapkan hasil dari tes psikologis ini bertujuan untuk memahami diri peserta didik secara lebih luas dan mendalam, juga digunakan untuk merencanakan studi dan karier, serta rencana kehidupan lainnya dalam masyarakat.

#### **(h) Konfrensi kasus**

Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling terhadap konseli atau peserta didik guru penasehat akademik dan konselor dapat melaksanakan berbagai cara, apabila permasalahan yang dihadapi memerlukan layanan terpadu, antara lain melalui konferensi kasus. Konferensi kasus yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan

konseling untuk membahas permasalahan yang dialami oleh peserta didik (klien) dalam suatu forum pertemuan yang dihadiri oleh berbagai pihak yang diharapkan dapat memberikan bahan, keterangan, kemudahan dan komitmen bagi erentaskannya permasalahan tersebut. Pertemuan dalam konferensi kasus bersifat terbatas dan tertutup (Prayitno, 2001).

Dalam konferensi kasus secara spesifik dibahas permasalahan yang dialami oleh peserta didik tertentu dalam suatu forum diskusi yang melibatkan berbagai pihak terkait, seperti koordinator bimbingan, guru penasehat akademik, konselor, guru mata kuliah, orang tua peserta didik, dan tenaga ahli lainnya.

Sedangkan tujuan dari konferensi kasus menurut Prayitno dan Amti (2015) yaitu untuk: (1) diperolehnya gambaran yang lebih jelas, mendalam dan menyeluruh tentang permasalahan siswa. Gambaran yang diperoleh itu lengkap dengan saling sangkut paut data atau keterangan yang satu dengan yang lain. (2) terkomunikasinya sejumlah aspek permasalahan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan yang bersangkutan, sehingga penanganan masalah itu menjadi lebih mudah dan tuntas. (3) terkoordinasinya penanganan masalah yang dimaksud sehingga upaya penanganan itu lebih efektif dan efisien.

#### **(i) Evaluasi Pelaksanaan Program**

Evaluasi program yaitu suatu usaha menilai efisiensi dan efektivitas dari layanan bimbingan dan konseling demi untuk meningkatkan mutu program bimbingan dan konseling. Evaluasi

pelaksanaan program bimbingan dan konseling sangat penting dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai sebagai bahan perbaikan, peninjauan ulang dan penyempurnaan program bimbingan maupun cara pelaksanaannya.

Penilaian itu pada dasarnya adalah proses menemukan nilai guna, dan penilaian suatu program bimbingan merupakan usaha untuk menentukan nilai dan kegunaan program itu. Sebuah program dikatakan berhasil dan sukses apabila memenuhi kriteria keberhasilan yang ditetapkan.

Adapun aspek-aspek yang perlu dievaluasi dalam program bimbingan dan konseling, diantaranya: (a) Kesesuaian antara program dengan pelaksanaan. (b) Keterlaksanaan program. (c) Hambatan-hambatan yang dijumpai. (d) Dampak layanan bimbingan terhadap kegiatan belajar mengajar. (e) Respon siswa, personil sekolah, orangtua dan masyarakat terhadap layanan bimbingan. (f) Perubahan kemajuan siswa dilihat dari pencapaian tujuan layanan bimbingan, pencapaian tugas-tugas perkembangan, dan hasil belajar dan keberhasilan siswa setelah menamatkan sekolah baik pada studi lanjutan ataupun pada kehidupannya di masyarakat (Yusuf, 2009).

Evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling juga merupakan suatu proses pengumpulan informasi untuk mengetahui dan menentukan efektivitas dari program bimbingan dan konseling dalam membantu para siswa untuk mengetahui serta memahami kebutuhan-kebutuhan dan kelemahannya (Nurihsan, 2006).

Disamping itu evaluasi program bimbingan dan konseling merupakan sebuah proses penilaian terhadap keberhasilan program bimbingan dan konseling yang dilakukan melalui pengumpulan data, pengolahan data serta analisis data yang akan dijadikan dasar untuk membuat keputusan.

Dari penjelasan di atas, salah satu elemen penting dalam penilaian adalah pengambilan keputusan, karena dipandang perlu untuk dilakukan terhadap penilaian itu, hal ini dilakukan untuk melayani pola pengambilan keputusan yang diambil, yang pada suatu ketika menghadapi lebih dari satu alternatif keputusan. Oleh karena itu informasi sangat berguna untuk menentukan satu keputusan diantara berbagai alternatif yang mungkin diambil lebih baik untuk perbaikan program bimbingan dan konseling selanjutnya.

#### **(j) Pertanggungjawaban**

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program bimbingan dan konseling, pengelola unit bimbingan dan konseling bersama staf membuat laporan secara periodik kepada kepala sekolah. Pelaksanaanya kegiatan program bimbingan dan konseling tersebut dilaporkan kepada kepala sekolah.

### **G. Mekanisme Implementasi Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah**

Pelaksanaan program merupakan implementasi program sesuai metode, waktu, pelaksana, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan program yang telah ditentukan. Pelaksanaan

ini juga didahului pengorganisasian seluruh komponen yang diperlukan dalam implementasi program. Oleh karena itu perlu ditata, disiapkan, dan disenergikan komponen-komponen implementasi program.

Program bimbingan dan konseling merupakan suatu bentuk kegiatan yang cukup luas bidang gerakannya, untuk itu diperlukan mekanisme kerja yang baik. Mengorganisasikan pelaksana, sarana-prasarana, metode, waktu, perlu dilakukan sehingga seluruh aspek itu siap digerakkan menuju pelaksanaan program secara efektif dan efisien. Kesiapan seluruh komponen tersebut merupakan syarat kelancaran implementasi masing-masing layanan maupun kegiatan pendukung bimbingan dan konseling yang diprogramkan.

Untuk melaksanakan program bimbingan dan konseling di sekolah, konselor beserta personel lainnya perlu memperhatikan komponen kegiatan (Kosasih & Soejipto, 2009) sebagai berikut:

a. Komponen Pemrosesan Data

Kegiatan layanan bimbingan dan konseling meliputi beberapa aspek, yaitu: (1) pengumpulan data, (2) pengklasifikasian, (3) pendokumentasian, (4) penyimpanan, (5) penyediaan data yang diperlukan, dan (6) penafsiran. Data yang perlu diproses adalah data tentang keadaan siswa di sekolah yang meliputi: (a) kemampuan skolastik (bakat khusus, hasil belajar, kepribadian, intelegensi, riwayat pendidikan), (b) cita-cita, (c) hubungan social, (d) minat terhadap mata pelajaran, (e) kebiasaan belajar, (f) kesehatan fisik, (g) pekerjaan orang tua, dan (h) keadaan keluarga.

b. Komponen Kegiatan Pemberian Informasi

Komponen ini terdiri dari: (1) pemberian orientasi kehidupan sekolah kepada siswa baru. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperkenalkan sekolah dan lingkungannya, agar para siswa tidak mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri di sekolah, (2) pemberian informasi tentang program studi kepada siswa yang dipandang memerlukannya. Hal ini dimaksudkan agar para siswa tidak salah pilih dalam menentukan program studi yang ada. Pilihan ini hendaknya sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Kegiatan ini sangat diperlukan bagi siswa di tingkat SMTA, (3) pemberian informasi jabatan kepada siswa yang diperkirakan tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan (4) pemberian informasi pendidikan lanjutan.

c. Komponen Kegiatan Konseling

Konseling dilakukan terhadap siswa yang mengalami masalah yang sifatnya lebih pribadi. Jika ada masalah yang tidak dapat diatasi oleh petugas yang bersangkutan, perlu dialihtanggankan kepada pihak lain yang lebih ahli.

d. Komponen Pelaksana

Pelaksana jenis kegiatan tersebut adalah konselor sekolah, konselor bersama guru bidang studi dan juga kepala sekolah sesuai dengan fungsi dan peranannya masing-masing.

e. Komponen Metode/Alat

Alat yang dipakai untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan itu dapat berupa: tes psikologis, tes hasil belajar,

dokumen, angket, kartu pribadi, brosur/poster, konseling dan sebagainya. Ini sesuai dengan jenis data atau kegiatan yang akan dikumpulkan/dilakukan.

f. **Komponen Waktu Kegiatan**

Jadwal kegiatan layanan dapat dilakukan pada awal tahun ajaran, secara periodik, bilamana perlu (insidental), akhir masa sekolah, awal semester atau waktu lain tergantung dari jenis/macam kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

g. **Komponen Sumber Data.**

Data yang diperlukan dapat diperoleh dari siswa yang bersangkutan; guru, orang tua, teman-teman siswa, sekolah, masyarakat ataupun instansi. Hal ini tergantung atas jenis data yang diperlukan.

## **H. Gambaran Pelaksanaan Program Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah/Madrasah.**

Program bimbingan dan konseling merupakan perangkat yang harus disusun guru bimbingan dan konseling atau konselor sebelum melaksanakan pelayanan di sekolah, dengan tujuan agar guru bimbingan dan konseling dalam melaksanakan kegiatan layanannya dapat terarah dan berjalan dengan baik sehingga dapat membantu suksesnya kegiatan belajar mengajar di Sekolah atau Madrasah.

Secara umum pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah didasarkan pada ketuntasan dari tugas-tugas perkembangan untuk jenjang SLTA, yang antara lain :

- a. Mencapai kematangan dalam beriman dan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Mencapai kematangan dalam hubungan teman sebaya, serta kematangan dalam peranannya sebagai pria atau wanita.
- c. Mencapai kematangan pertumbuhan fisik yang sehat.
- d. Mengembangkan penguasaan ilmu, teknologi dan seni sesuai dengan program kurikulum dan persiapan karir atau melanjutkan pendidikan tinggi, serta berperan dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas.
- e. Mencapai kematangan dalam pilihan karir.
- f. Mencapai kematangan gambaran dan sikap tentang kehidupan mandiri secara emosional, sosial, intelektual dan ekonomi.
- g. Mencapai kematangan gambaran dan sikap tentang kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- h. Mengembangkan kemampuan komunikasi sosial dan intelektual, serta apresiasi seni.
- i. Mencapai kematangan dalam sistem etika dan nilai.

Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah/madrasah juga mengacu pada kultur yang berlaku di sekolah/madrasah. Kultur tersebut tertuang dalam visi dan misi sekolah. Untuk itu, semua program bimbingan dan konseling tidak lepas dari visi dan misi sekolah/madrasah yang sudah disusun dan disepakati oleh seluruh komponen sekolah. Program utama dari pelayanan bimbingan dan

konseling di sekolah/madrasah terutama pada jenjang SLTA lebih kearah membangun kemandirian dalam memecahkan masalah yang dihadapi serta memantapkan pilihannya dalam melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.

Disamping itu berdasarkan pada salah satu tujuan sekolah yaitu ingin membangun insan yang berakhlak mulia, maka seluruh kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling juga mengacu pada tujuan tersebut. Untuk itu dalam kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling selalu didasarkan pada nilai-nilai agama yang dianut oleh para siswa.

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai tersebut, program layanan bimbingan dan konseling dapat berfungsi sebagai pedoman bagi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, yaitu: (1) Fungsi pemahaman, (2) Fungsi fasilitasi, (3) Fungsi penyesuaian, (4) Fungsi penyaluran, (5) Fungsi adaptasi, ( 6) Fungsi pencegahan, (7) Fungsi perbaikan, (8) Fungsi penyembuhan, (9) Fungsi pemeliharaan, dan (10) Fungsi pengembangan.

Fungsi-fungsi tersebut dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan berbagai jenis layanan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling sesuai dengan fungsinya . Setiap layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan harus secara langsung mengacu kepada satu atau lebih fungsi-fungsi layanan , agar hasil yang dicapai dapat diidentifikasi dan dievaluasi dengan baik.

Berdasarkan pada fungsi tersebut, upaya bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah dapat berupaya untuk memberikan layanan kepada peserta didik untuk dapat mengenal dan

menerima dirinya, lingkungannya secara positif dan dinamis, serta mampu mengambil keputusan, mengarahkan dan mewujudkan diri sendiri secara efektif dan produktif sesuai dengan peranan yang diinginkannya dimasa depan. Karena itu secara lebih khusus bidang bimbingan dan konseling yang diberikan meliputi: bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karier, dengan prinsip-prinsip bimbingan yang diberikan kepada peserta didik harus; (a) berpusat pada diri sendiri, (b) dilakukan secara continue dan terencana, (c) mencakup semua peserta didik, (d) berfungsi membantu peserta agar mampu menolong dirinya sendiri, (e) harus berdasarkan data dan informasi yang terpercaya, (f) dilaksanakan dengan menjamin kerahasiaan, dan (g) sesuai dengan bakat, minat, kemampuan dan cita-cita siswa.

Sedangkan pola pembinaan peserta didik, dapat dilaksanakan oleh semua unsur pendidikan di sekolah, orang tua, masyarakat dan pemerintah. Sedangkan pola tindakan terhadap peserta didik bermasalah di sekolah atau madrasah adalah merupakan upaya tindakan secara berkesinambungan mulai dari guru piket, wali kelas serta petugas lainnya. Tindakan tersebut diinformasikan kepada wali kelas yang bersangkutan sebagai catatan bagi tindak lanjut layanan bimbingan. Sementara itu guru pembimbing atau konselor dapat berperan dalam mengetahui sebab-sebab yang melatar belakangi sikap dan tindakan tersebut. Dalam hal ini guru pembimbing bertugas membantu menangani permasalahan yang dialami siswa tersebut, melalui serangkaian wawancara atas sejumlah informasi dari sumber data setelah wali kelas memberi rekomendasi.

Dengan demikian keberadaan bimbingan dan konseling di sekolah/madrasah sangat penting dan diperlukan, terutama dalam menangani masalah-masalah atau hal-hal diluar bidang garapan pengajaran, tetapi secara tidak langsung menunjang tercapainya tujuan pendidikan dan pengajaran disekolah itu. Sehingga seluruh personil sekolah dapat membantu peserta didik dalam usaha mencapai perkembangannya secara optimal, karena itu dalam pelaksanaannya program layanan bimbingan dan konseling seluruh personil sekolah terlibat. Personil pelaksana pelayanan bimbingan dan konseling adalah segenap unsur yang terkait di dalam organigram pelayanan bimbingan, dengan koordinator guru pembimbing atau konselor sebagai pelaksana utama

Hal tersebut didukung oleh berbagai macam faktor seperti dikemukakan Partowisasto (Kosasih & Soejipto, 2009) yaitu: (a) Sekolah merupakan lingkungan hidup kedua setelah rumah, (b) Para siswa yang usianya relatif masih muda sangat membutuhkan bimbingan. Disamping itu Lundquist dan Chamel (Kosasih & Soejipto, 2009) menyatakan bahwa kehadiran konselor dapat meringankan tugas guru. Konselor dan guru merupakan suatu tim yang sangat penting dalam kegiatan pendidikan. Keduanya dapat saling menunjang terciptanya proses pembelajaran secara lebih efektif. Oleh karena itu kegiatan bimbingan dan konseling tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan sekolah.

## **I. Kriteria Keberhasilan Pelaksanaan Program Pelayanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah**

Berkaitan dengan bimbingan dan konseling, maka yang dimaksud dengan evaluasi program Bimbingan dan Konseling adalah segala upaya, tindakan atau proses untuk menentukan derajat kualitas kemajuan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program Bimbingan dan Konseling di sekolah dengan mengacu pada kriteria atau patokan-patokan tertentu sesuai dengan program Bimbingan dan Konseling (Nurihsan, 2005).

Cara manapun yang ditempuh, evaluasi atas usaha pemecahan masalah seyogyanya tetap dilakukan untuk melihat seberapa pengaruh tindakan bantuan (treatment) yang telah diberikan terhadap pemecahan masalah yang dihadapi peserta didik. Berkenaan dengan evaluasi Bimbingan dan Konseling, Depdiknas (2004) telah memberikan kriteria-kriteria keberhasilan layanan Bimbingan dan Konseling, yaitu:

- 1) Berkembangnya pemahaman baru yang diperoleh peserta didik berkaitan dengan masalah yang dibahas;
- 2) Perasaan positif sebagai dampak dari proses dan materi yang dibawakan melalui layanan, dan
- 3) Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh peserta didik sesudah pelaksanaan layanan dalam rangka mewujudkan upaya lebih lanjut pengentasan masalah yang dialaminya.

Robinson (Makmun, 2004) mengemukakan beberapa kriteria dari keberhasilan dan efektivitas layanan yang telah diberikan, yang terbagi ke dalam kriteria yaitu kriteria keberhasilan yang tampak segera dan kriteria jangka panjang. Kriteria keberhasilan tampak segera, diantaranya apabila:

- 1) Peserta didik (klien) telah menyadari (*to be aware of*) atas adanya masalah yang dihadapi.
- 2) Peserta didik (klien) telah memahami (*self insight*) permasalahan yang dihadapi.
- 3) Peserta didik (klien) telah mulai menunjukkan kesediaan untuk menerima kenyataan diri dan masalahnya secara obyektif (*self acceptance*).
- 4) Peserta didik (klien) telah menurun ketegangan emosinya (*emotion stress release*).
- 5) Peserta didik (klien) telah menurun penentangan terhadap lingkungannya.
- 6) Peserta didik (klien) telah mulai menunjukkan sikap keterbukaannya serta mau memahami dan menerima kenyataan lingkungannya secara obyektif.
- 7) Peserta didik (klien) mulai menunjukkan kemampuannya dalam mempertimbangkan, mengadakan pilihan dan mengambil keputusan secara sehat dan rasional.
- 8) Peserta didik (klien) telah menunjukkan kemampuan melakukan usaha-usaha perbaikan dan penyesuaian diri terhadap lingkungannya, sesuai dengan dasar pertimbangan dan keputusan yang telah diambilnya.

Kemudian Partowisastro (Daniaty, 2012) menyebutkan kriteria keberhasilan dalam pelayanan bimbingan kepada murid adalah:

- 1) Menerima diri sendiri, baik mengenai kekuatan-kekuatannya maupun kelemahan-kelemahannya, sehingga dapat membuat rencana untuk menentukan cita-cita dan membuat keputusan-keputusannya yang realistik.
- 2) Memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai dunia sekitarnya, sehingga dapat memperoleh tingkat sosial yang selaras dalam pergaulan dan kehidupan di masyarakat.
- 3) Dapat memahami dan memecahkan masalahnya sendiri.
- 4) Dapat memilih secara tepat dan menyelesaikan program studi dan berhasil sesuai dengan tingkat kemampuannya.
- 5) Dapat memilih pendidikan lanjutan secara tepat sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
- 6) Dapat memilih rencana dan lapangan kerja/jabatan yang tepat sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
- 7) Memperoleh bantuan khusus dalam mengatasi kesulitan belajar, sehingga dapat mengembangkan dan meningkatkan kepribadiannya secara menyeluruh.
- 8) Memperoleh bantuan dan pelayanan dari orang-orang atau badan-badan lain diluar sekolah, untuk memecahkan masalahnya yang tidak mampu dipecahkannya dengan pelayanan langsung dari sekolah.

Sedangkan Suherman (2013) menyatakan bahwa pelaksanaan program Bimbingan dan Konseling dapat dikatakan berhasil apabila para siswa mampu menunjukkan perilakunya sebagai berikut:

- 1) Mengetahui dan memahami program Bimbingan dan Konseling yang dilaksanakan sekolahnya;
- 2) Mengetahui dan memahami kemampuan dan kelemahan dirinya;
- 3) Memahami jenjang pendidikan dan prospek pendidikan yang sedang ditempuhnya;
- 4) Meningkatkan dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap serta nilai kehidupannya;
- 5) Mampu merencanakan masa depannya, baik yang berhubungan dengan kelanjutan pendidikan maupun dunia kerja yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- 6) Memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang dihadapinya.

Dari beberapa pendapat di atas, disimpulkan bahwa kriteria untuk keberhasilan pelaksanaan program pelayanan Bimbingan dan Konseling di sekolah, apabila adanya perkembangan perubahan pada peserta didik dengan menunjukkan perilaku sebagai berikut:

- 1) Mengetahui program BK yang dilaksanakan sekolahnya.
- 2) Mengetahui kemampuan dan kelemahan dirinya.
- 3) Memahami jenjang pendidikan dan prospek pendidikan yang sedang ditempuhnya.
- 4) Meningkatnya prestasi akademik.
- 5) Mampu merencanakan masa depannya, baik yang berhubungan dengan kelanjutan pendidikan maupun dunia kerja yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.

- 6) Menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang dihadapinya.

## **BAB 3**

### **KONSEP EVALUASI PROGRAM**

#### **A. Pengertian Evaluasi Program.**

Dalam kajian keilmuan yang telah berkembang saat ini menjadi disiplin ilmu sendiri yaitu evaluasi sehingga dianggap istilah yang baru. Pada kenyataannya bidang kajian evaluasi ternyata telah banyak memberikan manfaat dan kontribusinya didalam memberikan informasi maupun data, khususnya mengenai pelaksanaan suatu program tertentu yang pada gilirannya akan menghasilkan rekomendasi dan digunakan oleh pelaksana program tersebut untuk menentukan keputusan, apakah program tersebut dihentikan, dilanjutkan, atau ditingkatkan lebih baik lagi. Saat ini, evaluasi telah berkembang menjadi tren baru sebagai disiplin ilmu baru dan sering digunakan oleh hampir semua bidang dalam suatu program tertentu seperti: evaluasi program pelatihan, evaluasi program pembelajaran atau pendidikan, maupun evaluasi kinerja para aparatur sipil negara pada instansi atau lembaga tertentu.

Pengertian evaluasi program dapat ditafsirkan berbeda-beda sesuai dengan pemahaman oleh para pakar evaluasi. Evaluasi dapat didefinisikan sebagai penilaian pencapaian tujuan melalui pengumpulan dan analisis data yang berguna untuk membuat keputusan dari suatu program. Wood menyebutkan model evaluasi berguna dalam membimbing pengelolaan, pengumpulan data dan analisis (Lukum, 2015). Sudjana mengemukakan bahwa evaluasi program didefinisikan sebagai kegiatan sistematis untuk

mengumpulkan, mengola, menganalisis dan menyajikan data sebagai masukan untuk pengambilan keputusan (Sudjana, 2008). Dari pengertian tersebut bahwa evaluasi program program mengandung tiga unsur penting yaitu kegiatan sistematis, data pengambilan keputusan. Kegiatan sistematis dimaksudkan bahwa evaluasi program dilakukan melalui prosedur yang berdasarkan ketentuan atau qaidah penelitian ilmiah.

Sedangkan data yang dikumpulkan sebagai fokus dari evaluasi program yang diperoleh melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian dengan menggunakan pendekatan, metode, model dan teknik ilmiah. Pengambilan keputusan mengandung arti bilamana data yang disajikan mengandung makna yang dapat menjadi masukan berharga pada proses pengambilan keputusan sebagai alternatif terhadap program. Evaluasi program merupakan evaluasi yang menilai aktivitas di bidang pendidikan dengan menyediakan data yang berkelanjutan. Dengan demikian evaluasi program merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk memperoleh data sehingga berguna dalam pengambilan keputusan.

Disamping itu evaluasi program juga sebagai upaya untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan suatu kebijakan secara cermat dengan cara mengetahui efektivitas masing-masing komponennya (Arikunto dan Abdul Jabar, 2007). Dari pengetahuan tersebut suatu program bila sudah diketahui hasil kegiatannya sebagai suatu harapan yang diinginkan dari program tersebut jika hasilnya tidak memuaskan, maka dapat dicari dimana letak komponen yang kurang

atau tidak berjalan dengan semestinya dalam mendukung pencapaian tujuan program.

Stufflebearn dan Shinkfield (2007) menyebutkan bahwa “*a program evaluation theory is a coherent set of conceptual, hypothetical, pragmatic, and ethical principles forming a general framework to guide the study and practice of program evaluation.*” Dari konsep tersebut, kemudian Suherman (2013) menjelaskan bahwa evaluasi program merupakan suatu proses untuk mencoba menyesuaikan data obyektif dari awal hingga akhir pelaksanaan program sebagai dasar penilaian terhadap tujuan program yang dilakukan secara terencana, sistematis dan terarah.

Dari pendapat tersebut, evaluasi program dilakukan sebagai upaya untuk mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menganalisis fakta, data dan informasi untuk mengumpulkan harga nilai evaluasi yang merupakan bagian terpenting dalam setiap kegiatan ataupun program, sehingga tidak ada satu kegiatan pun yang dapat terlaksana dengan baik tanpa evaluasi.

Kemudian pendapat Mardapi (2012) menyebutkan bahwa “evaluasi program adalah metode untuk mengetahui dan menilai efektivitas suatu program dengan membandingkan kriteria yang telah ditentukan atau tujuan yang ingin dicapai dengan hasil yang dicapai. Hasil yang dicapai dimaksudkan adalah berupa informasi sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta dalam penentuan kebijakan.

Dengan demikian jenis atau model evaluasi yang digunakan dalam mengevaluasi program tergantung pada tujuan yang ingin dicapai pada program tersebut.

Selanjutnya Borg dan Gall (1983) mengungkapkan tentang *evaluasi is the process of making judgement about merit, value or worth of educational pograms*. Sementara itu Stake (2004) memandang bahwa “*Evaluation is the comparison of the condition or performen of something to one more standarts, the report of such a comparison.*” Evaluasi adalah perbandingan kondisi atau kinerja sesuatu untuk satu standart atau lebih. Dalam hal ini, Stake lebih menekankan kesesuaian antara suatu kondisi kerja yang biasa disebut kinerja dengan satu patokan, acuan atau standarisasi yang telah ditetapkan.

Senada dengan pendapat Stake di atas, Fitzpatrick, Worthen dan Sanders (2004) bahwa “*Evaluation as the identification, clarification and application of defensible creteria to determine an evaluation object’s value (worth and merit) in relation to those criteria.*” Evaluasi program adalah sebagai identifikasi, klarifikasi, dan penerapan kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menentukan nilai dari suatu obyek evaluasi (berupa nilai dan manfaat) dalam kaitannya dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk keberhasilan program. Dengan kata lain, evaluasi program dimaksudkan untuk melihat pencapaian target program.

Untuk menentukan seberapa jauh target program sudah tercapai, yang dilakukan tolak ukur adalah tujuan yang sudah dirumuskan dalam tahap perencanaan kegiatan. Untuk itu Arikunto

dan Abdul Jabar (2007) menyebutkan ada empat kemungkinan kebijakan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program yaitu:

“(1) Menghentikan program, karena dipandang bahwa program tersebut tidak ada manfaatnya, atau tidak dapat terlaksana sebagaimana diharapkan. (2) Merevisi program, karena ada bagian-bagian yang kurang sesuai dengan harapan (terdapat kesalahan tetapi sedikit). (3) Melanjutkan program, karena pelaksanaan program menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan hasil yang bermanfaat. (4) Menyebarkan program (melaksanakan program ditempat lain atau mengulangi lagi program di lain waktu), karena program tersebut berhasil dengan baik, maka sangat baik jika dilaksanakan lagi di tempat dan waktu lain.

Pendapat Gelmon, Foucek dan Waterbury (2005) menyebutkan bahwa:

*“Evaluation is necessary to gain information about program efficacy and to identify areas for program improvement. Valuable information can result from learning that a program achieved its goals, but equally valuable information can be derived from examining why a program did not achieve its goals. Evaluation is not only intended to look at “did it work” or not, but also for whom, where, and under what circumstances.”*

Evaluasi ini diperlukan untuk mendapatkan informasi tentang efektivitas dari program dan mengidentifikasi area untuk perbaikan

program. Informasi berharga mendapatkan hasil dari belajar bahwa tujuan program dapat tercapai, tetapi informasi yang sama berharga untuk dapat diturunkan dari mengapa tujuan programnya tidak tercapai. Evaluasi tidak hanya ditujukan untuk melihat “apakah hal itu bekerja atau tidak, tetapi juga untuk siapa, di mana, dan dalam keadaan apa.

Sementara itu Kirkpatrick (2010) menambahkan ada tiga alasan mengapa diperlukan evaluasi program, yaitu: (1) untuk menunjukkan eksistensi dan dana yang dikeluarkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran program yang dilakukan, (2) untuk memutuskan apakah kegiatan yang dilakukan akan diteruskan atau dihentikan, (3) untuk mengumpulkan informasi bagaimana cara untuk mengembangkan program di masa mendatang.

Dari berbagai definisi evaluasi program di atas ditarik kesimpulan bahwa evaluasi program adalah sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauhmana keberhasilan sebuah program dengan menerapkan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai sebuah rancangan, selanjutnya menyajikan berbagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap implementasi dan efektifitas suatu program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut.

## **B. Model-Model Evaluasi Pendidikan**

Dalam dunia pendidikan terdapat berbagai model evaluasi. Setiap model evaluasi memiliki karakteristik masing-masing

berkenaan dengan konsep dasar, metode, serta fokus yang akan dievaluasi. Karena itu untuk m e n g evaluasi suatu program haruslah menggunakan model evaluasi tertentu. Untuk mengevaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling, Stufflebeam (Aip Badrujaman: 2011) menjelaskan bahwa ada sekitar 50 lebih model evaluasi yang ada. Sedangkan Sugiyono (2011) dan Gysbers dan Handerson (2006) menyebutkan ada beberapa model yang sering digunakan untuk mengevaluasi program antara lain: *Goal Oriented Evaluation Model*, *Goal Free Evaluation Model*, *Formative dan Summative Evaluation Model*, *Responsive Evaluation Model*, *Countenance Evaluation Model*, *CIPP Evaluation Model*, *Discrepancy Evaluation Model*.

Berikut dikemukakan beberapa model evaluasi program yang populer dan banyak dipakai sebagai strategi atau pedoman kerja dalam pelaksanaan evaluasi program dari beberapa ahli, yaitu:

#### **(1) Goal Oriented Evaluation Model.**

Model ini dikembangkan oleh Tyler. Menurut model ini yang menjadi sarannya adalah tujuan program yang sudah ditetapkan (Sugiyono, 2011). Dalam model ini seorang evaluator secara terus menerus melakukan pantauan terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya Purwanto dan Atwi Suparman menyebutkan bahwa Goal Oriented Evaluation adalah evaluasi yang menekankan pada penilaian ketercapaian tujuan (Purwanto dan Suparman, 1999). Dengan demikian evaluasi model ini memfokuskan pada bagaimana tujuan yang telah ditetapkan itu sudah terlaksana dan tercapai atau belum. Menurut model ini proses pencapaian tidak mendapat

perhatian utama, yang menjadi perhatian utama adalah tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam bidang pendidikan, kegiatan yang bisa dievaluasi oleh pendekatan ini bisa dilakukan sesederhana mungkin pada kegiatan harian di kelas atau kegiatan sekolah. Hasil yang diperoleh dari evaluasi ini nantinya dapat dipakai untuk merumuskan kembali tujuan dari kegiatan, mendefinisikan kembali kegiatan/program, prosedur penilaian dan perangkat yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan.

Pemikiran Tyler ini secara logis bisa diterima dan juga mudah dipakai oleh praktisi evaluasi pendidikan. Dalam kegiatan belajar mengajar seorang guru pasti kenal dengan tujuan umum dan tujuan khusus setiap kegiatan pembelajaran. Tyler juga menggunakan pre-test dan post-test sebagai salah satu teknik pengukuran. Teknik pre-post tes tersebut dimaksudkan untuk menentukan perubahan-perubahan yang terjadi pada individu. Lebih kedepannya, goal oriented evaluation model memiliki fleksibilitas yang besar yang memungkinkan untuk digunakan dalam hubungannya dengan program pelayanan manusia yang berkembang melalui berbagai tahapan perkembangan (Marsh, 1978).

Obaitan, Osokoya, Adegbile, and Folorunso (2014) dalam penelitiannya tentang “Evaluasi program terhadap Pre-NCE (*Pre Nigeria Certificate in Education*) Program Pendidikan di Perguruan Tinggi di Nigeria dalam 2000-2004 dengan menggunakan *Tyler’s goal-oriented approach* dengan mengadaptasi *goal-free model* Scriven’s menunjukkan bahwa 59% dari siswanya mengaku belajar

ilmu, bahasa, dan pendidikan teknis di Perguruan Tinggi adalah produk dari program Pre-NCE, juga 80% dari mereka bisa transit yang luar 1st tahun program NCE. Sehingga program ini dinilai sebagai strategi intervensi yang efektif untuk produksi guru pre-service.

Kelebihan dari pendekatan evaluasi berorientasi tujuan adalah mudah dimengerti dan dipahami, mudah diikuti, mudah diterapkan dan juga mudah disetujui untuk diteliti. Model ini memaksa program untuk menentukan tujuan yang tentunya untuk meningkatkan kemungkinan untuk mencapai tujuan tersebut Marsh (1978). Sedangkan kelemahan dari pendekatan ini antara lain adalah: lebih menekankan mengukur tujuan pencapaian daripada keberhargaan tujuan itu sendiri, kurangnya standar untuk mempertimbangkan kesenjangan yang penting antara hasil observasi dengan level kinerja, mengabaikan nilai dari tujuan itu sendiri, melupakan konteks mengenai objek evaluasi dilaksanakan, mengabaikan hasil penting yang diperoleh tidak diungkapkan dalam tujuan, dan bukti informasi program yang tidak menggambarkan tujuan program ditinggalkan.

## ***(2) Formatif-Sumatif Evaluation Model***

Model ini dikembangkan oleh Scriven. Evaluasi formatif digunakan untuk memperoleh informasi yang dapat membantu memperbaiki program. Evaluasi ini dilakukan ketika program masih berlangsung atau ketika program masih dekat dengan permulaan program. Tujuan evaluasi formatif tersebut adalah untuk mengetahui

sejauh mana program yang dirancang dapat berlangsung, sekaligus mengidentifikasi hambatan. Dengan diketahuinya hambatan dan hal-hal yang menyebabkan program tidak lancar, pengambil keputusan dapat secara diri mengambil keputusan perbaikan yang mendukung kelancaran pencapaian tujuan program. Data yang diperoleh juga dapat digunakan untuk membentuk dan mengadakan modifikasi terhadap suatu program. Dalam beberapa hal hasil teman dari evaluasi dapat digunakan sebagai acuan oleh pelaksana untuk melaksanakan kelanjutan program agar tidak terjadi berbagai penyimpangan dalam melaksanakan program.

Evaluasi sumatif digunakan untuk menilai kegunaan suatu objek. evaluasi ini dilaksanakan setelah program berakhir. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengukur ketercapaian program. Data yang diperoleh dari evaluasi sumatif sangat berguna bagi pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan selanjutnya. Evaluasi sumatif mengarah pada keputusan tentang kelanjutan program. Keputusan yang diambil didasarkan pada hasil evaluasi untuk menentukan program dilanjutkan dengan perbaikan atau program dihentikan (Kaufman & Thomas, 2000).

Keunggulan dari model formatif-summatif evaluation ini adalah:

(1)Evaluasi formatif digunakan untuk memperbaiki program selama program tersebut sedang berjalan. Caranya dengan menyediakan balikan tentang seberapa bagus program tersebut telah berlangsung. Melalui evaluasi formatif ini dapat dideteksi adanya ketidakefisienan

sehingga segera dilakukan revisi. (2) Evaluasi sumatif bertujuan mengukur efektifitas keseluruhan program yang bertujuan untuk membuat keputusan tentang keberlangsungan program tersebut, yaitu dihentikan atau dilanjutkan. Sedangkan kelemahannya adalah tidak terdapat langkah-langkah sistematis yang harus dilakukan dalam evaluasi, hanya menekankan pada obyek sasaran saja.

### (3) *Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product)*

Model evaluasi CIPP dikembangkan oleh Stufflebeam. Konsep dasar dari model evaluasi CIPP adalah melakukan evaluasi terhadap: context (konteks), input (masukan), process (proses) dan product (hasil). Evaluasi konteks membantu dalam mengembangkan tujuan sebuah program, evaluasi input membantu dalam penyiapan program dan evaluasi proses digunakan untuk menunjukkan pelaksanaan program, sedangkan evaluasi produk merupakan evaluasi terhadap output sebagai bahan kajian dalam pengambilan kebijakan terhadap program yang sedang dijalankan (Zhang, et.al., 2011).

Kemudian Stufflebeam menjelaskan evaluasi model CIPP sebagai "proses menggambarkan, memperoleh dan memberikan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan." Dengan kata lain, model CIPP didasarkan pada penyediaan informasi untuk keputusan. Selain itu, Boulmetis dan Dutwin, evaluasi bernama model CIPP sebagai model pengambilan keputusan terbaik (Tokmak, et.al., 2013).

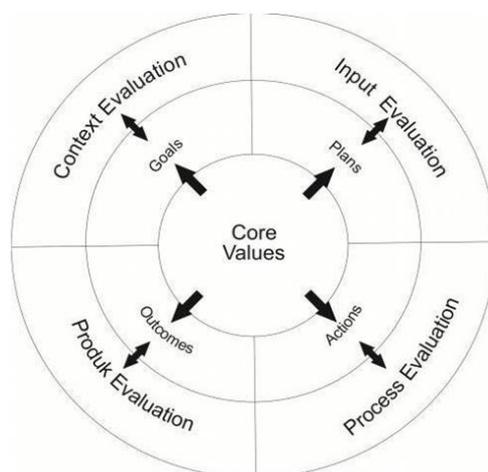
Dalam pelaksanaannya model evaluasi CIPP lebih banyak digunakan oleh kalangan perguruan tinggi dan para evaluator, hal ini dikarenakan model evaluasi ini lebih komprehensif jika

dibandingkan dengan model evaluasi lainnya. Model CIPP berorientasi pada suatu keputusan (a decision oriented evaluation approach structured). Tujuannya adalah untuk membantu administrator (kepala sekolah dan guru) didalam membuat keputusan. Menurut Stufflebeam mengungkapkan bahwa, “ the CIPP approach is based on the view that the most important purpose of evaluation is not to prove but improve.” Konsep tersebut ditawarkan oleh Stufflebeam dengan pandangan bahwa tujuan penting evaluasi adalah bukan membuktikan, tetapi untuk memperbaiki (Widoyoko, 2013).

Adapun tugas evaluator dari keempat tahapan evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Context (Context of the programme) Tujuan utama dari evaluasi context adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan evaluan. Evaluator mengidentifikasi berbagai factor guru, peserta didik, manajemen, fasilitas kerja, suasana kerja, peraturan, peran komite sekolah, masyarakat dan factor lain yang mungkin berpengaruh terhadap kurikulum.
- 2) *Input (Input into the programme)*. Evaluasi ini penting karena untuk pemberian pertimbangan terhadap keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Evaluator menentukan tingkat kemanfaatan berbagai faktor yang dikaji dalam konteks pelaksanaan kurikulum. Pertimbangan mengenai ini menjadi dasar bagi evaluator untuk menentukan apakah perlu ada revisi atau pergantian kurikulum.

- 3) *Process (Process within the programme)* Evaluasi proses adalah evaluasi mengenai pelaksanaan dari suatu inovasi kurikulum. Evaluator mengumpulkan berbagai informasi mengenai keterlaksanaan implementasi kurikulum, berbagai kekuatan dan kelemahan proses implementasi. Evaluator harus merekam berbagai pengaruh variable input terhadap proses.
- 4) *Product (Product of the programme)* Adapun tujuan utama dari evaluasi hasil adalah untuk menentukan sejauh mana kurikulum yang diimplementasikan tersebut telah dapat memenuhi kebutuhan kelompok yang menggunakannya. Evaluator mengumpulkan berbagai macam informasi mengenai hasil belajar, membandingkannya dengan standard dan mengambil keputusan mengenai status kurikulum (direvisi, diganti atau dilanjutkan). Keempat evaluasi ini merupakan suatu rangkaian keutuhan, karena model ini dikembangkan berdasarkan suatu pandangan bahwa kegiatan program sebagai sesuatu dalam dimensinya yang utuh, pelaksanaan keempat jenis evaluasi model ini merupakan hal yang diharapkan. Kekuatan model ini sebenarnya terletak pada rangkaian kegiatan keempat jenis evaluasi tersebut sebagaimana tampak pada gambar berikut:



Gambar 2 Kaitan CIPP dengan Program yang dievaluasi (Stufflebeam dan Shinkfield , 2007)

Model evaluasi CIPP ini bersifat lebih komprehensif diantara model evaluasi lainnya, karena objek yang dievaluasi tidak hanya pada hasilnya saja tetapi juga mencakup konteks, masukan, proses, dan hasil. Disisi lain model evaluasi ini dalam penerapannya pada program pembelajaran dikelas mempunyai tingkat keterlaksanaan yang kurang tinggi jika tidak disertai adanya modifikasi. Hal ini dapat terjadi karena untuk mengukur konteks, masukan maupun hasil dalam arti yang luas akan melibatkan banyak pihak yang membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar.

Kemudian Guili Zhang, et.al. (2011) menyatakan *“Finally, the product evaluation component measures, interprets, and judges project outcomes and interprets their merit, worth, significance, and probity”* yang berarti akhirnya, langkah-langkah evaluasi komponen produk, menafsirkan, dan hasil dari proyek judges dan menafsirkan prestasi mereka, layak, significance, dan kejujuran).

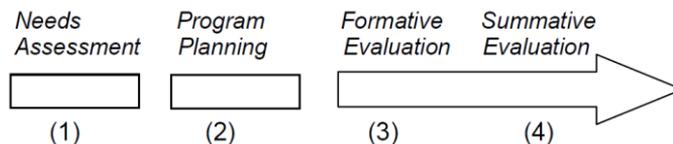
Dengan demikian evaluasi model ini sangat tepat mengevaluasi efektivitas pelaksanaan sebuah program, karena dianggap paling komprehensif dan pelaksanaannya menekankan pada proses yang menyeluruh dalam sistem manajerial.

#### **(4) CSE-UCLA Evaluation Model**

CSE-UCLA terdiri dari dua singkatan, yaitu CSE-UCLA. CSE merupakan singkatan dari *Center for the Study of Evaluation*, sedangkan UCLA merupakan singkatan dari University of California in Los Angeles. Ciri dari model CSE-UCLA adalah adanya lima tahap yang dilakukan dalam evaluasi yaitu perencanaan, pengembangan, implementasi, hasil, dan dampak. Fernandes memberikan penjelasan tentang model CSE-UCLA menjadi empat tahap yaitu (1) *needs assessment*, (2) *program planning*, (3) *formative evaluation*, dan (4) *sumative evaluation* (Arikunto dan Jabar, 2007). Masing-masing keempat tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- 1) *Needs Assessment*. Dalam tahap ini evaluator memusatkan perhatian pada penentuan masalah.
- 2) *Program Planning*. Dalam tahap kedua dari CSE model ini evaluator mengumpulkan data yang terkait langsung dengan pembelajaran dan mengarah pada pemenuhan kebutuhan yang telah diidentifikasi pada tahap kesatu. Dalam tahap perencanaan ini program PBM dievaluasi dengan cermat untuk mengetahui apakah rencana pembelajaran telah disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Evaluasi tahap ini tidak lepas dari tujuan yang telah dirumuskan.

- 3) *Formative Evaluation*. Dalam tahap ketiga ini evaluator memusatkan perhatian pada keterlaksanaan program. Dengan demikian, evaluator diharapkan betul-betul terlibat dalam program karena harus mengumpulkan data dan berbagai informasi dari pengembang program.
  - 4) *Summative Evaluation*. Dalam tahap keempat, yaitu evaluasi sumatif, para evaluator diharapkan dapat mengumpulkan semua data tentang hasil dan dampak dari program. Melalui evaluasi sumatif ini, diharapkan dapat diketahui apakah tujuan yang dirumuskan untuk program sudah tercapai, dan jika belum, dicari bagian mana yang belum dan apa penyebabnya.
- Untuk lebih jelasnya, model CSE-UCLA dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 3 Tahap-tahap Evaluasi Model CSE-UCLA.

Sedangkan kelebihan dari model ini adalah (a) Merupakan pendekatan proses dimana dalam mengembangkan kriteria evaluasi atas dasar tradisi *naturalistic inquiry a kualitatif*. (b) Menekankan evaluasi yang komprehensif dengan langkah-langkah evaluasi yang sistematis. (c) Menyediakan feedbak dalam pengembangan program dan kelemahannya adalah (a) Guru sebagai tolok ukur, keberhasilan diukur menurut guru bukan menurut kurikulumnya. (b) Merupakan pendekatan yang paling riil di lapangan tapi paling labil. (c) Tugas

evaluators lebih berat, harus sensitif dan banyak berdialog. (d) Evaluators menjadi instrumen hidup sebelum kriteria dan alat evaluasi dikembangkan. (e) Tidak bisa secara tegas menunjukkan apakah program sukses atau efektif.

Kusmanto, dkk. (2014) dalam penelitiannya: “Pengembangan model evaluasi program layanan Bimbingan dan Konseling berdasarkan model CSE-UCLA di SMP Kabupaten Kudus” menunjukkan bahwa hasil uji coba instrumen sebanyak 50 guru BK SMP se Kabupaten Kudus meliputi 9 kecamatan diperoleh hasil reliabilitas 0,952. Dengan demikian model CSE-UCLA dapat digunakan untuk mengevaluasi program layanan bimbingan dan konseling.

#### ***(5) Countenance Evaluation Model***

Model ini dikembangkan oleh Stake Kaufman. Stake menekankan adanya dua dasar kegiatan dalam evaluasi yaitu pada deskripsi (description) dan pertimbangan (judgement). Model evaluasi Stake ini merupakan analisis proses evaluasi yang membawa dampak yang cukup besar dalam bidang ini, meletakkan dasar yang sederhana namun merupakan konsep yang cukup kuat untuk perkembangan yang lebih jauh dalam bidang evaluasi (Widoyoko, 2013). Menurut Stake (Kaufman, & Thomas, 2000) model ini dibagi atas tiga fase, yaitu: antecedents (context) atau periode sebelum program dilaksanakan, transaction-processes yaitu proses atau transaksi, dan keluaran atau hasil (output, outcomes). Masing-masing keempat tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Antecedents (context)* yaitu sebuah kondisi yang ada sebelum instruksi yang mungkin berhubungan dengan hasil, contohnya: latar belakang guru, kurikulum yang sesuai, ketersediaan sumber daya.
- b. *Transaction* yaitu pertemuan dinamis yang merupakan proses instruksi (kegiatan, proses, dll), contohnya: interaksi guru dan siswa, komponen partisipasi.
- c. *Outcomes* yaitu efek dari pengalaman pembelajaran (pengamatan dan hasil tenaga kerja), contohnya performance guru, peningkatan kinerja.

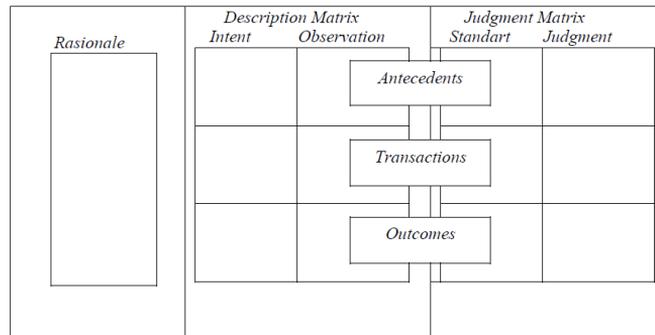
Model ini menekankan kepada evaluator agar membuat keputusan/penilaian tentang program yang sedang dievaluasi secara benar, akurat dan lengkap. Stake menunjukkan bahwa description disatu pihak berbeda dengan pertimbangan (*judgment*) atau menilai. Di dalam model ini data tentang Antecedent (*input*), Transaction (*process*) dan *Outcomes (Product)* data tidak hanya dibandingkan untuk menentukan kesenjangan antara yang diperoleh dengan yang diharapkan, tetapi juga dibandingkan dengan standar yang mutlak agar diketahui dengan jelas kemanfaatan kegiatan di dalam suatu program. Karena itu evaluasi program ini merupakan evaluasi yang menilai aktivitas di bidang pendidikan dengan menyediakan data yang berkelanjutan (Sundoyo, dkk., 2012).

Bonsall Wood ( 2010) dalam penelitiannya mengevaluasi sebuah kursus pengembangan profesi pendidikan lingkungan dengan menggunakan model *Stake countenance* sebagai kerangka kerja organisasi, suatu analisis lengkap dari 10 kursus istimewa

menggunakan 8 alat evaluasi yang difokuskan pada kesesuaian antara apa yang diinginkan pada yang terjadi dan apa yang diobservasi secara aktual pada yang terjadi sebelumnya, selama dan setelah pengajaran. Model Stake ini menunjukkan keefektifannya dengan fasilitasi sebuah ujian yang diteliti secara seksama baik kuantitatif dan kualitatif data selama seluruh tahapan pelaksanaan proses.

Disamping itu Stake juga mengatakan bahwa “*Evaluation emphasizes the importance of both description and observation in evaluation*” (Brady, 1983). Menurutnya kegiatan evaluasi menekankan kepada dua hal yaitu deskripsi dan pengamatan atau observasi. Dengan adanya deskripsi dan pengamatan, model yang diajukan oleh Stake pada model countenance terdiri dari dua matriks. Matriks pertama dinamakan deskripsi (*description*) dan kedua disebut matriks pertimbangan (*judgment*). Pada matriks deskripsi terdiri dari dua kategori yaitu inten dan observasi. Sedangkan pada matriks pertimbangan terdapat dua kategori yaitu standar dan pertimbangan. Untuk menghubungkan kedua matriks tersebut terdapat tiga kategorisasi yaitu antecedents, transactions dan *outcome*.

Desain model countenance Stake dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 4 Matriks Countenance Stake (Ogle, 2002)

Desain model *countenance Stake* sebagaimana gambar 3.3 di atas, dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

- a. *Rational*, yaitu penjelasan mengenai pentingnya mengikuti suatu program
- b. *Antecedent*, yaitu hal-hal yang diharapkan sebelum mengikuti suatu program.
- c. *Transaction*, yaitu proses atau kegiatan yang saling mempengaruhi selama program
- d. *Outcomes*, yaitu hasil yang diperoleh dari suatu program
- e. *Judgement*, yaitu menilai pendekatan dan prosedur yang dilakukan selama program
- f. *Intens*, yaitu tujuan yang diharapkan dari suatu program
- g. *Observation*, yaitu apa yang dilihat oleh pengamat selama program
- h. *Standar*, yaitu apa yang diharapkan oleh stakeholders
- i. *Judgement*, yaitu menilai suatu program, baik yang dilakukan oleh penilai maupun pihak lain.

Dari matrik di atas, di jelaskan bahwa (1) Antecedents phase, berkenaan dengan sebelum program diimplementasikan: apakah kondisi atau kejadian apa yang ada sebelum implementasi program? apakah kondisi/kejadian tersebut akan mempengaruhi program?. (2) Transactions phase, berkenaan dengan pelaksanaan program: apakah yang sebenarnya terjadi selama program dilaksanakan? apakah program yang sedang dilaksanakan itu sesuai dengan rencana program?. (3) *Outcomes phase*, yaitu mengetahui akibat implementasi pada akhir program; apakah program itu dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan? apakah peserta didik menunjukkan perilaku pada level yang tinggi dibanding dengan pada saat mereka berada sebelum program dilaksanakan? dan setiap tahapan tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu description (deskripsi) dan judgment (penilaian).

Berkaitan dengan matrik, yang menjadi tugas dari seorang evaluator adalah menentukan masukan untuk ketiga tingkatan. Baris antecedence diisi dengan hal-hal yang menjadi kondisi awal dari suatu klien program. Fenomena dalam proses selama program dijejalkan pada baris transaction. Pada baris outcomes evaluator bertugas menampilkan data yang menunjukkan hasil.

Hal lain yang juga penting dilakukan evaluator adalah mengumpulkan data untuk melengkapi kolom deskripsi matrik, untuk mengetahui apakah hasil yang dicapai telah lebih baik atau tidak dibandingkan dengan data antecedence. Dan pada kolom judgment diisi dengan interpretasi penilai terhadap tingkah laku dengan acuan standar.

Model *Countenance Stake*'s. mempunyai kelebihan dan kelemahan (Hasan, 2009). Kelebihannya adalah: (1) Dalam penilaiannya melihat kebutuhan program yang dilayani oleh evaluator. (2) Upaya untuk mendeskripsikan kompleksitas program sebagai realita yang mungkin terjadi. (3) Memiliki potensi besar untuk memperoleh wawaasan baru dan teori-teori tentang lapangan dan program yang akan dievaluasi. Sedangkan kelemahannya adalah: (1) Pendekatan yang dilakukan terlalu subjektif. (2) Terjadinya kemungkinan dalam meminimalkan pentingnya instrument pengumpulan data dan evaluasi kuantitatif. (3) Kemungkinan biaya yang terlalu besar dan padat karya.

**(6) Model EPIC Robert L. Hammond.**

*Model Evaluation Program for Innovative Curriculum* (selanjutnya disebut model EPIC) dikembangkan oleh Robert L. Hammond. Model evaluasi ini berorientasi pada tujuan. Penilaian dalam pemikiran ini tidak hanya memusatkan perhatian pada tercapai tidaknya tujuan, tetapi juga melakukan kajian terhadap persoalan. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu program pendidikan. Hammond sangat berpengaruh pada bidangnya dan seringkali mengadvokasi serta menjadi konselor bagi guru dan pekerja lainnya yang terlibat di dalam pendidikan.

Ada lima langkah menurut Hammond untuk menganalisa dan mengevaluasi kurikulum (Brady, 1983) yaitu:

1. *Isolating the program or part of the curriculum to be evaluated.*

2. *Defining the descriptive variables (all variables relating to the school and instruction).*
3. *Stating objectives in behavioural terms.*
4. *Assessing behavioural described in the objectives; and*
5. *Analysing results to arrive at conclusions about the objectives.*

Dari penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa model evaluasi yang digagas Hammond terdiri dari lima langkah, pertama: memilih dan mengisolasi bagian kurikulum yang akan dievaluasi, kedua: mendefinisikan variabel-variabel deskriptif (semua variabel yang berkaitan dengan sekolah dan tujuannya), ketiga: menetapkan hasil belajar yang diinginkan, keempat: menilai hasil belajar, dan kelima: analisis hasil dengan membuat kesimpulan terhadap suatu program.

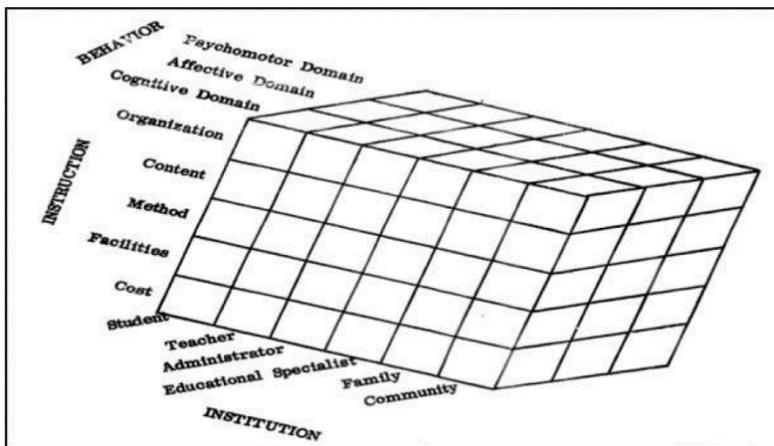
Syaodih (2014) mengatakan, “model EPIC menggambarkan keseluruhan-an program evaluasi dalam sebuah kubus”. Kubus ini digunakan untuk menggambarkan program pendidikan dan mengorganisasikan variable-variabel yang dievaluasi. Kubus ini dinamakan Hammond sebagai “Structure of Evaluation”. Kubus ini digunakan untuk menjelaskan lima langkah dalam evaluasi kurikulum. Hammond membuat kubus yang berisi tiga komponen dan masing-masing komponen terdiri dari beberapa aspek.

- 1) Komponen instruction (Pembelajaran), menggambarkan karakteristik aktifitas pendidikan yang akan dievaluasi, terdiri dari:

- a. Organisasi, termasuk didalamnya: waktu, jadwal kegiatan, urutan mata pelajaran, dan juga termasuk organisasi sekolah, baik vertical maupun horizontal.
  - b. Konten, meliputi topic-topik yang termasuk akan dievaluasi;
  - c. Metode, mencakup seluruh aktifitas pembelajaran, tipe-tipe interaksi guru-murid, dan teori-teori pembelajaran;
  - d. Fasilitas, meliputi: ruangan, peralatan, dan sarana-prasarana lainnya.
  - e. Biaya, mencakup anggaran yang diperlukan untuk fasilitas, pemeliharaan, dan personil.
- 2) Komponen institution (Kelembagaan), menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang terlibat dalam aktifitas pendidikan yang akan dievaluasi meliputi:
- a. Peserta didik, mencakup: umur, jenis kelamin, tingkat/ kelas, latar belakang keluarga, kelas social, kesehatan, kemampuan, minat, dan prestasi belajar;
  - b. Guru, administrator, dan tenaga kependidikan lainnya, mencakup: umur, jenis kelamin, ras/ suku, agama, kesehatan, latar belakang pendidikan, pengalaman, kebiasaan kerja, dl.
  - c. Keluarga, mencakup tingkat keterlibatannya dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dinilai, serta karakteristik umum, seperti: budaya, bahasa, ukuran keluarga, status perkawinan, tingkat pendidikan orangtua, afiliasi politik, agama, dll.
- 3) Komponen behavioral objective, menggambarkan ranah tujuan aktifitas pendidikan yang akan dievaluasi, terdiri dari:

- a. Tujuan kognitif, mencakup pengetahuan dan ketrampilan intelektual;
- b. Tujuan Afektif, meliputi: minat, sikap, perasaan, dan emosi;
- c. Tujuan Psikomotorik, termasuk didalamnya ketrampilan dan koordinasi fisik.

Gambar kubus model EPIC Hammond dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 5 Desain Model EPIC dari Robert L. Hammond (Ogle, 2002).

Model evaluasi ini sifatnya berorientasi pada tujuan, karena itu kelebihan model ini terletak pada hubungan antara tujuan dan kegiatan dan menekankan pada peserta didik sebagai aspek penting dalam pembelajaran atau pelayanan Bimbingan dan Konseling. Sedangkan kekurangannya adalah memungkinkan terjadinya proses evaluasi melebihi konsekuensi yang tidak diharapkan.

(7) *Model Logic (Owen)*

Logic model adalah alat untuk melakukan perencanaan atas program yang akan dilaksanakan. Disamping itu *logic* model juga dapat digunakan untuk melakukan evaluasi atas program atau kegiatan yang telah selesai maupun yang sedang berjalan serta program yang masih dalam tahap perencanaan (Kellogg, WK., 2004).

Pada model *logic* ini, evaluasi harus dilakukan secara terus menerus yang dilakukan oleh seorang evaluator untuk memantau terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi yang dilakukan harus secara terus-menerus untuk melakukan penilaian terhadap tujuan. Owen (2006) mengatakan bahwa: *“This is logic that is consistent with a description of evaluation as the process of making a judgement about the value or worth of an object under review. At this stage it is worth noting that evaluators use the term “evaluand” to generically denote the “object” that is the focus for the evaluation.”*

Kemudian Fournier yang dikutip Owen (2006) mengemukakan bahwa model *logic* dapat digambarkan dengan mengikuti tahapan sebagai berikut:

- a) *Estabilishing criteria of worth* (menetapkan kriteria yang layak)
- b) *Construction standart* (indikator yang terstandar atau konstruk yang standar)
- c) *Measuring performance and comparing with standart* (mengukur hasil dan hasilnya dibandingkan dengan kriteria indikator)

- d) Synthesising and integrating evidence into judgement of merit or worth. (melakukan sintesis dan mengintegrasikan bukti yang diperoleh melalui penilaian dengan memperhatikan manfaat dan kelayakannya).

Dari pendapat di atas, dijelaskan bahwa antara kriteria dan standar adalah dua hal yang berbeda. Hal ini dimaksudkan agar evaluator memiliki ketajaman dalam menganalisis dan mensintesis suatu tahapan serta permasalahan yang dihadapi dalam proses mengevaluasi sebuah program. Sedangkan standar yang dimaksudkan dalam model logic ini lebih menekankan pada kriteria yang telah ditetapkan yaitu indikator dari kriteria (Arthur, 2016).

Dalam evaluasi *logic model*; penggambaran narasi atau grafis dari suatu proses dalam kehidupan nyata yang mendasari suatu kegiatan sehingga diharapkan dapat mengarah ke hasil yang spesifik. *Logic model* menggambarkan urutan sebab akibat dan suatu hubungan pendekatan sistem untuk berkomunikasi mencari jalan menuju hasil yang diinginkan. *Logic model* merupakan teori tentang hubungan sebab-akibat di antara berbagai komponen dari suatu program: sumber daya dan kegiatan-kegiatannya, keluarannya, serta dampak jangka pendek dan hasil jangka panjang (Devine, P., 1999).

Untuk pelaksanaannya logic model dilakukan dalam tiga tahap yaitu *logic model existing*, *logic model ideal* dan *logic model rekomendasi*. Pada *logic model existing* diketahui adanya ketidaksesuaian proses

pembelajaran yang sedang berlangsung yaitu pada pencapaian outcome. *Logic model* ideal disusun berdasarkan beberapa referensi yang kemudian diprioritaskan untuk penyusunan *logic model* rekomendasi. Pada *logic model* rekomendasi didapatkan *outcome* yang harus dicapai.

#### **(8) *Model Measurement dari Thorndike***

Pengukuran (measurement) sangat erat kaitannya dengan kualitas sebuah obyek pengukuran, yang dilukiskan dalam bentuk unit-unit tertentu, seperti meter, gram dan persentil, sehingga hasil pengukuran selalu dinyatakan dalam bentuk bilangan. Sehingga hasil dari pengukuran itu dipandang sebagai kegiatan dalam menentukan “besarnya” sesuatu sifat (atribut tertentu) yang dimiliki obyek, orang, kejadian maupun peristiwa, dalam bentuk unit ukuran tertentu. Thorndike, mencontohkan dia berkeyakinan: *if anything exists, it exists in quantity, and if it exists in quantity it can be measured* (Sudjana dan Ibrahim, 2001).

Obyek dari kegiatan model ini adalah tingkah laku, terutama tingkah laku siswa. Menurut model ini, penilaian pendidikan adalah “pengukuran” terhadap berbagai aspek tingkah laku dengan tujuan untuk melihat perbedaan-perbedaan individu atau kelompok, yang hasilnya diperlukan dalam rangka seleksi, bimbingan, dan perencanaan pendidikan bagi para siswa di sekolah (Qomari, 2008).

Ruang lingkup evaluasi dari model ini adalah tingkah laku, terutama tingkah laku siswa yang mencakup kemampuan hasil belajar, kemampuan pembawaan (intelegensi dan bakat), minat,

sikap, dan juga aspek-aspek kepribadian siswa (Qomari, 2008). Dengan kata lain, bahwa aspek kognitif dan aspek afektif dari tingkah laku siswa itu merupakan objek dari penilaian.

**(9) *Model Illuminative dari Parlett dan Hamilton***

Model ini dikembangkan sebagai reaksi atas model Measurement dan Goal Atteinment. Model ini menekankan pada penilaian kualitatif dan terbuka. Obyek yang dinilai tidak ditinjau sebagai sesuatu yang terpisah tetapi melainkan dalam hubungan dengan suatu learning milleau, dalam koteks sekolah sebagai lingkungan material dan psikosial, kerjasama di antara siswa, dengan guru dan staf sekolah lainnya.

Tujuan penilaian menurut model ini ialah mengadakan studi yang cermat terhadap sistem yang bersangkutan. Studi difokuskan pada permasalahan bagaimana implementasi suatu sistem dipengaruhi oleh situasi sekolah, tempat sistem tersebut dikembangkan, keunggunaan, kelemahan serta pengaruhnya terhadap proses belajar siswa. Hasil evaluasi lebih bersifat deskriptif dan interpretasi. Model ini lebih menekankan pada penggunaan judgement (Sudjana dan Ibrahim, 2001) .

Objek evaluasi yang diajukan dalam model ini mencakup; latar belakang dan perkembangan yang dialami oleh sistem yang bersangkutan, proses implementasi (pelaksanaan) sistem, hasil belajar yang diperlihatkan oleh siswa, serta kesukaran-kesukaran yang dialami dari tahap perencanaan hingga implementasinya di lapangan. Di samping itu, dampak yang ditimbulkan dari suatu

sistem seperti; kebosanan yang terlihat pada siswa dan guru, ketergantungan secara intelektual, hambatan terhadap perkembangan sikap sosial, dan sebagainya.

Sedangkan tahapan evaluasi dalam Illuminatif model ini, menurut Sudjana dan Ibrahim (2001) terdiri dari tiga fase sebagai berikut:

- 1) Tahap pertama observe. Pada tahap ini, evaluator mengunjungi sekolah atau lembaga yang sedang mengembangkan sistem tertentu. Evaluator mendengarkan dan melihat berbagai peristiwa, persoalan, serta reaksi dari guru maupun siswa terhadap pelaksanaan sistem tersebut.
- 2) Tahap kedua Inquiry further. Pada tahap ini, berbagai persoalan yang terlihat atau terdengar dalam tahap pertama diseleksi untuk mendapatkan perhatian dan penelitian lebih lanjut
- Tahap ketiga Seek to explain. Pada tahap ini, evaluator mulai meneliti sebab akibat dari masing-masing persoalan. Pada tahap ini, faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya persoalan dicoba untuk ditelusuri. Data semula terpisah satu dengan lainnya mulai disusun dan dihubungkan dalam kesatuan situasi. Langkah selanjutnya dilakukan interpretasi data yang diharapkan dapat

dijadikan bahan dalam pengambilan keputusan (Sudjana dan Ibrahim, 2001).

Dari langkah-langkah tersebut, faktor penting dalam evaluasi model ini adalah perlunya kontak langsung antara evaluator dengan pihak yang dievaluasi. Hal ini disebabkan model ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pentingnya menjalin kedekatan dengan orang dan situasi yang sedang dievaluasi agar dapat memahami personal realitas dan hal-hal rinci tentang program atau sistem yang sedang berkembang (Patton, 2006). Disamping itu, faktor lain adalah pandangannya yang holistik dalam evaluasi, yang berasumsi bahwa keseluruhan adalah lebih besar daripada sejumlah bagian-bagian (Patton, 2006).

#### ***(10) Model Discrepancy dari Provus***

Kesenjangan program adalah sebagai suatu keadaan antara yang diharapkan dalam rencana dengan yang dihasilkan dalam pelaksanaan program. Evaluasi kesenjangan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara standard yang sudah ditentukan dalam program dengan penampilan aktual dari program tersebut (Micinova, 2014). Selanjutnya Micinova, (2014) menyebutkan bahwa standar adalah kriteria yang telah dikembangkan dan ditetapkan dengan hasil yang efektif. Penampilan adalah: sumber, prosedur, manajemen dan hasil nyata yang tampak ketika program dilaksanakan.

Sedangkan langkah langkah atau tahap tahap yang dilalui dalam mengevaluasi kesenjangan menurut Micinova (2014) adalah sebagai berikut:

1. *Pertama* : Tahap Penyusunan Desain. Dalam tahap ini dilakukan kegiatan:
  - a. Merumuskan tujuan program
  - b. Menyiapkan murid, staf dan kelengkapan lain
  - c. Merumuskan standar dalam bentuk rumusan yang menunjuk pada suatu yang dapat diukur, bisa di dalam langkah ini evaluator berkonsultasi dengan pengembangan program.

Contoh rumusan standar:

"Keberhasilan Program KPSM yang distandarkan adalah 70 % Warga Belajar meningkat pendapatannya dan ketrampilannya.

2. *Kedua* : Tahap Penetapan Kelengkapan Program

Yaitu melihat apakah kelengkapan yang tersedia sudah sesuai dengan yang diperlukan atau belum. Dalam tahap ini dilakukan kegiatan:

- a. Meninjau kembali penetapan standar
- b. Meninjau program yang sedang berjalan
- c. Meneliti kesenjangan antara yang direncanakan dengan yang sudah dicapai.

3. *Ketiga* : Tahap Proses (Process).

Dalam tahap ketiga dari evaluasi kesenjangan ini adalah mengadakan evaluasi, tujuan tujuan manakah yang sudah dicapai. Tahap ini juga disebut tahap “mengumpulkan data dari pelaksanaan program”.

4. *Keempat* : Tahap Pengukuran Tujuan (Product)

Yakni tahap mengadakan analisis data dan menetapkan tingkat output yang diperoleh. Pertanyaan yang diajukan dalam tahap ini adalah "apakah program sudah mencapai tujuan terminalnya?"

5. *Kelima* : Tahap Perbandingan (Program Comparison)

Yaitu tahap membandingkan hasil yang telah dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam tahap ini evaluator menuliskan semua penemuan kesenjangan untuk disajikan kepada para pengambil keputusan, agar mereka (ia) dapat memutuskan kelanjutan dari program tersebut. Kemungkinannya adalah a. Menghentikan program b. Mengganti atau merevisi c. Meneruskan d. Memodifikasi.

**(11) Model Evaluasi Program *Fatchur***

Dari berbagai model evaluasi program sebagaimana diuraikan di atas, juga dapat dilakukan dengan menggabungkan dua model atau lebih atau perpaduan dari beberapa model, salah satu contoh dalam mengevaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling juga dapat digunakan perpaduan 2(dua) model atau lebih, misalnya menggunakan model evaluasi program *Fatchur*.

Model ini merupakan model evaluasi yang mengadaptasi dari dua jenis evaluasi yaitu model EPIC dari Robert L. Hammond dan Countenance Evaluation Model dari Stake yang dibuat oleh M. Fatchurahman ketika melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan disertasinya dengan judul: Evaluasi Program Pelayanan Bimbingan dan Konseling pada SMA Negeri Kota Palangka Raya pada tahun 2016.

Pengadaptasian dari dua model, yaitu model EPIC dari Robert L. Hammond dan Countenance Evaluation Model dari Stake. Yang diadaptasi dari Model EPIC dari Robert L. Hammond berkenaan dengan karakteristik dari ketiga komponen yaitu:

1. Komponen instruksional, menggambarkan karakteristik aktivitas pelayanan sebagai pendukung pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah, dengan aspek yang akan dievaluasi:
  - a. Organisasi pelayanan bimbingan dan konseling.
  - b. Konten, berupa program pelayanan bimbingan dan konseling.
  - c. Metode, berupa strategi yang digunakan dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling.
  - d. Fasilitas, meliputi: fasilitas teknis (tes dan non tes), fasilitas fisik, dan perlengkapan lainnya untuk menunjang pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling.
  - e. Biaya, mencakup anggaran yang diperlukan untuk fasilitas, pemeliharaan, dan personil dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling.
  - f. Ketersediaan guru bimbingan dan konseling.
  - g. Kesiapan peserta didik
2. Komponen institusional, berupa aktivitas pelayanan sebagai pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah dapat, meliputi: Pelaksanaan berbagai jenis pelayanan bimbingan dan konseling dan kegiatan pendukung.

3. Komponen behavioral objective, menggambarkan ranah tujuan prog-ram berupa kebermanfaatan hasil dari aktivitas dari pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah.

Sedangkan yang diadaptasi dari model Countenance Evaluation dari Stake adalah berkenaan dengan tahapan pelaksanaannya yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu:

- 1) Tahap *Antecedents (context)* yaitu suatu kondisi yang menggambarkan aktivitas sebagai pendukung pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling.
- 2) Tahap *Transaction* yaitu pertemuan dinamis yang merupakan proses pemberian pelayanan sebagai aktivitas pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling.
- 3) Tahap *Outcomes* yaitu efek dari pengalaman pelayanan berupa ha-sil atau produk dari aktivitas pelaksanaan pemberian pelayanan bimbingan dan konseling.

Dari kedua model yang telah diadaptasi tersebut di atas, maka modifikasi karakteristik yang terdapat dalam kubus Model EPIC dari Robert L. Hammond digunakan kedalam tahapan model Countenance Evaluation dari Stake, seperti berikut:

1. Komponen *antecedents*; menggambarkan karakteristik aktivitas pelayanan sebagai pendukung pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, meliputi: organisasi pelayanan bimbingan dan konseling, content, metode, fasilitas, pembiayaan, ketersediaan guru bimbingan dan konseling, dan kesiapan peserta didik.

2. Komponen *Transactions*; menggambarkan karakteristik aktivitas pelayanan sebagai pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, meliputi: pelaksanaan berbagai jenis pelayanan bimbingan dan konseling dan kegiatan pendukung yang diberikan kepada peserta didik, penguasaan para guru melaksanakan berbagai jenis pelayanan bimbingan dan konseling dan kegiatan pendukung.
3. Komponen *Outcomes*, menggambarkan ranah tujuan program yaitu hasil dari aktivitas pelayanan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, berupa manfaat dari pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling bagi peserta didik.

Alasan yang mendasar dalam pemilihan kedua model tersebut di atas adalah dengan menggunakan karakteristik pada ketiga komponen instruction, institution dan behavioral obyektive dari model EPIC Robert L. Hammond yang kemudian dimasukkan ke dalam tiga tahapan pelaksanaan evaluasi dari model Countenance Evaluation dari Stake, yaitu tahap antecedents, tahap transactions dan tahap outcomes yang digunakan untuk mengevaluasi program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah, diharapkan dapat terlihat secara jelas bahwa dari ketiga komponen tersebut apakah pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah berjalan dengan baik ataukah tidak.

Pada komponen antecedents, yang meliputi karakteristik: organisasi pelayanan bimbingan dan konseling, content, metode, fasilitas, pembiayaan, ketersediaan guru bimbingan dan konseling, dan kesiapan peserta didik, sebagai pendukung pelaksanaan layanan

bimbingan dan konseling akan terungkap secara lengkap fakta yang sebenarnya apakah pada komponen antecedents ini ada atau tidak aktivitas yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling, terpenuhi atau tidak fasilitasnya dan anggaran yang dibutuhkan serta pendukung lainnya, sehingga dengan demikian akan diketahui kelebihan dan kelemahannya atau kendala-kendala apa yang dihadapi oleh guru bimbingan dan konseling.

Kemudian komponen transactions, yang meliputi karakteristik: pelaksanaan berbagai jenis pelayanan bimbingan dan konseling dan kegiatan pendukung yang diberikan kepada peserta didik, sebagai pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling akan terungkap secara lengkap fakta yang sebenarnya, apakah pada komponen transactions ini ada atau tidak aktivitas yang dilakukan oleh guru dalam memberikan pelayanan kepada peserta didiknya dengan menggunakan berbagai jenis layanan disertai kegiatan pendukungnya, sehingga akan diketahui kelebihan dan kelemahannya atau kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh guru bimbingan dan konseling.

Demikian pula pada komponen outcomes, berupa manfaat dari pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling bagi peserta didik, sebagai hasil dari aktivitas pelayanan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Apakah pada komponen outcomes ini ada atau tidak kebermanfaatannya bagi peserta didik, sebagai hasil dari aktivitas yang dilakukan oleh guru dalam memberikan pelayanan kepada peserta didiknya. Sehingga dengan demikian akan diketahui

keberhasilannya apakah peserta didik yang telah memperoleh layanan bimbingan dan konseling itu mengalami perubahan perilaku atau tidak setelah mengentaskan permasalahannya dengan guru bimbingan dan konseling, dan akhirnya akan diketahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi ketika melakukan aktivitasnya.

Adaptasi kedua model ini dipakai untuk mengevaluasi kegiatan program layanan bimbingan dan konseling, sehingga hasil yang diharapkan dari evaluasi dapat ditindaklanjuti dan dilaksanakan secara berkesinambungan, terus-menerus untuk mengetahui ketercapaian pelaksanaan program dan digunakan untuk pengambilan keputusan guna perbaikan program berikutnya dan tujuan yang diharapkan tercapai dengan kriteria baik atau tuntas.

### **C. Komponen Evaluasi Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling di Sekolah/Madrasah**

Menurut Gysbers dan Handerson (2004) terdapat 2(dua) kompoonen utama pengelenggaraan bimbingan dan konseling komprehensif yang perlu dievaluasi oleh konselor sekolah, yaitu (1) komponen evaluasi program, (2) komponen evaluasi personil. Dengan melakukan evaluasi terhadap keberfungsian program dan unjuk kerja personil (konselor sekolah) berarti konselor akan memperoleh gambaran tentang dampak atau hasil yang dialami siswa, guru dan orang tua. ABKIN (Depdikbud, 2007) merumuskan aspek/komponen evaluasi penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah, meliputi: evaluasi proses dan evaluasi hasil.

Bila dicermati substansi kegiatan dalam evaluasi proses mengarah pada pengungkapan dan keberfungsian program (evaluasi program) dan kinerja konselor (evaluasi personil). Evaluasi hasil mengarah pada pengungkapan dampak atau pengaruh dari pelaksanaan program yang telah dilakukan konselor sekolah.

## **1. Komponen Evaluasi Proses (Program dan Personil)**

### **a. Komponen Evaluasi Program**

Evaluasi program merupakan prosedur yang digunakan untuk menentukan sejauhmana program yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling komprehensif di sekolah sesuai atau tidak sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat dan berfungsi optimal. Penilaian yang diberikan berdasar pada kondisi suatu program tertentu yang terdapat dalam kerangka kerja program bimbingan dan konseling komprehensif (Gysbers dan Handerson, 2006). Jumlah standart dan kriteria evaluasi program yang digunakan harus memadai untuk memastikan bahwa program bimbingan dan konseling komprehensif benar-benar komprehensif adanya.

Setelah standart-standart dan kriteria yang sepenuhnya dapat mencerminkan program bimbingan dan konseling komprehensif, maka dibuatlah skala nilai untuk setiap kriteria dan pedoman skoring yang dapat menjadi acuan bagi para evaluator. Berikut standart dan kriteria yang pantas digunakan untuk contoh evaluasi program.

**Standart 1:** Para siswa mendapat layanan responsif yang membantu mereka (para siswa) dalam membahas berbagai isu dan hal-hal penting yang dapat mempengaruhi perkembangan sosial-pribadi, akademik dan karir. Kriteria yang ditetapkan:

**Kriteria 1:** Layanan konseling individu tersedia bagi seluruh siswa yang sedang mengalami berbagai permasalahan yang mengganggu perkembangan mereka.

**Kriteria 2:** Konseling kelompok kecil tersedia bagi seluruh siswa yang sedang mengalami berbagai permasalahan yang mengganggu perkembangan mereka.

Untuk menilai sejauhmana tiap kriteria telah diimplementasikan, maka dikembangkan skala penilaian sebagai berikut:

1	2	3	4	5	6	7
	Mulai		Telah		Telah	
	Diimplementasikan		Diimplementasikan		Diimplementasikan	
			Sebagian		Sepenuhnya	

Gambar 6 Skala penilaian

Menurut Boulmetis & Dutwin (2000) evaluasi program merupakan disiplin ilmu terapan dan memiliki definisi sebagai proses sistemik dalam mengumpulkan dan menganalisa informasi tentang efisiensi, keefektifan dan pengaruh program dan layanan. Pertanyaan yang tidak dapat dijawab dengan mudah yaitu “bagaimana kelak konselor sekolah dapat memberikan bukti bahwa program mereka memberi pengaruh bagi siswa?

Oleh karena itu ada beberapa pertanyaan penting yang dapat membantu konselor sekolah dalam melakukan evaluasi program, yaitu:

- 1) Metode, program dan intervensi apakah yang paling efektif dalam memberi bantuan untuk siswa di sekolah?
- 2) Seberapa puaskah siswa dan guru dengan layanan yang mereka terima?
- 3) Bagaimana prestasi siswa telah dipengaruhi oleh intervensi atau program tertentu?
- 4) Bagaimana penempatan kelas mempengaruhi prestasi siswa?
- 5) Sejauhmana tujuan program bimbingan dan konseling yang ingin dicapai telah terpenuhi?
- 6) Apakah program tersebut memenuhi standart kualitatif komponen program bimbingan dan konseling komprehensif (Pelayanan dasar, Pelayanan responsif, Perencanaan individual, dan Dukungan sistem)?

**b. Komponen Evaluasi Personil (Konselor)**

Evaluasi personil merupakan kegiatan menilai efektivitas pekerjaan konselor sekolah dalam kerangka kerja penyelenggaraan bimbingan dan konseling komprehensif. Penilaian yang diberikan berkaitan dengan efektivitas konselor sekolah dengan menggunakan standart atau dimensi-dimensi performansi, yang secara spesifik terungkap dalam kriteria dan deskriptor kerja yang telah ditetapkan dalam kerangka kerja bimbingan dan konseling komprehensif. Sebagai contoh, evaluasi kinerja konselor sekolah berdasarkan panduan ADEPT (Assisting, Developing, an Evaluation Profesional

Teaching), menggunakan 7 dimensi performansi standart konselor, yaitu:

**Standart 1:** *Perencanaan jangka panjang*; konselor sekolah mengembangkan perencanaan jangka panjang tahunan dengan berlandaskan pada berbagai kebutuhan siswa. Perencanaan jangka panjang tersebut mencerminkan komponen-komponen program: kurikulum bimbingan (pelayanan dasar), perencanaan individual siswa, pelayanan responsif dan dukungan sistem.

**Standart 2:** *Perencanaan jangka pendek*; konselor sekolah mengembangkan berbagai tujuan jangka pendek, meliputi: rangkaian kegiatan, sumber daya, dan penjadwalan untuk memastikan bahwa perencanaan jangka pendek tersebut dapat diimplementasikan sepenuhnya.

**Standart 3:** *Pengembangan dan penggunaan assesment*; konselor sekolah merencanakan dan melakukan evaluasi program secara berkelanjutan dan menjaga akuntabilitas program tersebut.

**Standart 4:** *Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling*; konselor sekolah menyelenggarakan berbagai kegiatan bimbingan baik di kelas maupun di sekolah, serta memberikan layanan konseling kelompok dan individu yang dapat meningkatkan perkembangan akademik, karier, pribadi dan sosial siswa secara efektif.

**Standart 5:** *Pelaksanaan layanan konsultasi*; konselor sekolah secara efektif memberikan layanan konsultasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka menyampaikan berbagai

informasi dan bantuan yang tepat kepada orang tua/wali murid, para siswa, dan kolega.

**Standart 6:** *Melakukan koordinasi berkenaan dengan layanan bimbingan dan konseling;* konselor sekolah secara efektif berkoordinasi dengan pelaksana layanan dan program serta masyarakat dan atau berbagai agensi lainnya.

**Standart 7:** *Memenuhi tanggungjawab profesi;* konselor sekolah secara konsisten menunjukkan tingkahlaku etika profesi dan partisipasi dalam perkembangan profesi yang berkelanjutan.

## **2. Komponen Evaluasi Hasil**

Evaluasi hasil merupakan kegiatan yang digunakan untuk mengetahui dampak dari program dan pelaksanaan (kegiatan serta layanan) bimbingan dan konseling komprehensif bagi perkembangan siswa. Konselor sekolah disarankan untuk mengembangkan dan melaksanakan perencanaan evaluasi berbasis hasil sebagai bagian dari keseluruhan pelaksanaan program bimbingan dan konseling komprehensif di sekolah. Hasil yang ditentukan dalam perencanaan tersebut berasal dari perencanaan pengembangan sekolah secara komprehensif, misi program bimbingan dan konseling dan perencanaan strategi. Perencanaan yang ditentukan harus mencakup hasil spesifik yang ingin dicapai, bagaimana seluruh kegiatan atau layanan tersebut, desain evaluasi yang akan digunakan, bagaimana pengumpulan dan analisa data yang akan dilakukan, laporan seperti

apakah yang akan dipersiapkan dan kepada siapakah laporan tersebut akan dipresentasikan.

Dalam merancang perencanaan evaluasi hasil, dapat digunakan beberapa jenis data, yaitu: **Data pertama**, yaitu **data proses**, menggambarkan kegiatan bimbingan dan konseling dan layanan apa sajakah yang disediakan, kapan dan untuk siapa sajakah kegiatan dan layanan bimbingan dan konseling tersebut. Data ini memberikan bukti bahwa kegiatan dan layanan bimbingan dan konseling ini benar-benar tersedia. **Data kedua**, yaitu data persepsi, data ini memberitahukan kita apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh para siswa, orang tua dan guru, administrator/ pengelola atau orang lain, tentang berbagai kegiatan dan layanan, serta kinerja konselor sekolah. **Data ketiga**, yaitu data *outcome* (data hasil), merupakan tingkah laku nyata siswa yang diukur melalui rata-rata kehadiran, kedisiplinan, nilai rata-rata kelas dan skor tes prestasi siswa. Ketiga jenis data ini berguna untuk memastikan dampak program dan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling terhadap tingkah laku (ASCA, 2005).

Perencanaan evaluasi hasil perlu menekankan: pertama, bagaimana data evaluasi tersebut akan digunakan. Salah satu kegunaan data tersebut yaitu untuk menunjukkan kontribusi yang telah dilakukan oleh konselor sekolah untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan, sebagaimana yang telah ditentukan di dalam perencanaan pengembangan sekolah. **Kedua**, bagaimana data tersebut akan digunakan untuk meningkatkan program bimbingan dan konseling komprehensif di sekolah. Berbagai data evaluasi hasil

yang diperoleh akan berguna untuk membuktikan pengaruh program bimbingan dan konseling terhadap siswa dan memperbaiki atau meningkatkan hasil atau dampak program bimbingan dan konseling komprehensif yang akan datang.

#### **D. Langkah-Langkah Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling di Sekolah/Madrasah**

Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) mendeskripsikan langkah-langkah pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah (Depdikbud, 2007) sebagai berikut:

1. Merumuskan masalah atau instrumentasi. Karena tujuan evaluasi adalah memperoleh data yang diperlukan untuk mengambil keputusan, maka konselor perlu mempersiapkan instrumen yang terkait dengan hal-hal yang akan dievaluasi, yang pada dasarnya terkait dengan dua aspek pokok yang dievaluasi, yaitu (a) tingkat keterlaksanaan program/pelayanan (aspek proses), dan (b) tingkat ketercapaian tujuan program/pelayanan (aspek hasil).
2. Mengembangkan atau menyusun instrumen pengumpul data. Untuk memperoleh data yang diperlukan, yaitu mengenai tingkat keterlaksanaan dan ketercapaian program, maka konselor perlu menyusun instrumen yang relevan dengan kedua aspek tersebut. Instrumen itu diantaranya inventori, angket, pedoman wawancara, dan studi dokumentasi.

3. Mengumpulkan dan menganalisis data. Setelah data diperoleh maka data itu dianalisis, yaitu menelaah tentang program apa saja yang telah dan belum dilaksanakan, serta tujuan mana saja yang telah dan belum tercapai.
4. Melakukan tindak lanjut (*follow up*). Berdasarkan temuan yang diperoleh, maka dapat dilakukan kegiatan tindak lanjut. Kegiatan pada langkah ini meliputi: (a) memperbaiki hal-hal yang dipandang lemah, kurang tepat atau kurang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai, dan (b) mengembangkan program dengan cara mengubah atau menambah beberapa hal yang dipandang dapat meningkatkan kualitas atau efektivitas program.

## **BAB 4**

### **KRITERIA EVALUASI PROGRAM**

Suatu program dapat dikatakan berhasil jika memenuhi kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria evaluasi tergantung pada pada tujuan dan aspek yang dievaluasi. Menurut Arikunto (2010) kriteria merupakan suatu yang paling penting kedudukannya dan harus disiapkan sebelum peneliti bertolak mengumpulkan data di lapangan untuk menyamakan ukuran bagi pengumpul data, menjaga kestabilan data, dan mempermudah peneliti mengolah data. Kriteria juga merupakan suatu ukuran yang menjadi patokan yang harus dicapai. Kriteria itu sendiri dapat bersumber dari dari buku pedoman atau petunjuk pelaksanaan. Sedangkan cara menyusun kriteria dengan kriteria kuantitatif tanpa pertimbangan. Kriteria yang disusun hanya dengan memperhatikan rentangan bilangan tanpa mempertimbangkan apa-apa dilakukan dengan membagi rentangan bilangan (Arikunto dan Abdul Jabar, 2007).

Dari penjelasan di atas, kriteria evaluasi program adalah suatu ukuran yang dapat dijadikan patokan yang disusun berdasarkan kondisi dan ketercapaian program, memuat aturan-aturan tentang cara menentukan peringkat terhadap data mentah yang diperoleh dari lapangan sehingga memiliki makna dan mudah dipahami.

Dengan demikian kriteria evaluasi program disini merupakan patokan sebagai tolak ukur atau standar yang digunakan untuk mengukur kondisi obyek yang akan dinilai.

Kriteria dapat menunjukkan suatu tingkatan atau jenjang dalam bentuk kata keadaan atau predikat.

Sebagai contoh; kriteria evaluasi program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah dapat meliputi ketiga komponen tersebut yang meliputi: (1) komponen antecedents, (2) komponen transaction dan (3) komponen outcomes, perlu dilakukan pula penilaian pada masing-masing indikator tersebut. Masing-masing indikator tersebut dijelaskan dengan kriteria sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1 Kriteria Evaluasi Program Pelayanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah atau Madrasah.

Komponen Evaluasi	Indikator	Kriteria Evaluasi	Kriteria
<i>Antecedents (Context)</i>	1. Organisasi Pelayanan BK.  2. Content: program pelayanan BK	1. Adanya organisasi pelayanan BK, berupa: a. Struktur organisasi BK. b. Uraian tugas.  2. Adanya program pelayanan BK yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.	a. Bila < 56% = Kurang Baik b. 57%-70% = Cukup Baik c. 71% - 85% = Baik d. 86% -100%= Sangat Baik  a. Bila < 56% = Kurang Sesuai b. 57% - 70% = Cukup Sesuai c. 71% - 85% = Sesuai d. 86% -100%= Sangat Sesuai
<i>Antecedents (Context)</i>	3. Metode: strategi yang	3. Adanya strategi yang di gunakan	a. Bila < 56% = Kurang Baik

	digunakan dalam pelaksanaan pelayanan BK.	dalam pelaksanaan pelayanan BK, meliputi: a. Pelayanan dasar b. Pelayanan responsif. c. Perencanaan individual d. Dukungan sistem. e. Penggunaan teknik tes. f. Penggunaan teknik nontes	b. 57% - 70% = Cukup Baik c. 71% - 85% = Baik d. 86% - 100% = Sangat Baik
Lanjutan Tabel 4.1			
<i>Antecedents (Context)</i>	4.Fasilitas:pra sarana dan sarana.  5. Pembiayaan:	4. Adanya fasilitas berupa: 4.1. Prasarana: a. Ruang BK secara menyeluruh. b. Ruang kerja guru BK c. Ruang konseling individu d. Ruang BK kelompok e. Ruang administrasi. f. Ruang tamu 4.2. Sarana: a. Himpunan (menyimpan) data b. Instrumen BK	a. Bila < 56% = Kurang Memadai b. 57% - 70% = Cukup Memadai c. 71% - 85% = Memadai d. 86% - 100% = Sangat Memadai  a. Bila < 56% = Kurang

	<p>6. Ketersediaan guru BK</p> <p>7. Kesiapan peserta didik</p>	<p>c. Perlengkapan kantor</p> <p>d. Perlengkapan elektronik</p> <p>e. Perlengkapan ATK.</p> <p>5. Tersedianya biaya, meliputi:</p> <p>a. Biaya pembelian fasilitas pendukung.</p> <p>b. Biaya emeliharaan sarana prasarana</p> <p>c. Biaya pengembangan</p> <p>6. Tersedianya Guru BK yang profesional, meliputi:</p> <p>a. Minimal Sarjana BK</p> <p>b. Telah memiliki sertifikat pendidik</p> <p>c. Memenuhi rasio</p> <p>7. Peserta didik aktif terlibat, adanya partisipasi.</p>	<p>Memadai</p> <p>b. 57% - 70% = Cukup Memadai</p> <p>c. 71% - 85% = Memadai</p> <p>d. 86% - 100% = Sangat Memadai</p> <p>a. Bila &lt; 56% = Kurang Memadai</p> <p>b. 57% - 70% = Cukup Memadai</p> <p>c. 71% - 85% = Memadai</p> <p>d. 86% - 100% = Sangat Memadai</p> <p>a. Bila &lt; 56% = Kurang Aktif</p> <p>b. 57% - 70% = Cukup Aktif</p> <p>c. 71% - 85% = Aktif</p> <p>d. 86% - 100% = Sangat Aktif</p>
Lanjutan Tabel 4.1			
<i>Transaction (Proses)</i>	Aktivitas pelaksanaan berbagai jenis pelayanan BK dan kegiatan pendukung.	<p>1. Adanya penggunaan berbagai jenis pelayanan BK, meliputi:</p> <p>a. Layanan orientasi</p> <p>b. Layanan informasi</p> <p>c. Layanan penempatan dan penyaluran</p> <p>d. Layanan pembelajaran</p> <p>e. Layanan konseling individual</p>	<p>a. Bila &lt; 56% = Kurang Baik</p> <p>b. 57% - 70% = Cukup Baik</p> <p>c. 71% - 85% = Baik</p> <p>d. 86% - 100% = Sangat Baik</p>

		f. Layanan bimbingan kelompok g. Layanan konseling kelompok h. Layanan mediasi i. Layanan konsultasi 2. Adanya penggunaan kegiatan pendukung, meliputi: a. Aplikasi instrun BK b. Himpunan data c. Konferensi kasus d. Kunjungan rumah e. Alih tangan kasus	
Outcomes (Produk)	Hasil pelaksanaan pelayanan BK bagi peserta didik	Adanya perkembangan perubahan peserta didik dengan menunjukkan perilakunya, yaitu: 1. Mengetahui program BK yang dilaksanakan sekolahnya. 2. Mengetahui kemampuan dan kelemahan dirinya. 3. Memahami jenjang pendidikan dan prospek pendidikan yang sedang	a. Bila $< 56\%$ = Kurang Baik b. $57\% - 70\%$ = Cukup Baik c. $71\% - 85\%$ = Baik d. $86\% - 100\%$ = Sangat Baik

Lanjutan Tabel 4.1		ditempuhnya.	
		4. Meningkatnya prestasi akademik. 5. Mampu merencanakan masa depannya, baik yang berhubungan dengan kelanjutan pendidikan maupun dunia kerja yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. 6. Menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang dihadapinya.	

Secara umum untuk menilai ketercapaian hasil evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling pada masing-masing komponen juga dapat dilakukan secara kualitatif dalam bentuk kategori, maka digunakan pedoman sebagai berikut:

1. Bila < 56% komponen evaluasi terpenuhi/tercapai, maka hasil evaluasi dikategorikan dalam kriteria **Kurang**.
2. Bila 57-70% komponen evaluasi terpenuhi/tercapai, maka hasil evaluasi dikategorikan dalam kriteria **Cukup**.
3. Bila 71%-85% komponen evaluasi terpenuhi/tercapai, maka hasil evaluasi dikategorikan dalam kriteria **Baik**.

4. Bila 86%-100% komponen evaluasi terpenuhi/tercapai, maka hasil evaluasi dikategorikan dalam kriteria **Sangat Baik**.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Juntika Nurihsan, *Manajemen Bimbingan dan Konseling di SMA Kurikulum 2004* (Bandung: Refika Aditama, 2005).
- Achmad Juntika Nurihsan, *Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling* (Bandung: Refika Aditama, 2005)
- Achmad Juntika Nurihsan, *Bimbingan dan Konseling* (Bandung: Refika Aditama, 2006)
- Agung Slamet Kusmanto, Dwi Yuwono Puji Sugiharto, Sugiyo, *The Development of Evaluation Program Model Guidance and Counseling Service Based on CSE-UCLA of Juniro High School in Kudus* (Journal of Educational Research and Evaluation, JERE 3, ISSN: 2252-6420, (1) (2014), h.1. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jere>
- Aip Badrujaman, *Teori dan Aplikasi Evaluasi Program Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: Indeks, 2014).
- Amirah Daniaty, *Evaluasi Bimbingan Konseling* (Pekanbaru, Riau: Zanafa Publishing, 2012).
- Anne Anastasi dan Susan Urbina, *Tes Psikologi*. Alih Bahasa: Robertus Hariono S. Imam (Jakarta: Indeks, 2007)
- Ashiq Hussain Dogar, Muhammad Azeem, Muhammad Iqbal Majoka, Amir Mehmood, Need Assessment of Students' Guidance and Counseling, *British Journal of Arts dan Ilmu Sosial*, (2011), ISSN: 2046-9578, Vol.1 No.2.
- Astin Lukum, *Evaluasi Program Pembelajaran IPA SMP Menggunakan Model Countenance Stake*. Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan. Vol.19, No.1, Juni

2015 (25-37). Tersedia Online: <http://journal.uny.ac.id/index.php/jpep>

Barbara Bonsall Wood, *Stake's Countenance Model: Evaluating an Environmental Education Professional Development Course* (The Journal of Environmental Education), Vol. 32, Issue 2, 2001, hh. 18. Published online: 31 Maret 2010.

Bruce Shertzer dan Sheley C. Stone, *Fundamental of Guidance (4th Ed)*. Boston: Houghton Mifflin Comp, 1981).

Cempaka Septyana Dewanty, *Guidance and Counseling Program Model At Junior High School Inclusive Education Providers (Journal Mahasiswa Bimbingan dan Konseling)*, Vol. 01 No. 01 (2013).

Daniel L. Stufflebearn dan Anthony J. Shinkfield, *Evaluation Theory, Models, & Applications* (San Francisco: Published by Jossey-Bass, 2007).

Depdikbud, *Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling Dalam Jalur Pendidikan Formal* (Jakarta: Ditjen Dikti Depdikbud, 2007).

Depdiknas, *Dasar Standarisasi Profesi Konseling* (Jakarta : Bagian Proyek Peningkatan Tenaga Akademik Dirjen Dikti, 2004), Online. Diakses tanggal 4 Juli 2016.

Depdikbud, *Permendikbud R.I., Nomor 111 Tahun 2014 tanggal 8 Oktober 2014 Tentang Bimbingan dan Konseling Pada*

- Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah* (Jakarta: Depdikbud, 2014).
- Dewa Ketut Sukardi dan Nila Kusmawati, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah*, (Edisi Revisi), (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Dewa Ketut Sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Devine, Patricia, *Using Logic Models in Substance Abuse Treatment Evaluation* (Fairfax: Caliber Associates, 1999), <http://teoribagus.com/model-evaluasi-program>. Diakses tanggal 4 Juli 2016.
- Djemari Mardapi, *Pengukuran Penilaian dan Evaluasi Pendidikan*. (Yogyakarta: Nuha Medika, 2012).
- Djudju Sudjana, *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008).
- Donal L. Kirkpatrick, James D. Kirkpatrick, *Evaluation Training Programs: Thr Four levels* (San Francisco: Berrett Koehler Publishershinc, 2006).
- Duane Brown, Jerry Trusty, "The ASCA National Model, Accountability, and Establidhing Causal Links Between School Counselors Activities and Student Outcome": A Reply ti Sink, *Journal Proafesional School Counseling*, Vol. 9, n1, p13, Oct 2005.
- Fathur Rahman. *Modul Ajar Pengembangan dan Evaluasi Program BK. Pendidikan Profesi Guru Bimbingan Dan*

- Konseling/Konselor (PPGBK). (Yogyakarta :Program Studi BK Universitas Negeri Yogyakarta: tanpa tahun.)
- Fathur Rahman, *Penyusunan Program BK di Sekolah*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2008)
- Furqon dan Aip Badrujaman, *Model Evaluasi Layanan Dasar Berorientasi Akuntabilitas* (Jakarta: Indeks, 2014).
- G.N. Obaitan, M.M. Osokoya, J.A. Adegbile, and J.O. Folorunso, *Evaluation of Pre Nigeria Certificate in Education (Pre-NCE) Programme in Colleges of Education in Nigeria* (International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE), ISSN: 2252-8822, Vol. 3, No. 1, March 2014, h. 19.
- Giyono. *Bimbingan dan Konseling* (Yogyakarta: Media Akademi. 2015). Guili Zhang, Nancy Zeller, Robin Griffith, Debbie Metcalf, Jennifer Williams, Christine Shea, and Katherine Misulis, Using the Context, Input, Process, and Product Evaluation Model (CIPP) as a Comprehensive Framework to Guide the Planning, Implementation, and Assessment of Service-learning Programs, *Journal of Higher Education Outreach and Engagement*, Volume 15, Number 4, p. 57, (2011).
- Gwendolyn J. Ogle, *Towards A Formative Evaluation Tool*, Dissertation submitted to the Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of (Blacksburg, Virginia, April 10, 2002).

- Habibi Ash-Shiddiqi, *Bimbingan dan Konseling*.  
<http://habibie16.blogspot.co.id/2013/01/bimbingan-dan-konseling.html> Diakses 29 Juli 2016.
- Hallen, *Bimbingan dan Konseling*. (Jakarta: Liputan Press, 2002).
- Hamid Hasan, *Evaluasi Kurikulum*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009).
- Hanung Sudiby, Sugiy, Supriyo. *Model Evaluasi Layanan Informasi Bimbingan dan Konseling Berbasis Context Input Process Product (CIPP)*. *Jurnal Bimbingan Konseling* . (1) (2013). <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jubk>. Diakses 25 Desember 2015.
- Harto Sundoyo, Totok Sumaryanto, Dwijanto, *Evaluasi Program Pendidikan Sistem Ganda Berdasarkan Stake Countenance Model*, *Innovative Journal of Curriculum and Educational Technology*, (Semarang: Unes Semarang), ISSN: 2252-712, 1(2), 2012, 31-36  
<http://journal.unnes.ac.id/sju/indexphp/ujet>
- Hatice Sancar Tokmak, H. Meltem Baturay, and Peter Fadde, *Applying the Context, Input, Process, Product Evaluation Model for Evaluation, Research, and Redesign of an Online Master's Program*, *The International Review of Riseacrh in Open and Distributed Learning (IRRODL)*, Vol 14, No 3 (2013)
- Jeanne C. Marsh, *The Goal -Oriented Approach to Evaluation: Critique and Case Study from Druc Abuse Treatment*

(Journal of Evaluation and Program Planning, Vol. 1 p. 48 (1978), Pergamon Press, Printed in U.S.A.

J.Kelly Coker, Randall L. Astramovich, and Wendy J. Hoskins.,  
Introducing the Accountability Bridge Model: A  
Program Evaluation Framework for School Counselors,  
*VISTAS article and ACA Digests are located in the ACA  
Online Library. Join ACA at:*  
<http://www.counseling.org/>

Jodi L. Fitzpatrick, James R. Sanders, dan Blaine R. Worthen,  
*Program Evaluation: Alternatives Approach and  
Practical Guidelines* (Boston: Pearson Education Inc.,  
2004).

John M. Owen, *Program Evaluation: Forms and Approaches*  
(Sydney: Allen & Unwin, 2006).

Kaufman, R & Thomas, S. *Evaluation Without Fear*. New York:  
New Viewpoints. 2000).

Kellog, WK., *Logic Model Development Guide* (Michigan : Battle  
Creek, 2004), [http://teoribagus.com/model-evaluasi-  
program](http://teoribagus.com/model-evaluasi-program). Diakses tanggal 4 Juli 2016.

Laurie Brady, *Curriculum Development in Australia*, (Sidney:  
Prentice Hall of Australia PTY.LTD., 1983).

Luky Kurniawan, Pengembangan Program Layanan Bimbingan dan  
Konseling Komprehensif di SMA (*Jurnal Psikologi  
Pendidikan & Konseling*). Volume 1 Nomor 1 Juni 2015.  
H. 2. ISSN: 2443-2202.  
<http://ojs.unm.ac.id/index.php/JPPK>

- Kariene Mittendorff, Douwe Beijaard, Perry den Brok & Maaïke Koopman, The influence of teachers' career guidance profiles on students' career competencies, *Journal of Vocational Education and Training*, 2012, pp. 1–19.
- Micinova, Veronika. Provusuv Diskrepancni Evaluacni Model: "Popis aplikacny aplikace". *Evaluacni teorie a praxe* 2(2): 1-21 (2014).
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014).
- Nandang Rusmana, *Bimbingan dan Konseling Kelompok Di Sekolah (Metode, Teknik, dan Aplikasi)* (Bandung: Rizki Press, 2009).
- Norman C. Gysberg and Patricia Handerson, Comprehensive Guidance and Counseling Program Evaluation: Program + Personil = Results, *ACA knowledge Center*, VISTAS Online, tanpa tahun, h. 188. [Counseling.org/knowledge-center/vistas](http://Counseling.org/knowledge-center/vistas) Diakses 25 Juli 2016.
- Norman C. Gysberg & Patricia Henderson, *Developing and Managing Your School Guidance and Counseling Program*, (Alexandria: American Counseling Association, 2006).
- Patton, Michael Quinn. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Terj. Budi Puspo Priyadi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
- Prayitno, Erman Amti. *Dasar-dasar Bimbingan Dan Konseling* (Jakarta. Rineka Cipta. 2014).

- Prayitno, *Panduan Kegiatan Pengawasan Bimbingan dan Konseling di Sekolah* (Jakarta : Rineka Cipta, 2001).
- Pupuh Fathurrohman, *Urgensi Bimbingan dan Konseling Di Perguruan Tinggi* (Bandung: Refika Aditama, 2014).
- Purwanto dan Atwi Suparman, *Evaluasi Program Diklat* (Jakarta: STIA-Lan Press, 1999).
- Qomari, Rohmad. Model-model Evaluasi Pendidikan. *Insania: Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan*. Vol. 13, No. 2, Mei-Ags 2008, 173-188.
- Rafli Kosasih & Soejipto, *Profesi Keguruan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009)
- Riyan Arthur, *Evaluasi dan Model Evaluasi Program*. <https://riyanarthur.files.wordpress.com/2016/01/bab-9-evaluasi-program-ok.pdf> Diakses tanggal 4 Juni 2016.
- Robert E. Stake, *Standarts-Based & Responsive Evaluation* (California: Sage Publication Inc. 2004).
- Sudjana, Nana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001)
- S. Eko Putro Widoyoko, *Evaluasi Program Pembelajaran*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
- Sofyan S. Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek* (Bandung: Alfabeta, 2004).
- Sugiyono, *Manajemen Bimbingan dan Konseling Di Sekolah* (Semarang:Widya Karya. 2011).
- Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar. *Evaluasi Program Pendidikan*. (Jakarta: Bumi Aksara. 2007)

- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2010).
- Sukoco KW. *Keefektifan Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling Sekolah Menengah Umum Kota Tegal*. <http://ejournal.upstegal.ac.id/index.php/Cakrawala/article/view/221>. Vol 6, No 10 (2011). Diakses 8 Januari 2016
- Sherril B. Gelmon, Anna Foucek dan Amy Waterbury, *Program Evaluation: Prinsiples and Practices* (Portland: Northwest Healt Foundation, 2005).
- Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.2014).
- Uman Suherman, *Manajemen Bimbingan dan Konseling*. (Bandung: Rizqi Press. 2013).
- Walter R. Borg dan Meredith Damien Gall, *Educational Research: An Introduction* (Boston: Pearson Education Inc. 1983).

## GLOSARIUM

**Pelayanan bimbingan dan konseling merupakan** bagian yang integral dari kegiatan proses pelaksanaan pendidikan di sekolah secara keseluruhan

**Program bimbingan dan konseling merupakan** bagian yang terpadu dari keseluruhan program pendidikan di sekolah, maka program bimbingan dan konseling seluruh kegiatannya diarahkan kepada pencapaian tujuan pendidikan di lembaga yang bersangkutan  
**Program bimbingan dan konseling merupakan** kumpulan dari berbagai rencana kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling yang disusun berdasarkan pada kebutuhan peserta didik pada suatu periode tertentu.

**Program harian merupakan** program pelayanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan pada hari-hari tertentu dalam satu minggu

**Dukungan sistem merupakan** komponen program bimbingan dan konseling yang bertujuan untuk meningkatkan keefektifan pelaksanaan program bimbingan dan keefektifan program pendidikan.

**Tanggung jawab pengelola merupakan** merencanakan melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling

**Konselor merupakan** tenaga inti dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling

**Psikolog merupakan** individu yang dilatih dengan baik dalam bidang konseling, psikologi klinis

**Psikologi pendidikan.** Psikolog pendidikan memiliki tugas utama dalam bidang remediasi mental, deviasi tingkah laku yang serius, gangguan dalam belajar dan gangguan emosional

**Fasilitas dan pembiayaan merupakan** aspek yang sangat penting yang harus diperhatikan dalam suatu program bimbingan dan konseling.

# INDEKS

---

## A

Adaptasi · 114  
administrasi · 42, 48, 49, 50, 54, 57,  
126, 144, 151  
Anggaran · 54, 56, 151

---

## B

bakat · 12, 18, 20, 26, 45, 46, 58, 59, 64,  
69, 73, 74, 75, 104, 128, 148, 150  
bimbingan · 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,  
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,  
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,  
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 45, 46,  
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,  
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67,  
68, 69, 70, 71, 73, 82, 93, 104, 109,  
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,  
118, 119, 120, 121, 122, 125, 127,  
129, 135, 141, 144, 146, 152  
BK · 13, 75, 92, 125, 126, 127, 128,  
134, 144, 146, 147, 148, 149, 150,  
151, 152, 153

---

## C

CIPP · 4, 82, 86, 87, 89, 134, 135  
CSE-UCLA · 4, 90, 92, 131

---

## D

deskripsi · 55, 93, 95, 97

---

## E

efektif · 8, 12, 14, 16, 24, 26, 30, 37, 39,  
41, 43, 53, 61, 64, 69, 71, 84, 92,  
107, 117, 119  
emosional · 26, 35, 52, 67, 141  
etika · 67, 120  
evaluasi · 1, 6, 7, 9, 10, 11, 21, 49, 50,  
51, 61, 62, 71, 76, 77, 78, 79, 80, 81,  
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,  
92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 101, 102,  
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,  
112, 114, 115, 116, 117, 118, 119,  
120, 121, 122, 124, 125, 129, 130,  
133, 137, 138

---

## F

fasilitas · 16, 17, 37, 53, 54, 55, 88, 100,  
110, 112, 113, 126, 144, 152  
formatif · 85, 86

---

## G

guru pembimbing · 6, 23, 58, 70

---

## I

implementasi · 1, 9, 10, 32, 56, 63, 64,  
81, 88, 90, 96, 105  
informasi · 7, 37, 42, 45, 46, 47, 51, 54,  
59, 60, 61, 62, 63, 65, 69, 70, 76, 78,  
81, 85, 87, 88, 91, 117, 119, 144,  
146, 152  
instrumen · 7, 32, 37, 54, 56, 92, 122,  
144, 146, 153  
interaksi · 35, 42, 93, 99

---

**J**

jenjang · 26, 28, 58, 65, 67, 68, 74, 75,  
125, 128, 148, 150

---

**K**

keputusan · 15, 19, 20, 28, 32, 33, 36,  
46, 60, 62, 63, 69, 73, 76, 77, 79, 81,  
85, 86, 87, 89, 94, 106, 109, 114, 122  
komitmen · 28, 60  
komprehensif · 27, 29, 30, 31, 87, 89,  
90, 92, 115, 116, 118, 120, 121  
kondusif · 55  
konseling · 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,  
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,  
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 37,  
38, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 50,  
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61,  
62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 82,  
93, 109, 110, 111, 112, 113, 114,  
115, 116, 118, 119, 120, 121, 122,  
125, 126, 127, 129, 135, 141, 144,  
146, 151, 152  
konselor · 7, 9, 10, 13, 14, 23, 25, 28,  
36, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 48, 49,  
50, 51, 52, 53, 58, 60, 61, 64, 65, 66,  
70, 98, 115, 117, 118, 119, 120, 121,  
122  
konteks · 20, 24, 27, 84, 86, 88, 89  
kriteria · 1, 8, 10, 11, 62, 71, 72, 73, 75,  
78, 79, 92, 102, 103, 107, 114, 116,  
117, 118, 124, 125, 129, 130

---

**L**

layanan · 1, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 21,  
22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 33, 34, 35,  
36, 38, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 50,  
51, 53, 54, 56, 57, 60, 61, 62, 64, 66,  
68, 69, 70, 71, 72, 92, 110, 111, 112,  
113, 114, 116, 117, 119, 120, 144,  
148, 149  
level · 84, 96

---

**M**

masalah · 12, 15, 16, 17, 18, 19, 26, 27,  
33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 49,  
53, 54, 61, 65, 68, 70, 71, 72, 91,  
122, 151  
masyarakat · 15, 17, 21, 28, 30, 50, 60,  
62, 66, 67, 69, 73, 88, 119  
materi · 8, 51, 72  
matrik · 96, 97  
minat · 12, 15, 18, 20, 25, 35, 37, 45, 58,  
59, 64, 69, 73, 74, 75, 100, 104, 128,  
148, 150  
model · 1, 9, 10, 11, 25, 30, 42, 76, 77,  
79, 82, 83, 84, 86, 87, 89, 90, 91, 92,  
93, 94, 95, 98, 99, 101, 102, 103,  
104, 105, 106, 107, 109, 110, 111,  
112, 114, 133, 137, 138  
motivasi · 33, 59

---

**P**

pengarahan · 15, 17  
Pengukuran · 104, 108, 133  
perangkat · 56, 66, 83, 150  
persepsi · 121  
peserta didik · 6, 12, 13, 14, 16, 17, 21,  
25, 26, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38,  
39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53,  
55, 57, 59, 60, 61, 69, 70, 71, 72, 75,  
88, 96, 101, 110, 112, 113, 114, 125,  
128, 141, 144, 148, 149, 150, 152  
potensi · 12, 14, 15, 18, 19, 24, 97  
praktik · 43  
prestasi · 20, 30, 54, 59, 75, 90, 100,  
117, 121, 128, 148, 150  
prinsip · 1, 8, 9, 10, 24, 25, 26, 27, 69  
profesi · 39, 44, 51, 53, 56, 58, 94, 120  
profesional · 25, 28, 33, 34, 36, 41, 42,  
44, 47, 48, 50, 52, 57, 126, 144, 150  
prosedur · 7, 77, 81, 83, 96, 107, 115

---

**S**

sekolah · 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,  
15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30,  
35, 36, 41, 42, 43, 48, 50, 51, 55, 57,  
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,  
74, 75, 83, 87, 88, 99, 104, 105, 106,  
110, 111, 113, 115, 117, 118, 119,  
120, 121, 122, 125, 141, 148, 149  
sistem · 30, 46, 47, 53, 67, 90, 103, 105,  
106, 107, 118, 126, 141, 144, 151  
siswa · 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 35,  
42, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 74,

93, 104, 105, 106, 115, 116, 117,  
118, 119, 120, 121, 151  
SLTA · 67, 68  
strategi · 21, 36, 82, 84, 110, 120, 126,  
144, 150  
sumatif · 85, 86, 91

---

**W**

wali kelas · 20, 57, 69

# LAMPIRAN

## CONTOH LAMPIRAN MODEL EVALUASI FATCHUR

### Lampiran 1

#### CONTOH PEDOMAN DOKUMENTASI

Pedoman ini untuk mengungkap ada tidaknya dokumen berkenaan dengan: (a) *komponen antecedents* berupa karakteristik pelayanan sebagai pendukung pelaksanaan layanan BK pada Sekolah/Madrasah dan (b) *komponen transaction* berupa karakteristik aktivitas pelayanan sebagai pelaksanaan layanan BK pada Sekolah/Madrasah.

Kegiatan	Temuan Evaluasi		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
<b>A. Komponen Antecedents.</b> 1. Organisasi pelayanan BK, berupa: a. Struktur organisasi BK. b. Uraian tugas. 1. Content: program pelayanan BK 3. Metode: strategi yang di gunakan dalam pelayanan BK, meliputi: a. Pelayanan dasar b. Pelayanan responsif. c. Perencanaan individual d. Dukungan sistem. e. Penggunaan teknik tes. f. Penggunaan teknik nontes 4. Fasilitas berupa: 4.1. Prasarana: a. Ruang BK secara menyeluruh. b. Ruang kerja guru BK c. Ruang konseling individu d. Ruang BK kelompok e. Ruang administrasi. f. Ruang tamu 4.2. Sarana: a. Himpunan (menyimpan) data			

<p>b. Instrumen BK  c. Perlengkapan kantor  d. Perlengkapan elektronik  e. Perlengkapan ATK.  5. Pembiayaan, meliputi:  a. Biaya pembelian fasilitas pendukung.  b. Biaya pemeliharaan sarana prasarana  c. Biaya pengembangan  6. Guru BK yang profesional, meliputi  a. Minimal Sarjana BK  b. Telah memiliki sertifikat pendidik.  c. Memenuhi rasio  7. Kesiapan peserta didik untuk aktif terlibat, adanya absensi.  <b>B. Komponen Transactions</b>  Aktivitas pelaksanaan berbagai jenis pelayanan BK dan kegiatan pendukung:  1. Adanya penggunaan berbagai jenis pelayanan BK, meliputi:  a. Layanan orientasi  b. Layanan informasi  c. Layanan penempatan dan penyaluran  d. Layanan pembelajaran  e. Layanan konseling individual  f. Layanan bimbingan kelompok  g. Layanan konseling kelompok  h. Layanan mediasi  i. Layanan konsultasi  2. Adanya penggunaan kegiatan pendukung, meliputi:  a. Aplikasi instrumen BK  b. Himpunan data  c. Konferensi kasus  d. Kunjungan rumah  e. Alih tangan kasus.</p>			
--	--	--	--

## Lampiran 2

### CONTOH PEDOMAN OBSERVASI

Pedoman observasi ini untuk mengamati kegiatan yang dilakukan oleh Guru BK terhadap: komponen transaction pada pelaksanaan pelayanan BK pada Sekolah/Madrasah.

Tanggal observasi :

Nama guru BK :

Sekolah/Madrasah :

Kegiatan	Temuan Evaluasi		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
<b>Komponen Transactions.</b> Aktivitas pelaksanaan berbagai jenis pelayanan BK dan kegiatan pendukung: 1. Adanya penggunaan berbagai jenis pelayanan BK, meliputi: a. Layanan orientasi b. Layanan informasi c. Layanan penempatan dan penyaluran d. Layanan pembelajaran e. Layanan konseling individual f. Layanan bimbingan kelompok g. Layanan konseling kelompok h. Layanan mediasi i. Layanan konsultasi 2. Adanya penggunaan kegiatan pendukung, meliputi: a. Aplikasi instrumen BK b. Himpunan data c. Konferensi kasus d. Kunjungan rumah e. Alih tangan kasus			

### Lampiran 3

#### CONTOH PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara ini untuk mengungkap reaksi (tanggapan) **Wali**

**kelas, Koordinator BK, Guru BK dan Guru Mata Pelajaran** terhadap

komponen *outcomes* pada pelaksanaan pelayanan BK pada Sekolah/Madrasah.

Tanggal wawancara :

Nama responden :

Sekolah/Madrasah :

#### **Komponen Outcomes**

Hasil dari aktivitas pelayanan dalam pelaksanaan layanan BK, apakah adanya perubahan peserta didik?

Bagaimana Bapak/Ibu melihat adanya perubahan tersebut pada peserta didik? menunjukkan perilakunya, yaitu:

1. Apakah peserta didik mengetahui program BK yang dilaksanakan sekolah ini?
2. Apakah peserta didik mengetahui kemampuan dan kelemahan dirinya?
3. Apakah peserta didik memahami jenjang pendidikan dan prospek pendidikan yang sedang ditempuhnya di sekolah ini?
4. Apakah prestasi belajar peserta didik meningkat?
5. Apakah peserta didik mampu merencanakan masa depannya, baik yang berhubungan dengan kelanjutan pendidikan maupun

dunia kerja yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya?

6. Apakah peserta didik mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang dihadapinya?

#### Lampiran 4

### CONTOH PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara ini untuk mengungkap reaksi (tanggapan) peserta didik terhadap komponen outcomes pada pelaksanaan pelayanan BK pada

Sekolah/Madrasah.

Tanggal wawancara :

Nama responden :

Sekolah/Madrasah :

#### **Komponen *Outcomes***

Hasil dari aktivitas pelayanan dalam pelaksanaan layanan BK peserta didik, dapat dilihat pada perubahan perkembangan peserta didik dengan menunjukkan perilakunya, yaitu:

1. Apakah kalian mengetahui program BK yang dilaksanakan sekolah ini?
2. Apakah kalian mengetahui kemampuan dan kelemahan diri sendiri?.
3. Apakah kalian memahami jenjang pendidikan dan prospek pendidikan yang sedang kalian tempuh sekarang?.
4. Apakah prestasi belajar kalian meningkat?

5. Apakah kalian telah merencanakan masa depan yang baik? baik yang berhubungan dengan kelanjutan pendidikan maupun dunia kerja yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
6. Apakah kalian mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang dihadapi sekarang?

### Lampiran 5

#### CONTOH RUBRIK PENILAIAN

Komponen	Indikator	Rubrik
<i>Antecedents.</i>	1. Organisasi pelayanan BK, berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Struktur organisasi BK.</li> <li>b. Uraian tugas.</li> </ol> 2. Content: program pelayanan BK	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya garis komando</li> <li>b. Adanya garis koordinasi</li> <li>c. Adanya garis konsultasi</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya uraian tugas untuk Kepala Sekolah</li> <li>b. Adanya uraian tugas untuk Wakil Kepala Sekolah</li> <li>c. Adanya uraian tugas untuk Koordinator BK</li> <li>d. Adanya uraian tugas untuk Wali Kelas</li> <li>e. Adanya uraian tugas untuk guru BK</li> <li>f. Adanya uraian tugas untuk Mata Pelajaran</li> <li>g. Adanya uraian tugas untuk Peserta Didik</li> <li>h. Adanya uraian tugas untuk Staf TU</li> <li>i. Adanya uraian tugas untuk Komite Sekolah</li> </ol> Adanya perangkat: program pelayanan BK yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rasional program BK</li> <li>b. Landasan hukum program BK</li> <li>c. Visi dan Misi program BK</li> <li>d. Tujuan program BK</li> </ol>

	<p>3. Metode: strategi yang digunakan dalam pelayanan BK.</p> <p>4. Fasilitas berupa prasarana dan sarana.</p> <p>5. Pembiayaan</p>	<p>e. Bidang-bidang pelayanan BK</p> <p>f. Kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BK</p> <p>g. Penilaian pelayanan BK</p> <p>h. Strategi pelaksanaan program BK</p> <p>i. Sarana dan prasarana BK</p> <p>j. Anggaran/biaya pelaksanaan program BK</p> <p>j. Jadwal kegiatan</p> <p>k. Kalender akademik.</p> <p>a. Adanya pelayanan responsif.</p> <p>b. Adanya perencanaan individual</p> <p>c. Adanya dukungan sistem.</p> <p>d. Adanya penggunaan teknik tes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Bakat</li> <li>&gt; Minat</li> <li>&gt; Intelegensi</li> <li>&gt; Prestasi belajar</li> </ul> <p>e. Adanya penggunaan teknik nontes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Observasi</li> <li>&gt; Wawancara</li> <li>&gt; Dokumentasi</li> <li>&gt; Angket siswa</li> <li>&gt; Angket guru</li> <li>&gt; Angket orang tua</li> <li>&gt; Buku pribadi</li> <li>&gt; Sosiometri</li> <li>&gt; Buku induk</li> <li>&gt; Daftar cek masalah.</li> </ul> <p>a. Adanya prasarana, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Ruang BK secara menyeluruh.</li> <li>&gt; Ruang kerja guru BK</li> <li>&gt; Ruang konseling individu</li> <li>&gt; Ruang BK kelompok</li> <li>&gt; Ruang administrasi.</li> <li>&gt; Ruang tamu</li> </ul> <p>b. Adanya sarana, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Himpunan (menyimpan) data</li> <li>&gt; Instrumen BK</li> <li>&gt; Perlengkapan kantor</li> <li>&gt; Perlengkapan elektronik</li> </ul>
--	---	---

<p><b>Transaction</b></p>	<p>6.Guru BK yang profesional</p> <p>7. Kesiapan peserta didik untuk aktif terlibat.</p> <p>Aktivitas pelaksanaan berbagai jenis pelayanan BK dan kegiatan pendukung.</p>	<p>&gt; Perlengkapan ATK.</p> <p>a. Terdapat biaya pembelian fasilitas pendukung. b. Terdapat biaya pemeliharaan sarana prasarana c. Terdapat biaya pengembangan</p> <p>a. Berpendidikan Sarjana BK b. Telah memiliki sertifikat pendidik. c. Telah memenuhi rasio</p> <p>Adanya absensi peserta didik dalam mengikuti berbagai jenis kegiatan pelayanan BK.</p> <p>1. Adanya penggunaan berbagai jenis pelayanan BK,meliputi: a. Layanan orientasi b. Layanan informasi c. Layanan penempatan dan penyaluran d. Layanan pembelajaran e. Layanan konseling individual f. Layanan bimbingan kelompok g. Layanan konseling kelompok h. Layanan mediasi i. Layanan konsultasi</p> <p>2. Adanya penggunaan kegiatan pendukung, meliputi: a. Aplikasi instrumen BK b. Himpunan data c. Konferensi kasus d. Kunjungan rumah e. Alih tangan kasus</p>
---------------------------	---	--

## TENTANG PENULIS



Dr. M. Fatchurahman, M.Pd., M.Psi. lahir di Pangkalan Bun pada tanggal 5 Agustus 1966, merupakan anak ke dua dari enam bersaudara dari Bapak H. M. Ichsan Munawar (Alm) dan Ibu Hj. Siti Yusufah Riana (Alm). Pada tahun 1995 menikah dengan Hj. Norhayati, M.Pd. berprofesi sebagai guru PNS diperbantukan pada M.Ts. Islamiyah Palangka Raya, dikarunia 3 orang anak putra, yaitu: 1) Muhammad Nur Fathan (saat ini kuliah di IAIN Palangka Raya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syari'ah), 2) Aldi Firdaus (SMA Ponpes Darunnajah Jakarta Selatan), dan 3) Muhammad Tirto Ardiyanto (MI Islamiyah Palangka Raya).

Riwayat pendidikan, penulis menyelesaikan pendidikan di SD Inpres Kotawaringin Hulu tahun 1981, MI Najmul Huda Kotawaringin Lama tahun 1981, SMP KNPI Kotawaringin Lama tahun 1984, SPG PGRI Pangkalan Bun tahun 1987, S1 Psikologi Pendidikan dan Bimbingan FKIP UM Palangkaraya tahun 1993, S2 Psikologi Untag Surabaya tahun 2012, S2 Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang tahun 2012 dan S3 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta tahun 2013.

Penulis mengawali karir menjadi Pegawai Negeri Sipil diperbantukan sebagai Guru SMA Muhammadiyah Palangka Raya sejak tahun 1994 sampai tahun 2002. Tahun 2002 pindah (mutasi)

menjadi dosen pada program studi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya sampai sekarang. Pernah sebagai: Staf BAU UM Palangkaraya sejak tahun 1989-1994, Kabag. Umum dan Perlengkapan BAU UM Palangkaraya tahun 1994 -1997, Kepala BAU UM Palangkaraya tahun 1997 -2007, Sekretaris Prodi PGSD FKIP UM Palangkaraya tahun 2007-2008, Dekan FKIP UM Palangkaraya tahun 2012-2016 dan sekarang menjabat sebagai Kepala LP3MP UM Palangkaraya sejak tahun 2016.

# KONSEP DASAR EVALUASI PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING

**B**uku ini dimaksudkan untuk menambah referensi bagi para mahasiswa, dosen, guru serta teman seprofesi lainnya. Buku ini berisikan tentang (1) konsep program bimbingan dan konseling, meliputi: pengertian dan tujuan program, sasaran program, jenis-jenis program, prinsip-prinsip pokok pelayanan bimbingan dan konseling, komponen-komponen program bimbingan dan konseling, mekanisme implementasi program bimbingan dan konseling di sekolah/madrasah, dan gambaran pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling di sekolah/madrasah, serta kriteria keberhasilan pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah/madrasah (2) konsep evaluasi program, meliputi: pengertian evaluasi program, dan model-model evaluasi program, dan (3) kriteria evaluasi program bimbingan dan konseling.

## Published by :

Research



IRDH

Office :

Jl. A. Yani. Sokajaya 59 Purwokerto

New Villa Bukit Sengkaling C9 No. 1 Malang

HP: 081 357 217 319 WA. 089 621 424 412

[www.irdhcenter.com](http://www.irdhcenter.com)

email: [buku.irdh@gmail.com](mailto:buku.irdh@gmail.com)

ISBN 978-602-0726-43-4



9

786020

726434